



DOKUMEN

RENSTRA

GKI DI TANAH PAPUA

2027 - 2032



Kasih Kristus menggerakkan Kemandirian Gereja,
Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan



Bersatu
Dalam Kristus



Bertumbuh
Dalam Firman



Melayani
Dengan Kasih



Memberi Harapan
Bagi Tanah Papua



HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen RENSTRA Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032 ini dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, organisasi, dan teologis untuk dipergunakan dalam Sidang Sinode GKI Di Tanah Papua pada Oktober 2027.

Argapura, ... 2027

**Mengetahui/Menyetujui,
BADAN PEKERJA SINODE
GKI DI TANAH PAPUA**

Pdt. Andrikus Mofu, M.Th.
Ketua

Pdt. Daniel Y. Kaigere, M.Th
Sekretaris

Pdt. Hizkia Rollo, S.Th., M.M.
Howay
Wakil Ketua I
III

Pdt. Gustaf M. Wutoy, S.Th., M.Th.
Wakil Ketua II

Pnt. Dr. Netty
Wakil Ketua

Pdt. Hendry W.D. Kakiay, S.Th
Wakil Sekretaris

Sym. Theresya I. Numberi, SE
Bendahara





TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA
SINODE GKI DI TANAH PAPUA PERIODE 2027–2032
Berdasarkan SK BPS Sinode GKI di Tanah Papua Nomor: 022/G-14.1a/IV/2026

PELINDUNG/PENASEHAT : BADAN PEKERJA SINODE GKI DI TANAH PAPUA
PENDAMPING/PENGARAH : 1. PDT. GUSTAF M. WUTOY, M.Th.
2. PNT. DR. NAOMI N HOWAY, S.K.M., M.KES
PENDAMPING AHLI : DR. SIGIT TRIYONO

TIM PENYUSUN
KETUA : PNT. JONNI MARWA
SEKRETARIS : PDT. Dr. ERNA AYAL, M.MIS
ANGGOTA : 1. PNT. HUGO WARAMI
2. Dr. SURIEL MOFU, S.PD.,M.ED,M.PHIL.
3. PNT. PHILIPUS RAMANDEI
4. Dr. RICHARD PATTY, S.E., M.SI
5. MOSES YOMUNGGA, S.E., M.M
6. PDT. Dr. CLEOPATRIZA TH.F RUHULESSIN
7. PDT. Dr. IMANUEL WARIKAR, M.TH.
8. PDT. STEWARD TATONTOS, S.TH.

ADMINISTRASI : AMARILIS C. P. MARANI, S.Th





SAMBUTAN BADAN PEKERJA SINODE GKI DI TANAH PAPUA

Syalom...!!!

Salam sejahtera dalam Yesus Kristus!

Syukur bagi-Mu Tuhan, karena atas pernyataan-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sinode GKI di Tanah Papua dapat dirampungkan. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Badan Pekerja Sinode GKI (BP Sinode GKI) di Tanah Papua dalam perencanaan program dan kegiatan serta menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Muatan dokumen ini terdiri atas: gambaran umum kondisi eksisting GKI di Tanah Papua, Visi, Misi, Azas, Tema, dan Nilai; Masalah, Isu Strategis, dan Program Prioritas; Target, Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan; Tahun Gereja dan Tema Tahun Pelayanan; Struktur Organisasi GKI di Tanah Papua; Proyeksi Pembangunan; Monitoring dan Evaluasi; serta Rekomendasi.

Membaca naskah dokumen Renstra ini, mengingatkan kita sekalian pada pekerjaan dan tantangan yang tidak mudah dialami oleh Sinode GKI di Tanah Papua periode 2022-2027, yakni tantangan utama pelayanan yang berkisar pada adaptasi terhadap perubahan zaman serta pemenuhan Rencana Strategis (Renstra) dengan tema "*Menjadi Gereja Pembawa Keadilan, Kedamaian dan Kesejahteraan*", bahwa Injil Tuhan harus terpancar ke ke seluruh pelosok negeri termasuk ke pesisir dan pulau-pulau, gunung dan lembah.

Saudara –saudari yang terkasih,

Rencana Strategis (Renstra) 2022-2027 telah mendapat tantangan yang berfokus pada lima pilar pelayanan utama, yakni (1) Fokus kepada Jemaat dan Masyarakat Adat; (2) Akuntabilitas dan Tata Kelola Lembaga (*Good Governance*); (3) Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia; (4) Tantangan Eksternal dan Pelayanan Holistik; dan (5) Lingkungan hidup: Merespons krisis ekologis dengan menggalakkan kepedulian terhadap kelestarian alam ciptaan, sebagaimana difokuskan dalam program tahunan gereja.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya patut disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sinode GKI di Tanah Papua dan pihak lain yang berkaitan erat dengan proses penyusunan ini, atas segala kepercayaan dan perhatiannya dalam mendukung kelancaran upaya penyusunan dokumen ini. Semoga semua yang diperbuat bagi gereja ini akan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Memberkati, Syalom...!

Argapura, ... 2027

**Mengetahui/Menyetujui,
BADAN PEKERJA SINODE
GKI DI TANAH PAPUA**

Pdt. Andrikus Mofu, M.Th.
Ketua

Pdt. Daniel Y. Kaigere, M.Th
Sekretaris





KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA SINODE GKI DI TANAH PAPUA 2027-2032

Syukur Bagi-Mu Tuhan!

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sinode GKI di Tanah Papua yang ada di tangan pembaca saat ini adalah sebuah *roadmap* 'jalanan peta' gereja untuk mencapai visi menjadi "Gereja Pembawa Keadilan, Kedamaian dan Kesejahteraan". Dokumen ini menjadi pedoman pelayanan dan kesaksian seluruh jemaat, klasis, dan sinode wilayah Sinode GKI di Tanah Papua dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual di Tanah Papua.

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah gereja yang lahir dari persemaian benih Injil yang ditaburkan oleh Zendeling Ottow dan Geissler pada 5 Februari 1855 di Mansinam dan terus disebarkan oleh pekerja dari tenaga-tenaga zending dari Benua Eropa (Jerman dan Belanda) dan Benua Asia (Sangihe atau Sangir Talaud dan Maluku), dan Benua Papua yang dilanjutkan oleh anak-anak asli Papua sebagai hasil buah sulung dari pekerjaan pekabaran Injil untuk membangun Tanah Papua.

Nuansa utama dokumen Renstra Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 mencakup: (1) Visi Pelayanan: Mewujudkan gereja yang secara nyata menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat; (2) Nilai Dasar yang menjadi landasan moral rohani yakni Kesehatan, Ketekunan, Kesetiaan, dan Ketaatan Iman dalam menjalankan misi; dan (3) Fokus Pembangunan dan Inovasi yang memuat arah strategis jangka panjang, termasuk perkuatan pelayanan pastoral, pemberdayaan ekonomi jemaat, dan transformasi pelayanan gereja di era modern. Secara keseluruhan, dokumen ini bukan sekadar arsip administratif, melainkan kompas teologis dan operasional agar kehadiran GKI di Tanah Papua (yang berdiri sejak 1956) benar-benar menjadi "Kabar Baik" yang transformatif bagi tanah dan masyarakat Papua.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua selaku Pelindung dan Penasehat yang telah mengeluarkan SK Nomor: 022/G-14.1a/IV/2026 bagi Tim Penyusun, Tim Pendamping/Pengarah, Pendamping Ahli, dan Tenaga Administrasi yang dengan setia terus berjuang menyediakan waktu, tenaga, data, dan dukungan lainnya; serta semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, Dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan proyeksi program dan kegiatan pelayanan di lingkup Sinode GKI di Tanah Papua. Syallom!

Argapura, ... 2027

**A.n. Tim Penyusun Dokumen RENSTRA
Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032**

Pnt. Jonni Marwa
Ketua

Pdt. Dr. Erna Ayal, M.Mis.
Sekretaris





I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Dasar Penyusunan Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penyusunan Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Metode Penyusunan Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Evaluasi Dokumen Renstra GKI 2021-2027.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Deskripsi Responden.....	Error! Bookmark not defined.

II. II. Kondisi Eksisting Sinode GKI di Tanah Papua

2.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kilas Balik Arah Pelayanan GKI di Tanah Papua.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tugas dan Panggilan GKI Di Tanah Papua.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Sumber Daya GKI Di Tanah Papua.....	Error! Bookmark not defined.

2.4.5. Sumber Daya Ekonomi dan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Jangkauan Pelayanan Sinode GKI Di Tanah Papua.....	Error! Bookmark not defined.
2.6. Yayasan-Yayasan.....	Error! Bookmark not defined.
2.7. Evaluasi Renstra 2022-2027.....	Error! Bookmark not defined.

III. III. Visi, Misi, Azas, dan Nilai

3.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Visi.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Misi.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Azas.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Nilai.....	Error! Bookmark not defined.

IV. IV. Masalah, Isu Strategis, dan Analisis SWOT

4.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Isu Strategis.....	Error! Bookmark not defined.

V. V. Arah Kebijakan, Strategi, Program Prioritas, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

5.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Arah Kebijakan GKI.....	Error! Bookmark not defined.
5.4 Program Prioritas.....	Error! Bookmark not defined.
5.5 Kerangka Regulasi.....	Error! Bookmark not defined.
5.6 Kerangka Kelembagaan (Struktur Organisasi).....	Error! Bookmark not defined.

VI. VI. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

6.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
6.2 Target Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
6.3 Kerangka Pendanaan.....	Error! Bookmark not defined.

VII. VII. Tahun Gereja dan Tema Tahun Pelayanan

7.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
7.2 Tahun Gereja.....	Error! Bookmark not defined.
7.3 Tema Tahun Pelayanan.....	Error! Bookmark not defined.

VIII. VIII. Struktur Program dan Anggaran

8.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
--------------------	------------------------------

IX. IX. Proyeksi Rencana Pembangunan Sinode GKI di Tanah Papua

9.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
9.2 Proyeksi Pembangunan Lima Tahun.....	Error! Bookmark not defined.
9.3 Proyeksi Pembangunan Dua Puluh Tahun.....	Error! Bookmark not defined.
9.4 Proyeksi Pembangunan Seratus Tahun.....	Error! Bookmark not defined.

X. X. Monitoring dan Evaluasi

10.1 Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
10.2 Monitoring.....	Error! Bookmark not defined.





10.3 Evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032	Error! Bookmark not defined.
--	------------------------------

XI. XI. Penutup

11.1 Pengantar	Error! Bookmark not defined.
11.2 Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
11.3 Rekomendasi.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR REFERENSI.....	Error! Bookmark not defined.





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Arah Perkembangan Pelayanan GKI di Tanah Papua.....	10
Tabel 2.2 Sumberdaya Manusia Pelayan dan Administrasi GKI	13
Tabel 2.3. SDM Kantor Sinode	14
Tabel 2.4. SDM GKI yang tersebar di 12 Wilayah Pelayanan	15
Tabel 2.5. Jumlah Pendeta per Jiwa yang dilayani pada setiap Wilayah Pelayanan	16
Tabel 2.6. Jumlah Kepala Keluarga yang dilayani per Pendeta	16
Tabel 2.7. SDM berdasarkan Luas Wilayah Pelayanan.....	17
Tabel 2.8. Kelembagaan Gereja pada Aras Klasis dan Jemaat	19
Tabel 2.9. Distribusi Klasis, Jemaat Berdasarkan Sinode Wilayah.....	21
Tabel 2.5 Penerimaan dan Persentase Secara Proporsional pada tiap aras gereja	23
Tabel 2.6 Distribusi Persembahan Berdasarkan Wilayah dan Klasis	23
Tabel 2.7 Distribusi Perpuluhan Berdasarkan Wilayah dan Klasis	24
Tabel 2.8. Demografi GKI Berdasarkan Sebaran Unsur.....	26
Tabel 2.9. Demografi GKI Berdasarkan Generasi Muda Versus Dewasa	26
Tabel 2.10. Demografi GKI Berdasarkan Generasi Muda Versus Dewasa	26
Tabel 2.11. Rasio PAR dan PAM di Wilayah Pelayanan GKI	27
Tabel 2.12. Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah pada YPK.....	28
Tabel 2.13. Kondisi Konsentrasi Pendidikan Dasar dan Menengah pada YPK di Seluruh Tanah Papua	28
Tabel 2.14. Distribusi Jenjang Pendidikan Berdasarkan Sekolah, Guru dan Murid.....	29
Tabel 2.15. Sasaran Strategis dan Pokok Program.....	32
Tabel 2.16. Hasil Temuan Evaluasi terhadap Renstra 2022-2027	33
Tabel 4.1 Masalah dan Sub Masalah.....	38
Tabel 4.2 Isu dan Sub Isu	40
Tabel 4.3 Analisis SWOT	42
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032.....	45
Tabel 5.2 Program Strategis Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032	48
Tabel 5.3 Program Prioritas Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032	49
Tabel 5.4 Rancangan Produk Regulasi Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 ..	50
Tabel 6.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032	56
Tabel 6.2 Proyeksi Penerimaan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032	57
Tabel 7.1 Tahun Gereja dalam Sinode GKI di Tanah Papua	58
Tabel 7.2 Tema Tahun Pelayanan dalam Sinode GKI di Tanah Papua	59
Tabel 8.1. Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja.....	60
Tabel 8.2. Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja	61
Tabel 8.3. Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja	61
Tabel 8.4. Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.....	61
Tabel 8.5. Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja.....	61
Tabel 8.6. Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi keuangan gereja berbasis digital	62
Tabel 8.7. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	62





Tabel 8.8. Penguatan layanan diakonia, advokasi, dan supermasi hukum	62
Tabel 8.9. Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja	62
Tabel 8.10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gereja	63
Tabel 9.1 Program Strategis 1	64
Tabel 9.2 Program Strategis 2	65
Tabel 9.3 Program Strategis 3	65
Tabel 9.4 Program Strategis 4	65
Tabel 9.5 Program Strategis 5	66
Tabel 9.6 Program Strategis 6	66
Tabel 9.7 Program Strategis 7	66
Tabel 9.8 Program Strategis 8	67
Tabel 9.9 Program Strategis 9	67
Tabel 9.10 Program Strategis 10	68
Tabel 9.11 Analisis Prediksi Ekonomi Global dan Nasional.....	69
Tabel 9.12 Analisis Prediksi Politik Global dan Nasional.....	70
Tabel 9.13 Analisis Prediksi Teknologi Global dan Nasional.....	72
Tabel 9.14 Analisis Prediksi Sosial Budaya Global dan Nasional.....	74
Tabel 9.15 Analisis Prediksi Lingkungan Hidup Global dan Nasional.....	76
Tabel 9.16 Analisis Prediksi Perilaku Beragama Global dan Nasional.....	78
Tabel 9.17 Fase Konsolidasi Proyeksi 20 Tahun Pertama	80
Tabel 9.18 Fase Transformasi Proyeksi 20 Tahun Kedua.....	81
Tabel 9.19 Fase Ekspansi Proyeksi 20 Tahun Ketiga	82
Tabel 9.20 Fase Stabilitas Proyeksi 20 Tahun Keempat	83
Tabel 9.21 Fase Kemandirian Proyeksi 20 Tahun Kelima	83
Tabel 10.1 Landasan Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renstra Sinode GKI di Tanah Papua.....	86
Tabel 10.2 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renstra.....	86
Tabel 10.3 Sistem Informasi Manajemen Sinode GKI di Tanah Papua.....	88
Tabel 10.4 Sistem Pelaporan Monitoring	90
Tabel 10.5 Manajemen Risiko dalam Monitoring	91
Tabel 10.6 Kriteria Evaluasi	91
Tabel 10.7 Jenis-Jenis Evaluasi.....	92
Tabel 10.8 Pengumuman Hasil Evaluasi	93
Tabel 10.9 Struktur Kelembagaan Monev.....	94





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Responden dalam Berbagai Peran/Jabatan	3
Gambar 1.2 Data Tanggapan Responden Terhadap Relevansi Renstra	4
Gambar 1.3 Tanggapan Reponden Pemahaman terhadap Restra	5
Gambar 1.4 Ketidakhadiran Warga Jemaat pada Ibadah Hari Minggu	7
Gambar 2.1 Visualisasi Delapan Paradigma Baru.....	12
Gambar 2.2 Peta Pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua	17
Gambar 5.1 Kondisi Sumber Daya Sinode GKI di Tanah Papua	33





DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Advokasi	: Penguatan
Aksesibilitas Wilayah	: Ukuran kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi untuk mencapai wilayah Pelayanan
Arah Kebijakan	: pedoman dan dasar rencana kerja yang akan dicapai
ADK	: Aksi Dana Kemandirian
BKD	: Beban Kerja Dosen
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
<i>Burnout</i>	: Kejenuhan
<i>Diakonia</i>	: Pelayanan kasih
Dinamika Spiritual batin	: Proses perubahan, perkembangan, atau pasang surut pengalaman seseorang dalam mencari makna hidup, moralitas, dan hubungannya dengan sesuatu yang dianggap sakral atau transenden
Dinamika Oikoumene	: Proses perkembangan dan tantangan dalam gerakan persatuan umat Kristen dari berbagai denominasi
Dinamika Jemaat	: Serangkaian proses interaksi, pertumbuhan, dan perubahan yang terjadi di dalam persekutuan umat beriman atau jemaat gereja
Ekologis	: Kepedulian dan kelestarian lingkungan ciptaan
Egosentrisme	: Kondisi psikologis di mana seseorang tidak mampu memahami atau melihat sudut pandang, perasaan, dan pemikiran orang lain, sehingga mereka menganggap panda Ngan dan kepentingan pribadinya sebagai satu-satunya pusat realitas
Etnosentrisme	: Sikap atau pandangan yang menilai kebudayaan atau kelompok lain berdasarkan standar dan nilai-nilai kebudayaan sendiri
Ekoteologis	: Cabang teologi yang mengkaji hubungan antara ajaran atau nilai keagamaan dengan lingkungan hidup
Finansial	: Segala hal yang berkaitan dengan urusan atau pengelolaan keuangan, termasuk perolehan, alokasi, dan manajemen sumber daya ekonomi
Gen Z	: Generasi muda
GKI	: Gereja Kristen Injili
<i>Growth Strategy</i>	: Strategi Pertumbuhan
HAM	: Hak Asasi Manusia
HUT	: Hari Ulang Tahun
HDS	: Hari Doa Syukur
Integritas	: Tinggi kejujuran, transparansi dan tanggung jawab
Inkulturasi Injil	: Proses dialog, penyisipan, dan pengintegrasian ajaran serta nilai-nilai Kristiani secara mendalam ke dalam suatu budaya lokal
Kaum Awam	: Sebutan bagi orang biasa di luar golongan rohaniwan
<i>Koinonia</i>	: Persekutuan
Kolaborasi	: Kerja sama antara jemaat, klasis, sinode, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat adat dan mitra oikumene
Kepedulian	: Tanggung jawab gereja dalam menjaga keutuhan ciptaan
LEG	: Lembaga Ekonomi Gereja
<i>Marturia</i>	: Kesaksian
Marginalisasi kekuasaan,	: Proses peminggiran suatu kelompok atau individu dari sistem pengambilan keputusan, dan akses terhadap berbagai sumber daya
Multidenominasi	: Konsep yang menggambarkan gabungan, keterlibatan, atau penerimaan terhadap lebih dari satu kelompok, cabang, atau aliran kepercayaan (denominasi) dalam suatu naungan agama yang sama, atau acara keagamaan tertentu





Multikulturalisme mengagungkan	: Ideologi dan pandangan yang mengakui, menerima, dan keberagaman—seperti suku, ras, agama, dan budaya—dalam masyarakat
<i>Missio Dei</i>	: Misi Allah
MBG	: Makan Bergizi Gratis
Non OAP	: Bukan Orang Asli Papua
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAP	: Orang Asli Papua
PAR	: Persekutuan Anak dan Remaja
PAM	: Persekutuan Anggota Muda
Profesional	: Kualitas pelayanan yang tertib, efektif, kompeten dan berorientasi pada hasil pelayanan yang berdampak
Pelayanan Inklusif	: Tindakan menghadirkan gereja yang menerima, melayani dan memberdayakan seluruh warga tanpa diskriminasi
<i>Profetis</i>	: Keadilan dan perdamaian
Primordialisme	: Pandangan atau perasaan yang memegang teguh ikatan sosial, nilai, Norma, dan tradisi yang dibawa sejak lahir
PW	: Persekutuan Wanita
PKB	: Persekutuan Kaum Bapa
POG	: Pegawai Organik Gereja
PTK	: Perguruan Tinggi Kristen
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PI	: Pekabaran Injil
Representasi wilayah	: Perwujudan atau pencitraan suatu kawasan geografis melalui kata, gambar, peta, hingga narasi perwujudan atau pencitraan suatu kawasan geografis melalui kata, gambar, peta, hingga narasi
Resisten	: Ketergantungan
<i>Responsiveness</i>	: Tanggap dan cekatan
SWJ	: Setoran Wajib Jemaat
SWOT	: <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats</i>
Syariah	: Sistem aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah
Teologi Budaya	: Studi yang mengkaji hubungan antara iman atau keyakinan agama dengan kebudayaan manusia
TP	: Tanah Papua
<i>Talent-Placement</i>	: Penempatan pelayanan organik berdasarkan bakat
Values	: Nilai-nilai
YPK	: Yayasan Pendidikan Kristen





Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kehendak Allah di tengah dunia melalui pelayanan persekutuan (*koinonia*), kesaksian (*marturia*), dan pelayanan kasih (*diakonia*). Dalam melaksanakan panggilan tersebut, gereja dituntut untuk memiliki arah, tujuan, dan strategi pelayanan yang jelas agar mampu menjawab kebutuhan jemaat serta tantangan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi kebutuhan penting sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh program pelayanan gereja secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua sebagai bagian dari tubuh Kristus yang melayani di tanah Papua menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang memengaruhi kehidupan bergereja maupun kehidupan masyarakat secara umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial budaya, tantangan ekonomi, arus globalisasi, digitalisasi, serta perubahan pola kehidupan masyarakat telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan iman dan partisipasi warga jemaat dalam pelayanan gereja. Di sisi lain, gereja juga dihadapkan pada berbagai persoalan internal, seperti kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayan, penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan gereja, serta peningkatan keterlibatan generasi muda dalam pelayanan.

Dalam konteks Papua, berbagai persoalan sosial seperti kesenjangan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan dan kesehatan, degradasi lingkungan hidup, serta perubahan nilai-nilai budaya lokal turut menjadi perhatian gereja dalam menjalankan panggilannya. Sebagai lembaga yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, GKI di Tanah Papua dituntut untuk tidak hanya berperan dalam pelayanan spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menuntut gereja untuk melakukan transformasi pelayanan yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar iman Kristen yang menjadi fondasi pelayanan gereja. Transformasi digital dalam pelayanan, penguatan kapasitas pelayan gereja, pengembangan sistem informasi gereja, dan peningkatan kualitas komunikasi pelayanan menjadi kebutuhan strategis yang harus direncanakan secara matang.





Sebagai gereja yang bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Papua yang majemuk, GKI di Tanah Papua juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, membangun kehidupan yang harmonis, memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan Injil, serta menjadi agen transformasi sosial yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Untuk mewujudkan peran tersebut diperlukan perencanaan strategis yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan gereja ke dalam program-program pelayanan yang terukur, realistis, dan berdampak nyata bagi jemaat dan masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) GKI di Tanah Papua tahun 2027-2031 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pelayanan gereja untuk periode yang akan datang. RENSTRA ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur pelayanan gereja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terpadu, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui RENSTRA ini diharapkan seluruh program dan kegiatan pelayanan gereja dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan visi GKI di Tanah Papua sebagai gereja yang bertumbuh, mandiri, kontekstual, dan menjadi berkat bagi jemaat, masyarakat, bangsa, dan dunia demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.

1.2 Dasar Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Tahun 2027–2031 didasarkan pada berbagai landasan normatif, organisatoris, dan kontekstual sebagai berikut: *Pertama*, **Dasar Teologis** Dasar ini terdiri atas: a) Alkitab sebagai dasar iman dan pelayanan gereja; b) Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 28:19–20; dan c) Panggilan gereja untuk melaksanakan tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. *Kedua*, **Dasar Organisatoris**. Dasar ini terdiri atas: a) Tata Gereja GKI DI Tanah Papua, Renstra GKI dan Pendoman Pelayanan GKI di Tanah Papua; b) Keputusan Sidang Sinode ke XVIII Di Klasis Waropen GKI di Tanah Papua tanggal 18-24 Juli 2022; c) Peraturan -peraturan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua; d) Program kerja dan evaluasi pelayanan periode pelayanan 2022-2027; dan e) Hasil konsultasi dan masukan dari jemaat, klasis, dan badan pelayan. *Ketiga*, **Dasar Kontekstual**. Dasar ini terdiri atas: a) Perubahan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan teknologi di Tanah Papua; b) Perkembangan kebutuhan pelayanan jemaat; c) Tantangan pelayanan gereja di era digital; d) Kondisi kehidupan masyarakat Papua; dan e) Hasil analisis lingkungan strategis dan SWOT pelayanan gereja.

1.3 Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Tahun 2027–2032 secara umum bertujuan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pelayanan gereja secara terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan bagi seluruh aras pelayanan jemaat, klasis, dan sinode. Secara khusus tujuan penyusunan Renstra untuk: (1) Menetapkan arah, tujuan, sasaran strategis dan prioritas pelayanan gereja selama periode 2027–2032; (2) Menyatukan arah dan prioritas pelayanan pada aras Jemaat, Klasis dan Sinode; (3) Menjadi dasar penyusunan program kerja dan penganggaran tahunan (4). Menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi pelayanan antar-aras (5) Menjadi dasar monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan (6) Menjadi instrumen pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis; (7) Menjamin kesinambungan perencanaan pelayanan menuju visi jangka panjang GKI.



1.4 Metode Penyusunan Renstra

Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan Renstra Sinode GKI di Tanah Papua dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Evaluasi pelaksanaan program pelayanan periode 2023-2027; (2) Pengumpulan data dan informasi pelayanan; (3) Identifikasi isu-isu strategis pelayanan gereja; (4) Analisis lingkungan internal dan eksternal; (5) Konsultasi dengan unsur jemaat, klasis, dan sinode; (7) Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas; dan (8) Penyusunan indikator kinerja dan rencana implementasi pelayanan.

1.5 Ruang Lingkup Renstra

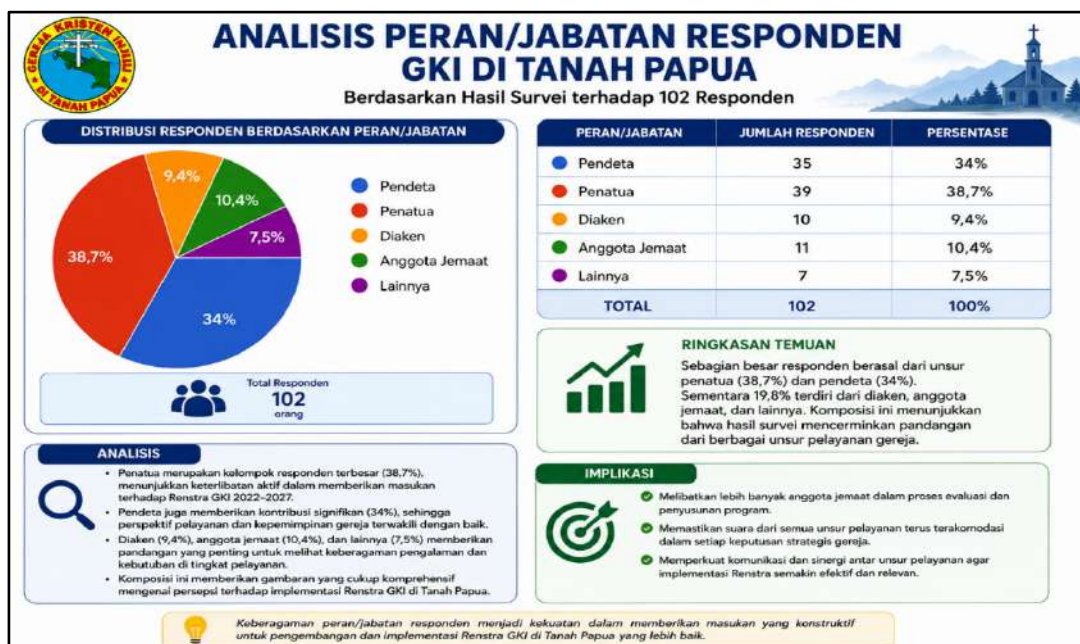
Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Rencana Strategis Sinode GKI di Tanah Papua 2027–2032 terdiri atas: (1) Pendahuluan, (2) Kondisi Eksisting GKI TP (3) Visi, Misi, Asas, Tema, dan Nilai, (4) Masalah, Isu Strategis, dan Analisis SWOT (5) Arah Pelayanan Gereja, Strategis, dan Program Prioritas, (6) Target, Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan, (7) Tahun Gereja dan Tema Tahun Pelayanan, (8) Struktur Program dan Anggaran (9) Rencana Pembangunan Pelayanan (Lima Tahun, Dua Puluh Tahun, dan Seratus Tahun), (10) Monitoring dan Evaluasi, dan (11) Penutup (Rekomendasi).

1.6 Evaluasi Dokumen Renstra GKI 2021-2027

Berdasarkan hasil analisis terhadap terhadap 102 responden dari 12 wilayah di GKI Tanah Papua yang merupakan ketewakilan Jemaat dan Klasis, yang melibatkan responden dari berbagai posisi pelayanan seperti Pendeta, Penatua, syamas, dan anggota jemaat, diperoleh hasil sebagai berikut.

1.6.1 Deskripsi Responden

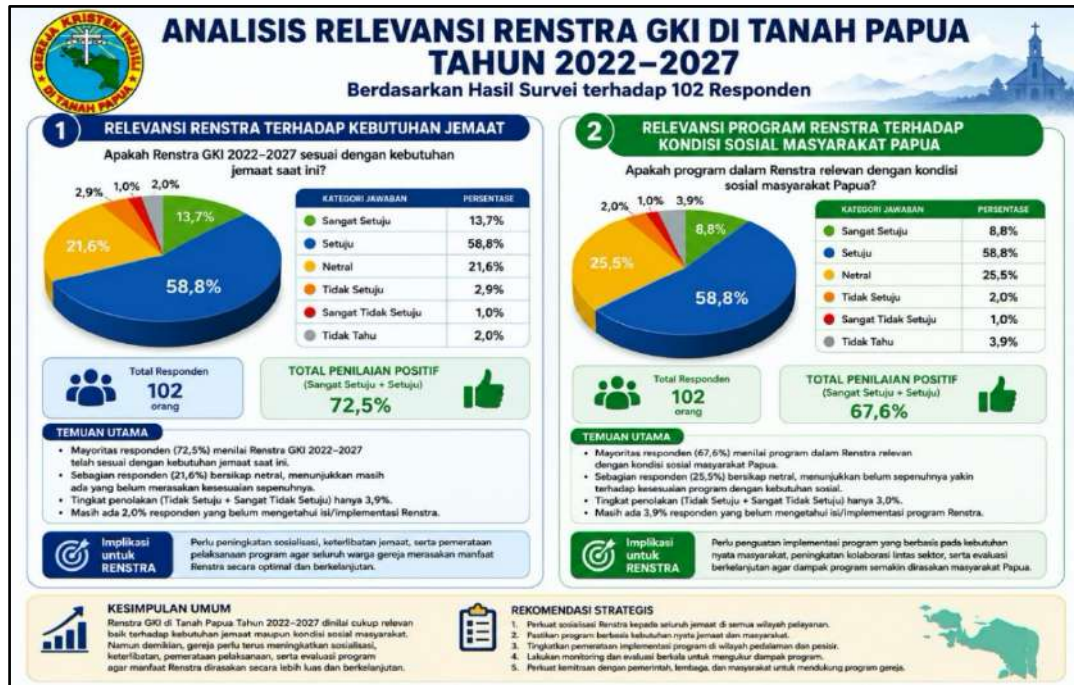
Hasil deskripsi responden berdasarkan tugas dan pelayana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1.1 Data Responden dalam Berbagai Peran/Jabatan
Sumber : Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

1.6.2 Tanggapan Responden Terhadap Relevansi Renstra GKI

Untuk mengetahui tanggapan respon tentan Relevasinya Renstra GKI TP dari hasil analisis terhadap 102 Respon dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.2 Data Tanggapan Responden Terhadap Relevansi Renstra
Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

Berdasarkan hasil survei terhadap **102 responden**, secara umum **RENSTRA GKI di Tanah Papua Tahun 2022-2027** dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan jemaat serta kondisi sosial masyarakat Papua. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat penilaian positif yang diberikan responden pada dua aspek utama yang dievaluasi.

1) Relevansi RENSTRA terhadap Kebutuhan Jemaat

Sebanyak **72,5% responden** (13,7% sangat setuju dan 58,8% setuju) menyatakan bahwa RENSTRA GKI 2022-2027 telah sesuai dengan kebutuhan jemaat saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan, program pelayanan, pembinaan iman, pelayanan sosial, dan pengembangan organisasi gereja dianggap mampu menjawab kebutuhan warga jemaat. Namun demikian, masih terdapat **21,6% responden yang bersikap netral**, yang mengindikasikan bahwa sebagian jemaat belum sepenuhnya merasakan manfaat atau kesesuaian program RENSTRA di wilayah pelayanannya.

1.6.3 Relevansi Program RENSTRA dengan Kondisi Sosial Masyarakat Papua

Sebanyak **67,6% responden** (8,8% sangat setuju dan 58,8% setuju) menilai bahwa program-program dalam RENSTRA relevan dengan kondisi sosial masyarakat Papua. Hasil ini menunjukkan bahwa gereja dipandang telah berupaya merespons berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan spiritual masyarakat Papua. Meskipun demikian, masih terdapat **25,5% responden yang memberikan jawaban netral**, yang menunjukkan perlunya peningkatan implementasi program agar manfaatnya lebih dirasakan secara merata di seluruh wilayah pelayanan.

Secara keseluruhan Hasil survei menunjukkan bahwa **RENSTRA GKI di Tanah Papua Tahun 2022–2027 memiliki tingkat relevansi yang baik**, baik terhadap kebutuhan jemaat maupun terhadap kondisi sosial masyarakat Papua. Mayoritas responden memberikan penilaian positif, yang menandakan bahwa arah pelayanan gereja telah berada pada jalur yang sesuai dengan harapan jemaat dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, Sinode GKI di Tanah Papua masih perlu meningkatkan hal-hal sebagai berikut: (1) Sosialisasi RENSTRA kepada seluruh jemaat; (2) Keterlibatan warga jemaat dalam perencanaan dan evaluasi program; (3) Pemerataan implementasi program pelayanan di seluruh wilayah; (4) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap dampak program; (5) Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua secara lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, RENSTRA GKI di Tanah Papua diharapkan semakin kontekstual, partisipatif, dan mampu mewujudkan pelayanan yang menghadirkan **keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan** bagi jemaat dan masyarakat Papua.

1.6.4 Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Program Renstra

Berdasarkan hasil survei secara umum tingkat pemahaman warga jemaat terhadap RENSTRA GKI di Tanah Papua Tahun 2022–2027 berada pada kategori baik. Mayoritas responden menyatakan memahami visi dan misi RENSTRA serta mengetahui program-program strategis yang direncanakan gereja. Sebanyak 72,6% responden memberikan penilaian positif terhadap pemahaman visi dan misi RENSTRA, sementara 65,6% responden menyatakan mengetahui program-program yang terdapat dalam RENSTRA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3 Tanggapan Pemahaman Reponden terhadap Restra

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

Tingkat pemahaman jemaat terhadap **visi, misi, dan program-program RENSTRA GKI di Tanah Papua Tahun 2022–2027** berada pada kategori **cukup baik**.



Sebanyak **72,6% responden** menyatakan memahami visi dan misi RENSTRA, sedangkan **65,6% responden** menyatakan mengetahui program-program yang terdapat dalam RENSTRA. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat telah memahami arah strategis pelayanan gereja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas persekutuan (*koinonia*), kesaksian (*marturia*), dan pelayanan kasih (*diakonia*).

Dari perspektif manajemen strategis organisasi, pemahaman anggota terhadap visi, misi, dan program organisasi merupakan indikator penting keberhasilan komunikasi organisasi dan implementasi perencanaan strategis. Tingginya persentase responden yang memahami visi dan misi menunjukkan bahwa proses sosialisasi RENSTRA telah berjalan relatif efektif. Pemahaman yang baik terhadap arah organisasi akan meningkatkan partisipasi, komitmen, dan dukungan anggota terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Namun demikian, masih terdapat responden yang bersikap netral (**17,6% pada visi dan misi serta 21,6% pada program-program RENSTRA**) dan responden yang tidak mengetahui isi RENSTRA (**7,8% dan 10,8%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi dan pelibatan jemaat belum sepenuhnya merata. Dalam teori partisipasi organisasi, rendahnya pemahaman anggota dapat berdampak pada rendahnya keterlibatan dalam pelaksanaan program serta berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Secara teologis, pemahaman terhadap visi dan misi gereja merupakan bagian dari panggilan setiap orang percaya untuk memahami dan mengambil bagian dalam misi Allah (*Missio Dei*). Gereja tidak hanya dipahami sebagai organisasi, tetapi sebagai tubuh Kristus yang dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah di dunia (Efesus 4:11–16). Oleh karena itu, setiap warga jemaat perlu mengetahui arah pelayanan gereja agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus.

Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda tetapi bekerja menuju tujuan yang sama (1 Korintus 12:12–27). Dalam konteks ini, RENSTRA berfungsi sebagai pedoman bersama yang membantu seluruh unsur gereja memahami arah pelayanan yang hendak dicapai. Tingginya tingkat pemahaman jemaat terhadap visi dan misi menunjukkan adanya kesadaran bersama dalam mendukung pelayanan gereja. Sebaliknya, masih adanya jemaat yang belum memahami RENSTRA menjadi panggilan bagi gereja untuk terus melakukan pembinaan, pendidikan warga gereja, dan sosialisasi atau penjematan yang berkelanjutan.

Selain itu, Amsal 29:18 menyatakan, *“Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.”* Ayat ini menegaskan pentingnya arah, visi, dan perencanaan dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh sebab itu, RENSTRA bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen pelayanan yang membantu gereja menjalankan panggilannya secara terarah, bertanggung jawab, dan kontekstual di tengah masyarakat Papua.

Secara ilmiah, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pemahaman jemaat terhadap RENSTRA GKI di Tanah Papua berada pada kategori baik, yang mencerminkan efektivitas sosialisasi dan komunikasi organisasi gereja. Secara teologis, pemahaman terhadap visi, misi, dan program gereja merupakan wujud partisipasi warga jemaat dalam menjalankan misi Allah melalui kehidupan bergereja. Namun demikian, gereja perlu terus meningkatkan pendidikan jemaat, sosialisasi RENSTRA, dan keterlibatan warga gereja agar seluruh jemaat memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pelayanan gereja dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan visi Kerajaan Allah di Tanah Papua.



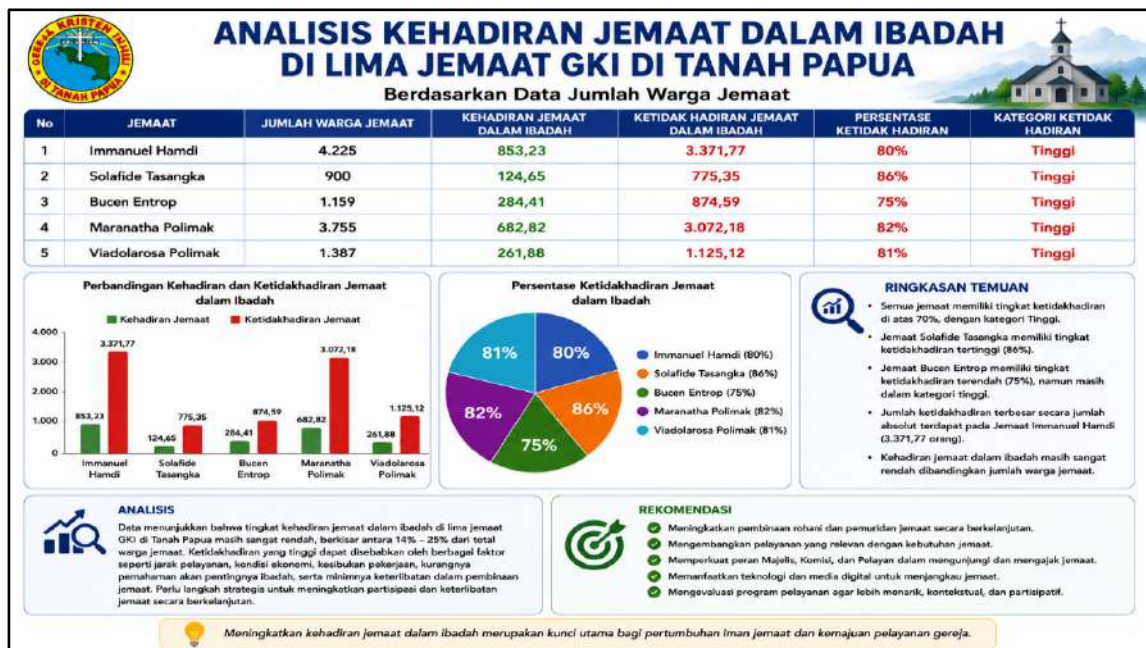
1.6.5 Hasil Analisis Ketidakhadiran Warga Jemaat dalam ibadah Hari Minggu

Kehadiran warga jemaat dalam ibadah hari Minggu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi dan kehidupan spiritual jemaat. Ibadah bukan hanya menjadi sarana persekutuan antara umat dengan Tuhan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan iman, penguatan persekutuan, serta pengembangan tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu, tingkat kehadiran jemaat dalam ibadah minggu dapat mencerminkan kondisi spiritual, sosial, dan keterikatan jemaat terhadap gereja.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa jemaat GKI di Tanah Papua, ditemukan bahwa tingkat ketidakhadiran warga jemaat dalam ibadah hari Minggu masih tergolong tinggi. Persentase ketidakhadiran berada pada kisaran 75%–86% dari jumlah warga jemaat yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota jemaat belum berpartisipasi secara aktif dalam persekutuan ibadah minggu. Tingginya angka ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi pertumbuhan iman, kualitas persekutuan, serta efektivitas pelayanan gereja secara keseluruhan.

Secara teologis, persekutuan ibadah merupakan bagian dari panggilan hidup orang percaya. Dalam Ibrani 10:25 ditegaskan, *"Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati."* Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran dalam ibadah merupakan wujud ketaatan dan komitmen umat kepada Allah serta bentuk tanggung jawab dalam membangun kehidupan persekutuan yang sehat.

Tingginya tingkat ketidakhadiran jemaat tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan spiritual semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan organisasi pelayanan gereja. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami penyebab utama ketidakhadiran jemaat sehingga gereja dapat merumuskan strategi pelayanan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi warga jemaat.



Gambar 1.4 Ketidakhadiran Warga Jemaat pada Ibadah Hari Minggu
Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

Berdasarkan data lima jemaat GKI di Tanah Papua, yaitu Jemaat Immanuel Hamadi, Solafide Tasangka, Bucen Entrop, Maranatha Polimak, dan Viadolorosa Polimak, diketahui bahwa tingkat kehadiran jemaat dalam ibadah masih tergolong



rendah. Persentase ketidakhadiran jemaat berada pada rentang **75% hingga 86%**, sehingga seluruh jemaat masuk dalam kategori tinggi untuk tingkat ketidakhadiran.

Rendahnya tingkat kehadiran tidak hanya terjadi pada jemaat dengan jumlah anggota kecil, tetapi juga pada jemaat yang memiliki jumlah warga jemaat yang besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan warga jemaat dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam ibadah Minggu, masih menjadi salah satu tantangan strategis pelayanan GKI di Tanah Papua. Tingkat ketidakhadiran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan rendahnya kesadaran warga jemaat, tetapi merupakan fenomena yang berkaitan dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat, antara lain tuntutan pekerjaan dan mobilitas, jarak geografis, kondisi sosial-ekonomi, perubahan pola hidup dan pola relasi sosial, karakteristik generasi muda, serta relevansi dan kualitas pembinaan dan pelayanan gereja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun pola pelayanan yang lebih adaptif, kontekstual, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan serta pertumbuhan warga jemaat.

Dalam perspektif strategis, GKI di Tanah Papua perlu melakukan transformasi pembinaan jemaat dari pendekatan yang berorientasi pada pelaksanaan kegiatan menuju pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan iman, kedewasaan spiritual dan keterlibatan warga jemaat. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pemuridan, pelayanan pastoral yang proaktif, pengembangan kelompok-kelompok persekutuan berbasis keluarga dan komunitas, penguatan pelayanan anak dan pemuda, pemanfaatan teknologi dan media digital, serta pengembangan bentuk dan pola ibadah yang kontekstual dengan karakteristik wilayah dan dinamika kehidupan warga jemaat. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kehadiran dalam ibadah Minggu, tetapi juga berdasarkan peningkatan keterlibatan, kedewasaan iman, kualitas persekutuan, partisipasi dalam pelayanan dan kontribusi warga jemaat dalam kehidupan masyarakat.





Kondisi Eksisting

Sinode GKI di Tanah Papua

2.1 Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan Kondisi Eksisting Sinode GKI Di Tanah Papua yang mencakup sejarah singkat, tugas dan panggilan, sumber daya, jangkauan pelayanan, dan capaian Renstra 2022-2027. Untuk itu, bagian ini dapat menjadi pijakan awal dalam memahami kondisi eksisting dan kondisi ideal Sinode GKI di Tanah Papua di masa depan.

2.2 Kilas Balik Arah Pelayanan GKI di Tanah Papua

Secara historis kehadiran GKI Di Tanah Papua tidak terlepas dari sejarah pekabaran Injil yang dimulai oleh Carl Wilhelm Ottow dan Johan Gottlob Geissler yang tiba di Mansinam pada, tanggal 5 Februari 1855. Melalui doa sulung “Dengan nama Allah kami menginjak kaki di Tanah ini” menjadi awal pengakuan iman bahwa karya penginjilan di Tanah Papua berlangsung dan beralaskan kuasa Allah. Dalam buku hariannya Geisler menulis kepada Gossner demikian *Anda tidak dapat membayangkan betapa besarnya rasa sukacita kami pada saat akhirnya dapat melihat tanah tujuan kami, Minggu pagi zending sauh dibuang untuk berlabuh di teluk Dorer. Matahari terbit dengan indahnya, ya semoga matahari yang sebenarnya, yaitu Rahmat Tuhan yang menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat Gembala-Nya yang lembut.*

Sejak saat itu, oleh karya dan penyertaan Roh Kudus, pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh para pekabar Injil, baik yang datang dari luar negeri maupun para pelayan Injil dari dalam negeri serta penginjil dari Tanah Papua, menghasilkan pertumbuhan iman yang nyata di tengah masyarakat Papua. Buah pertama dari karya keselamatan Allah tersebut ditandai dengan pelaksanaan baptisan kudus kepada **Sara dan Margaretha pada 1 Januari 1865**. Peristiwa ini dikenang sebagai tonggak lahirnya Gereja Tuhan di Tanah Papua, karena melalui baptisan tersebut mulai terbentuk persekutuan orang percaya yang kemudian berkembang menjadi jemaat-jemaat di berbagai kampung dan wilayah pelayanan di seluruh Tanah Papua.





Setelah kehadiran Ottow dan Geissler dan yang kemudian diambil alih dan dikembangkan oleh Badan Zending *Uttechte Zendelings Vereniging (UZV)* sekalian sampai dengan pembentukan gereja mandiri di tahun 1956. Jadi periode 1855-1956 menjadi masa awal sejarah GKI Di Tanah Papua.

Pada tahun 1956-1962 merupakan periode pertama GKI di Nederland Nieuw Guinea yang ditinjau dari interaksi GKI melaksanakan tugas panggilannya dengan Papua sebagai konteks kesaksian dan pelayanannya.

Injil Kerajaan Allah terus bertumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi dasar bagi pelayanan gereja yang menghadirkan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan yang membawa pembaruan bagi gereja, masyarakat, dan seluruh ciptaan.

Secara ringkas arah perkembangan pelayanan GKI sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Arah Perkembangan Pelayanan GKI di Tanah Papua

Periode	Situasi Gereja	Arah Pelayanan
1855–1870	Masa Perintisan dan Peletakan Dasar Injil	Kedatangan Ottow dan Geissler di Mansinam (5 Februari 1855); pengenalan Injil kepada masyarakat Papua; pelayanan di tengah keterbatasan bahasa, budaya, dan geografis; baptisan pertama kepada Sara dan Margaretha (1 Januari 1865).
1870–1907	Masa Pertumbuhan dan Pengembangan Jemaat	Injil mulai diterima di berbagai wilayah Papua; lahirnya jemaat-jemaat baru; berkembangnya sekolah-sekolah zending; muncul guru-guru Injil orang Papua.
1907–1942	Masa Kebangunan dan Konsolidasi Gereja	Pertumbuhan gereja yang pesat; kebangunan rohani; berkembangnya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; muncul pemimpin-pemimpin gereja orang Papua.
1942–1956	Masa Pendewasaan dan Kemandirian Gereja	Dampak Perang Dunia II dan perubahan politik; meningkatnya peran orang Papua dalam kepemimpinan gereja; lahirnya GKI di Tanah Papua pada 26 Oktober 1956.
1956–1998	Masa Penguatan Identitas dan Pengabdian Gereja	GKI berkembang menjadi gereja mandiri; pembentukan klasis dan jemaat baru; peningkatan peran gereja dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat.
1998–2026	Masa Transformasi dan Kesaksian Gereja	Era reformasi, otonomi khusus Papua, globalisasi, perubahan sosial, isu keadilan, lingkungan hidup, dan tantangan generasi muda.
2027–2032	Gereja yang Misioner dan Transformatif	Menghadapi bonus demografi, perubahan iklim, revolusi digital, dan tantangan sosial-ekonomi Papua.

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

2.3 Tugas dan Panggilan GKI Di Tanah Papua

Tugas Sinode GKI di Tanah Papua adalah melaksanakan amanat *Trias Muneris* 'Tri Panggilan Gereja', yang terdiri atas: (1) *Koinonia* 'bersekutu': Membangun persekutuan yang erat antar jemaat dalam kasih; (2) *Marturia* 'bersaksi': Memberitakan Injil dan menjadi terang di tengah dunia; dan (3) *Diakonia* 'melayani': Mewujudkan kasih Kristus melalui pelayanan kepada sesama, terutama yang lemah dan menderita. Sedangkan panggilan Sinode GKI di Tanah Papua adalah mandat atau tugas suci yang diberikan oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih-Nya di dunia melalui amanat *Trias Muneris* 'Tri Panggilan Gereja'.

Untuk menegaskan tugas dan panggilan GKI di Tanah Papua di tengah perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat dan kompleks, serta agar tetap mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pelayanan yang terus berkembang, maka Sinode GKI di Tanah Papua sebagai lembaga gerejawi perlu mempertimbangkan hal-hal





prinsip sebagai berikut: *Pertama*, untuk mewujudkan Visi Teologi, yaitu “Kerajaan Allah”, serta Visi Tahun 2036 sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Nomor: VI/TAP/SS-XVI/GKI/2011 di Sentani tentang Visi, Misi, dan Rencana Strategis GKI di Tanah Papua menuju tahun 2036, yaitu: “**Menjadi Gereja Pembawa Keadilan, Kedamaian, dan Kesejahteraan.**” GKI di Tanah Papua dituntut untuk terus mencermati, memahami, dan merespons secara arif berbagai dinamika, perubahan, dan tantangan yang berkembang di tingkat lokal, nasional, maupun global. *Kedua*, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menginternalisasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai dasar gereja yang bersumber dari Firman Tuhan dan ajaran GKI, sehingga menjadi pedoman bersama dalam membangun kesatuan langkah, memperkuat komitmen pelayanan, dan menuntun seluruh warga gereja dalam arak-arakan iman menuju masa depan yang dikehendaki Allah. *Ketiga*, Rumah Besar GKI di Tanah Papua memiliki peluang dan kesempatan untuk terus bertumbuh, bertransformasi, adaptif, kontekstual, dan transformatif agar tetap relevan dalam menjalankan panggilannya sebagai saksi Kerajaan Allah di tengah-tengah dinamika perubahan yang berlangsung secara cepat di tingkat lokal, nasional, dan global, seperti transformasi digital, perubahan sosial dan budaya, krisis ekologis, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian perjalanan Sinode GKI di Tanah Papua lima tahun ke depan, maka diperlukan 8 (delapan) paradigma baru dalam mendukung tugas dan panggilan GKI di Tanah Papua, yakni: (1) **Penguatan spiritualitas dan ketahanan iman**, yang mampu menjawab tantangan kehidupan di era digital dan masyarakat 5.0, sekaligus memperkuat kehadiran gereja di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) melalui pelayanan yang inklusif, kontekstual, dan misioner; (2) **Penguatan kapasitas dan kapabilitas warga jemaat di bidang literasi digital dan teknologi informasi**, sehingga warga gereja mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, produktif, dan bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesaksian gereja di ruang digital; (3) **Penguatan teologi keutuhan ciptaan melalui pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**, dengan mengembangkan kesadaran ekologis, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mendorong praktik-praktik pembangunan yang berkeadilan dan ramah lingkungan; (4) **Menghadirkan keberpihakan yang nyata dan pelayanan yang inklusif kepada kelompok rentan**, termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat adat, serta para korban bencana dan krisis kemanusiaan, sebagai wujud kasih dan keadilan Allah; (5) **Mendorong pemberdayaan dan pengutusan warga jemaat sebagai murid dan saksi Kristus di tengah dunia**, sehingga setiap anggota jemaat diperlengkapi untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam keluarga, dunia pendidikan, pemerintahan, ekonomi, lingkungan kerja, ruang digital, serta berbagai medan pelayanan di luar gedung gereja; (6) **Penguatan keluarga, generasi dan Sumberdaya Manusia Kristen**, sehingga menghasilkan warga jemaat yang beriman, berakarakter, sehat, berpengetahuan, dan siap menjadi pelayan serta pemimpin gereja dan masyarakat; (7) **Menghadirkan kemandirian, keadilan dan kesejahteraan, untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah** melalui pelayanan yang berpihak kepada keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Melalui pemberdayaan ekonomi jemaat dan kewirausahaan, pelayanan kepada kelompok rentan dan masyarakat adat, serta memberikan penguatan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi. Dan mendukung kemitraan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Peningkatan peran gereja dalam pembangunan dan transformasi sosial; dan (8) **Penguatan Tata Kelola Gereja, Misi Kontekstual, dan Keutuhan Ciptaan** untuk mewujudkan GKI di Tanah Papua yang misioner, adaptif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap



keutuhan ciptaan. Kedelapan paradigma baru Sinode GKI di Tanah Papua tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Visualisasi Delapan Paradigma Baru

2.4 Sumber Daya GKI Di Tanah Papua

GKI Sebagai gereja tertua di Tanah Papua memiliki modal historis, spiritual, sosial, dan kelembagaan yang sangat besar. Warisan pekabaran Injil sejak 5 Februari 1855 dan pertumbuhan gereja selama lebih dari satu setengah abad menjadikan GKI bukan hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sejarah, identitas, dan pembangunan masyarakat Papua. Oleh karena itu, sumber daya historis ini perlu terus ditransformasikan menjadi kekuatan misioner, profetis, dan transformatif dalam menjawab tantangan zaman dan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di Tanah Papua.

2.4.1 Sumber Daya Spiritual dan Teologis

Masuknya Injil di Pulau Mansinam pada tanggal **5 Februari 1855** melalui pelayanan Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Papua. F.C. Kamma (1981) menyebut bahwa pekabaran Injil di Papua tidak dapat dipisahkan dari proses lahirnya masyarakat Papua modern. Injil



menjadi kekuatan yang mendorong lahirnya sekolah, pelayanan kesehatan, pengembangan bahasa, dan pembentukan kepemimpinan lokal.

Nilai-nilai Injil dan spiritualitas GKI dibangun atas dasar koinonia, marturia, diakonia, eskatologi, dan ketahanan iman. GKI juga memiliki kearifan lokal yang telah diintegrasikan dalam pelayanan gereja melalui bahasa daerah yang dinyatakan dalam doa, nyanyian, liturgi, dan pembacaan alkitab.

2.4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal utama GKI di Tanah Papua dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja. SDM GKI mencakup seluruh pelayan Pendeta Organik, Pendeta Emeritus; Guru Jemaat; Guru Injil; Penatua, Syamas; Pelayan intra (Pemuda, Perempuan, PAR, PAM) serta warga jemaat yang memiliki berbagai profesi dan keahlian.

Sebagai gereja tertua di Tanah Papua, GKI memiliki jaringan SDM yang tersebar mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Jaringan pelayanan ini menjadi modal sosial dan spiritual yang sangat besar bagi pembangunan gereja dan masyarakat Papua. GKI memiliki banyak pelayan gereja yang melayani pada tingkat Sinode, Klasis, dan Jemaat. Hal ini mendukung pelayanan menjangkau wilayah pedalaman berkontribusi terhadap pembinaan iman yang berkelanjutan serta mendukung pelayanan sosial dan kemanusiaan.

Banyak pelayan GKI mengabdikan diri di daerah yang sulit dijangkau dengan keterbatasan sarana dan prasarana tetapi memiliki semangat untuk membangun spiritualitas pelayanan yang kuat, semangat pengorbanan dan panggilan misioner yang tinggi.

Tabel 2.2 Sumberdaya Manusia Pelayan dan Administrasi GKI

No	Jenis Pelayan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pendeta (POG)Aktif	1.170	71,73
2	Guru Jemaat	172	10,54
3	Guru Injil	62	3,80
4	Dosen	26	1,59
5	Administrasi	201	12,32
	Jumlah	1.631	

Sumber : Sinode GKI TP (data per bulan mei 2026)

Berdasarkan komposisi sumber daya manusia pelayanan, GKI di Tanah Papua memiliki 1.631 pelayan yang terdiri atas 1.170 Pendeta (POG) Aktif, 172 Guru Jemaat, 62 Guru Injil, 26 Dosen dan 201 tenaga Administrasi. Pendeta (POG) Aktif merupakan kelompok terbesar dengan proporsi 71,73%, diikuti tenaga Administrasi sebesar 12,32%, Guru Jemaat 10,54%, Guru Injil 3,80% dan Dosen 1,59%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan GKI masih sangat bertumpu pada tenaga kependetaan. Kondisi ini merupakan kekuatan strategis dalam pelaksanaan fungsi pastoral, pemberitaan firman dan pembinaan jemaat, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya diversifikasi sumber daya manusia untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pelayanan gereja dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang.

Guru Jemaat dan Guru Injil sebagai tenaga pelayanan non-pendeta memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan pembinaan, penginjilan, pelayanan komunitas dan pendampingan warga jemaat, namun proporsinya masih relatif terbatas, masing-masing sebesar 10,54% dan 3,80%. Di sisi lain, tenaga Dosen yang hanya sebesar





1,59% perlu dipandang sebagai modal intelektual gereja yang dapat dikembangkan untuk mendukung penelitian, pendidikan, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Tenaga Administrasi sebesar 12,32% juga perlu diperkuat kompetensinya agar mampu mendukung tata kelola gereja yang profesional, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan strategis SDM GKI tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah pelayan, tetapi juga menyangkut komposisi, kompetensi, distribusi, kaderisasi, regenerasi, profesionalisasi dan pemanfaatan SDM sesuai kebutuhan pelayanan. Oleh karena itu, RENSTRA GKI 2027–2032 perlu mengarahkan pengembangan SDM menuju sistem pelayanan yang lebih kolaboratif dan terdiversifikasi, dengan memperkuat sinergi antara Pendeta, Guru Jemaat, Guru Injil, tenaga akademik dan tenaga profesional/administratif. Pengembangan SDM juga perlu didukung oleh sistem database, perencanaan kebutuhan tenaga, pengembangan kompetensi, kaderisasi, evaluasi kinerja dan perencanaan suksesi yang terintegrasi.

SDM Kantor Sinode

Sumberdaya manusia yang bekerja dan melayani administrasi dan tata kelola di kantor sinode sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. SDM Kantor Sinode

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Pendeta	30	14	44
Administrasi	34	18	52
Jumlah	64	32	96

Kondisi SDM Kantor Sinode GKI di Tanah Papua menunjukkan bahwa terdapat 96 orang tenaga yang terdiri atas 44 pendeta atau 45,8% dan 52 tenaga administrasi atau 54,2%. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 64 laki-laki atau 66,7% dan 32 perempuan atau 33,3%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Kantor Sinode memiliki perpaduan antara sumber daya teologis dan sumber daya administratif sebagai modal penting dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi dan pelayanan gereja.

Dari sisi fungsi, proporsi tenaga administrasi sedikit lebih besar dibandingkan pendeta, dengan rasio sekitar 1 pendeta berbanding 1,18 tenaga administrasi. Kondisi tersebut memberikan dasar yang cukup bagi penguatan fungsi manajemen dan administrasi Sinode. Namun demikian, kecukupan jumlah SDM perlu diikuti dengan kesesuaian kompetensi, pembagian tugas dan kewenangan, sistem pengembangan karier, evaluasi kinerja serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola gereja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Komposisi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi SDM Kantor Sinode dengan proporsi 66,7%, sedangkan perempuan sebesar 33,3%. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam distribusi jabatan dan tingkat pengambilan keputusan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang proporsional bagi perempuan dalam pengembangan karier dan kepemimpinan gereja

Tantangan utama SDM Kantor Sinode bukan semata-mata peningkatan jumlah tenaga, tetapi transformasi menuju organisasi yang berbasis kompetensi, kinerja, data, teknologi dan profesionalisme. Kantor Sinode perlu diperkuat sebagai pusat koordinasi,





perumusan kebijakan, pengembangan kapasitas, integrasi data, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelayanan pada seluruh aras GKI di Tanah Papua.

SDM Pelayan Berdasarkan Wilayah Pelayanan GKI

GKI Di Tanah Papua memiliki 12 wilayah pelayanan yang tersebar pada 6 Provinsi se Tanah Papua. Setiap wilayah pelayanan memiliki kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang spesifik. Karena itu memahami setiap wilayah menjadi bagian penting dalam membangun sistem perencanaan gereja yang baik.

Tabel 2.4. SDM GKI yang tersebar di 12 Wilayah Pelayanan

Wilayah	Pendeta	Guru Jemaat	Guru Injil	Adm.	Total
I	250	19	2	25	296
II	71	5	6	4	86
III	134	19	1	18	172
IV	90	18	4	19	131
V	53	5	2	7	67
VI	91	37	3	19	150
VII	188	31	3	10	232
VIII	83	5	0	7	95
IX	36	2	0	2	40
X	35	10	43	2	90
XI	72	5	1	12	90
XII	76	23	10	15	124
Jumlah	1.179	179	75	140	1.573

Sumber : Sinode GKI, 2026

Distribusi pelayan (pendeta) mencapai sekitar 75% dari seluruh SDM pelayanan berdasarkan total tabel diatas. Ini menunjukkan bahwa model pelayanan GKI masih kuat bertumpu pada kepemimpinan pendeta. Kondisi ini perlu diarahkan menuju model pelayanan kolaboratif, di mana pendeta, Guru Jemaat, Guru Injil, Majelis, tenaga administrasi dan kader jemaat memiliki fungsi yang lebih jelas dan saling melengkapi.

Wilayah I, VII dan III merupakan wilayah dengan konsentrasi SDM terbesar. Wilayah I memiliki 296 personel, Wilayah VII 232 personil, dan Wilayah III 172 personil. Ketiga wilayah secara bersama-sama menampung sekitar 44,5% dari seluruh SDM. Sebaliknya, Wilayah IX hanya memiliki 40 personel, Wilayah V terdapat 67 personil dan Wilayah II sebanyak 86. Personil. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah SDM belum terdistribusi secara proporsional antarwilayah. Namun, ketimpangan ini belum dapat langsung disebut sebagai kekurangan karena idealnya harus dibandingkan dengan jumlah jemaat, warga jemaat, luas wilayah, jumlah Pos PI/Jemaat Persiapan, tingkat aksesibilitas dan beban pelayanan setiap wilayah.

Variasi yang cukup besar dalam pengembangan Guru Jemaat. Wilayah VI memiliki 37 Guru Jemaat, wilayah VII sebanyak 31 orang, wilayah XII sebanyak 23 orang, sedangkan IX hanya 2 orang dan II, V serta VIII masing-masing 5 orang. Hal ini memberikan indikasi bahwa beberapa wilayah telah mengembangkan pelayanan berbasis pelayan lokal, sementara wilayah lain masih sangat bergantung pada pendeta.





Penguatan Guru Jemaat merupakan salah satu strategi untuk menjawab keterbatasan tenaga pendeta, terutama pada wilayah dengan sebaran jemaat yang luas dan akses geografis yang sulit.

Guru Injil merupakan komponen SDM yang paling terbatas dan tidak merata. Sebagian besar wilayah hanya memiliki 0–6 Guru Injil. Bahkan Wilayah VIII dan IX tercatat tidak memiliki Guru Injil. Kondisi ini penting karena Guru Injil memiliki posisi strategis dalam pengembangan misi, penginjilan, Pos PI, Jemaat Persiapan, pelayanan komunitas dan perluasan basis pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan Guru Injil sebaiknya tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah jemaat yang sudah ada, tetapi juga berdasarkan potensi ekspansi pelayanan dan kebutuhan misi.

Kebutuhan SDM berbasis beban pelayanan tidak sekadar melihat jumlah pendeta. Namun perlu ditekankan cara berpikir teologis, strategis, dan kontekstual, serta program perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Jika dilihat berdasarkan jumlah jiwa maka ada dua wilayah yang sangat berbeda yaitu Wilayah IX hanya mempunyai sekitar 209 jiwa per pendeta. Secara jumlah penduduk, pendeta relatif sangat banyak. Sebaliknya, Wilayah X mempunyai sekitar 1.190 jiwa per pendeta, hampir 6 kali beban Wilayah IX. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendeta belum proporsional terhadap jumlah warga jemaat. Tetapi di sinilah kita tidak boleh langsung mengatakan Wilayah IX "kelebihan pendeta" dan Wilayah X "kekurangan pendeta", karena faktor geografis sangat berbeda.

Tabel 2.5. Jumlah Pendeta per Jiwa yang dilayani pada setiap Wilayah Pelayanan

Wilayah	Jiwa	Pendeta	Jiwa/Pendeta	Interpretasi
I	156.802	250	627	Rendah
II	27.404	71	386	Sangat rendah
III	126.035	134	941	Tinggi
IV	81.254	90	903	Tinggi
V	34.596	53	653	Sedang
VI	62.215	91	684	Sedang
VII	138.390	188	736	Sedang
VIII	56.999	83	687	Sedang
IX	7.516	36	209	Sangat rendah
X	41.643	35	1.190	Sangat tinggi
XI	46.007	72	639	Rendah
XII	52.374	76	689	Sedang

Sumber : Sinode GKI dan analisis Tim Renstra

Jumlah kk yang dilayani merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai ketercukupan SDM pelayan dalam GKI Di Tanah Papua. Jumlah kk terendah sebanyak 2.187 di wilayah IX dan jumlah terbanyak 33.647 KK, dengan rata-rata 16.851 kk per wilayah pelayanan.

Tabel 2.6. Jumlah Kepala Keluarga yang dilayani per Pendeta

Wilayah	Jumlah KK	Pendeta	KK/Pendeta
I	38.023	250	152
II	6.528	71	92
III	29.572	134	221





IV	19.078	90	212
V	7.945	53	150
VI	16.024	91	176
VII	33.647	188	179
VIII	13.544	83	163
IX	2.187	36	61
X	12.160	35	347
XI	11.353	72	158
XII	12.146	76	160

Sumber : Sinode GKI dan analisis Tim Renstra

Sebaran SDM berdasarkan luas wilayah pelayanan ikut memberikan pengaruh terhadap tugas panggilan GKI. Wilayah VIII (552 Km²/SDM) dan wilayah II (440 Km²/SDM) memiliki beban geografis ekstrim dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 2.7. SDM berdasarkan Luas Wilayah Pelayanan

Wilayah	*Luas km ²	Total SDM (Jiwa)	Km ² /SDM
I	27.832	296	94
II	37.833	86	440
III	25.584	172	149
IV	13.277	131	101
V	17.112	67	255
VI	3.162	150	21
VII	40.579	232	175
VIII	52.412	95	552
IX	7.036	40	175
X	26.790	90	298
XI	8.034	90	89
XII	27.612	124	223

Sumber : Sinode GKI dan analisis Tim Renstra

*Angka prediksi

Terdapat empat tipologi wilayah pelayanan GKI yang dapat disintesa berdasarkan jumlah sumberdaya manusia, jumlah jemaat, jumlah kepala keluarga, dan luas wilayah pelayanan.

Tipolog I : Pelayanan Penggembalaan Intensif dan Terorganisasi

Tipologi ini dapat dikembagkan di wilayah I, III, IV dan VII karena memiliki karakteristik jumlah warga jemaat besar, jumlah KK besar, basis pelayanan relatif padat, akses geografis relatif mudah, interaksi antara pelayan dan jemaat relatif memungkinkan. Tipologi ini menempatkan kebutuhan pelayanan pada penguatan pastoral, pemuridan, pembinaan iman, pembagian fungsi pelayanan dan kaderisasi. Model ini sejalan dengan pola jemaat mula-mula di Yerusalem (Kis. 2:41–47) dan prinsip delegasi pelayanan dalam Kisah Para Rasul 6:1–7, di mana pertumbuhan jumlah umat direspons melalui penguatan sistem pelayanan dan pembagian peran, bukan melalui ketergantungan pada pelayan.





Tipologi II : Misioner Kontekstual dan Menjangkau

Tipologi ini dapat dikembangkan di wilayah II dan VIII karena memiliki karakteristik luas wilayah pelayanan yang cukup luas, jumlah jiwa banyak, ketersediaan SDM sedikit dan merencanakan pengembangan pelayanan Pos PI atau jemaat persiapan sebanyak 111 jemaat/pos PI. Tipologi ini memberikan arahan agar Gereja hadir di tengah komunitas, bukan hanya menunggu komunitas datang ke pusat pelayanan (Filipi 2:5–8). Bahkan menjadi dasar implementasi ajaran firman Tuhan bahwa ketika orang percaya tersebar, mereka justru memberitakan Injil di tempat-tempat yang mereka datang (Kisah 8 : 4). Dengan demikian pelayanan GKI harus bergerak mendekati manusia, bukan memaksa manusia mendekati pusat pelayanan.

Tipologi III : Pelayanan Misioner Ekspansif dan Multiplikatif

Tipologi ini dapat dikembangkan di wilayah X karena memiliki karakteristik wilayah pelayanan yang luas serta jaringan misi yang sangat luas yang ditunjukkan oleh rencana pembukaan 217 pos PI/ jemaat persiapan. Wilayah dengan jumlah warga jemaat relatif terbatas tetapi memiliki jaringan Pos PI dan Jemaat Persiapan yang luas memerlukan strategi pelayanan misioner yang ekspansif dan multiplikatif. Pos PI dipandang bukan semata-mata sebagai unit pelayanan, tetapi sebagai basis penginjilan, pembentukan komunitas iman dan kaderisasi kepemimpinan gerejawi. Karena itu, penguatan Guru Injil, pelayan lokal dan sistem pendampingan menjadi prioritas.”

Tipologi IV : Pelayanan Pemberdayaan dan Pengutusan

Tipologi ini relevan diterapkan pada Wilayah VI, IX, XI, dan XII, yang memiliki karakteristik berupa kapasitas sumber daya manusia yang relatif kuat serta kondisi geografis yang lebih mudah dijangkau dan dikelola. Dalam konteks wilayah tersebut, tantangan strategis pelayanan tidak terletak pada keterbatasan jumlah pelayan, melainkan pada optimalisasi kapasitas, produktivitas, dan dampak pelayanan dari sumber daya manusia yang telah tersedia. Dengan demikian, perhatian perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kolaborasi, pengembangan kepemimpinan, serta pemanfaatan potensi SDM secara lebih efektif untuk menjawab kebutuhan jemaat.

Dalam perspektif teologis, keberadaan pelayan bukanlah tujuan akhir dari pembangunan kapasitas gereja. Sebagaimana ditegaskan dalam Efesus 4:11–12, Kristus memberikan berbagai bentuk pelayanan untuk memperengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, SDM yang kuat harus memiliki kapasitas reproduktif, yaitu tidak hanya mampu melaksanakan pelayanan, tetapi juga memperengkapi, membina, dan melahirkan kader-kader baru yang memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan pada tipologi ini diukur bukan hanya dari seberapa banyak pelayan yang tersedia, tetapi dari seberapa besar kapasitas tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan, kemandirian, kaderisasi, dan dampak nyata bagi kehidupan jemaat dan masyarakat.

2.4.4. Kelembagaan Gereja

Sumber daya kelembagaan adalah seluruh sistem organisasi, tata kelola, struktur kepemimpinan, regulasi, jaringan, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan GKI di Tanah Papua melaksanakan tugas dan panggilannya secara teratur, efektif, dan berkelanjutan. Dalam GKI, gereja dipahami sebagai **persekutuan jemaat-jemaat yang**





diwujudkan dalam satu **Sinode** dan diselenggarakan melalui sistem **Presbiterial-Sinodal**, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama dan kolektif.

Tabel 2.8. Kelembagaan Gereja pada Aras Klasis dan Jemaat

Kategori	Jumlah
Wilayah	12
Klasik	70
Klasik Persiapan	13
Pos PI	39
Jemaat mandiri	1.762
Jemaat Persiapan	257
Jumlah Pos PI, Jemaat Mandiri dan Jemaat Persiapan	2.058

Dengan kondisi eksisting yang demikian secara struktural jangkauan pelayanan telah mencakup seluruh tanah Papua, meskipun masih ada wilayah pelayanan yang belum terjangkau. Dengan sistem presbiterial sinodal maka partisipasi secara spontan akan meningkat dan terus mendorong jemaat dan para pelayan untuk melaksanakan tata gereja secara baik dan konsisten.

Secara organisatoris struktur organisasi GKI di Tanah Papua terdiri dari Jemaat, Klasik dan Sinode. Jemaat merupakan persekutuan orang Kristen sebagai tubuh Kristus yang ada ditempat tertentu yang menempatkan diri dalam pertemuan, ibadah, dan sakramen secara teratur. Jemaat menjalankan misi mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kasih dan keadilan.

Klasik adalah persekutuan Jemaat-Jemaat GKI di Tanah Papua pada wilayah tertentu yang ditetapkan dalam Sidang Sinode. Klasik menjalankan tugas kepemimpinan, organisasi, pembinaan, pelayanan, pengembalaan kepada jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua pada lingkup klasik.

Sinode adalah Persekutuan dan kesatuan jemaat dan klasik yang dinampakkan dalam satu Sinode. Sinode dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode. Badan Pekerja Sinode ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Sidang dalam Sidang Sinode. Badan Pekerja Sinode terdiri dari :

- Pelaksana Harian Sinode (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara).
- Anggota Badan Pekerja Sinode Berjumlah 12 (dua belas) anggota
- Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan yang terdiri dari :
 - A. Sekretariat Sinode yang meliputi :
 - a. Biro Tata Usaha
 - b. Biro Kepegawaian
 - c. Biro Umum
 - d. Biro Pensiun
 - B. Departemen-Departemen yang terdiri dari :
 - a. Departemen Pelayanan dan Pembinaan Jemaat
 - b. Departemen Misi, Pengijilan, dan Pemuridan





- c. Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan
- d. Departemen Aset dan Ekonomi Gereja
- e. Departemen Hubungan Oikumene dan Kemitraan
- f. Departemen Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan
- g. Departemen Penelitian
- C. Yayasan-Yayasan terdiri :
 - a. Yayasan Pendidikan Kristen (YPK)
 - b. Yayasan Ottow Geisler
 - c. Yayasan Izaak Samuel Kijne
 - d. Yayasan Percetakan
 - e. Yayasan SMA Gabungan
- D. Lembaga Pendidikan Formal terdiri dari :
 - a. Universitas Ottow Geisler Jayapura
 - b. Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jayapura
 - c. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Lahairoi Manokwari
 - d. Sekolah Alkitab Apalapsili
 - e. Sekolah Alkitab Waropen
- E. Lembaga Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P3W) GKI di Tanah Papua
 - b. Pusat Pendidikan Kader (PUSPENKA)
 - c. Pusat pendidikan Guru Petrus Kafir
 - d. Sekolah Alkitab Malam (SAM) GKI di Tanah Papua

Klasis merupakan salah satu struktur kelembagaan GKI di Tanah Papua yang berfungsi sebagai persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah pelayanan tertentu yang dibentuk dalam sidang sinode. Pembentukan Klasis oleh Sinode tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif dan geografis, tetapi juga merupakan instrumen kelembagaan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan gereja secara efektif, terkoordinasi, dan kontekstual. Dalam struktur organisasi GKI, Klasis memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta pengembangan kapasitas pelayanan jemaat. Melalui fungsi tersebut, Klasis menjadi penghubung antara kebijakan dan arah pelayanan Sinode dengan kebutuhan konkret di tingkat jemaat. Keberadaan Klasis juga memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan dilakukan secara lebih dekat dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, geografis, dan spiritual jemaat yang dilayani. Perkembangan GKI di Tanah Papua menunjukkan dinamika kelembagaan yang cukup signifikan, yang saat ini ditandai dengan keberadaan **70 Klasis** sebagai unit pelayanan.

Badan Pekerja Klasis terdiri dari :

- Pelaksana Harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara).
- Anggota Badan Pekerja Klasis
- Badan Pekerja Klasis dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan yang terdiri dari :





A. Komisi-komisi diantaranya :

- a. Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat
- b. Komisi Misi, Pengijilan, dan Pemuridan
- c. Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan
- d. Komisi Aset dan Ekonomi Gereja
- e. Komisi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan
- f. Komisi Penelitian

Tabel 2.9. Distribusi Klasis, Jemaat Berdasarkan Sinode Wilayah

Wilayah	Klasis	Jemaat Mandiri, Pos PI, Jemaat Persiapan
I	11	307
II	5	111
III	8	212
IV	7	200
V	3	85
VI	5	135
VII	9	350
VIII	4	111
IX	4	37
X	4	217
XI	4	136
XII	6	154

Pada tingkat yang lebih operasional, Jemaat merupakan persekutuan orang percaya yang berada dalam suatu tempat dan wilayah pelayanan tertentu serta mewujudkan kehidupan persekutuannya melalui ibadah dan berbagai bentuk pelayanan secara teratur. Dalam konteks GKI di Tanah Papua, jemaat memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sangat beragam. Sebaran jemaat mencakup wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil, kawasan pesisir dan pantai, dataran rendah, kawasan hutan, hingga wilayah pegunungan. Kondisi geografis tersebut menghadirkan karakteristik pelayanan yang berbeda-beda, terutama dalam aspek aksesibilitas, mobilitas pelayan, penyediaan sarana dan prasarana, komunikasi, pembiayaan pelayanan, serta jangkauan pembinaan warga jemaat. Dengan demikian, pendekatan pelayanan GKI tidak dapat sepenuhnya menggunakan pola yang seragam, tetapi perlu mempertimbangkan tipologi wilayah, karakteristik jemaat, kepadatan penduduk, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat keterjangkauan pelayanan.

Secara kelembagaan, GKI di Tanah Papua saat ini memiliki **2.058 jemaat dan 255 jemaat persiapan**. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa GKI memiliki jaringan pelayanan yang luas sekaligus menghadapi kompleksitas pengelolaan organisasi dan pelayanan yang semakin tinggi. Jemaat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi merupakan basis utama penyelenggaraan misi gereja yang mencakup persekutuan (koinonia), kesaksian (marturia), dan pelayanan (diakonia). Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan ibadah, penggembalaan, pendidikan dan pembinaan iman, pelayanan sosial, pemberdayaan warga jemaat, penginjilan, serta pelaksanaan misi gereja di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah jemaat dan jemaat persiapan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan pelayan, sarana-prasarana, sistem pendanaan, serta tata kelola pelayanan agar





pertumbuhan secara kuantitatif dapat berjalan seimbang dengan pertumbuhan kualitas, kedewasaan iman, kemandirian, dan kemisioneran jemaat.

Dalam perspektif perencanaan strategis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur Klasis dan Jemaat merupakan modal kelembagaan utama GKI dalam melaksanakan tugas dan panggilannya, tetapi sekaligus menjadi ruang strategis yang membutuhkan penguatan. Luasnya cakupan geografis, keragaman karakteristik jemaat, serta pertumbuhan jumlah unit pelayanan menuntut adanya sistem tata kelola yang adaptif, berbasis data, terintegrasi, dan mampu merespons perubahan sosial yang berlangsung cepat di Tanah Papua. Oleh sebab itu, upaya penguatan struktur organisasi, tetapi juga pada peningkatan efektivitas pelayanan, penguatan kapasitas Klasis dan Jemaat, pemerataan sumber daya, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan, serta penguatan model pelayanan yang kontekstual berdasarkan tipologi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

2.4.5. Sumber Daya Ekonomi dan Keuangan

Sumber daya ekonomi dan keuangan merupakan salah satu modal penting bagi keberlanjutan pelayanan GKI di Tanah Papua. Kemandirian ekonomi gereja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membiayai pelayanan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab penatalayanan (stewardship) atas berkat yang Tuhan percayakan kepada gereja. Dalam konteks perubahan sosial, peningkatan kebutuhan pelayanan, dan luasnya wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua, penguatan ekonomi gereja menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan gereja pembawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Persembahan jemaat merupakan usaha konvensional yang berasal dari persembahan ibadah Minggu, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan misi dan penginjilan dan persembahan khusus lainnya. Persembahan merupakan sumber utama pendapatan gereja, menunjukkan partisipasi jemaat, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pelayanan gereja.

Selain persembahan, jemaat juga melaksanakan usaha-usaha inkonvensional lainnya dalam bentuk usaha ekonomi, penggunaan aset produktif dan hibah kemitraan. Usaha ekonomi gereja merupakan berbagai kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh gereja untuk mendukung pembiayaan pelayanan dan pemberdayaan jemaat misalnya koperasi gereja, kios dan toko jemaat, usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan, usaha jasa, usaha wisata dan UMKM gereja. Jemaat juga memiliki aset produktif seperti tanah, bangunan, sarana pendidikan, kesehatan, rumah sewa, gues house, gedung serbaguna, rumah pertemuan dan aset digital. GKI Juga dukungan dana dari pihak luar atau dana kemitraan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga donor, gereja mitra, lembaga kemanusiaan, sektor swasta maupun organisasi internasional.

Dengan sistem pendermaan yang dibagi secara proporsional dimana 40% untuk sinode, 20% untuk klasis, 40% untuk jemaat, sementara perpuluhan 100% disetor ke Sinode sebagai bentuk dukungan bagi jaminan hidup hamba Tuhan untuk saat ini masih dapat dipertahankan. Jika terjadi perubahan kelembagaan pada aras klasis maka perlu dipertimbangkan kembali sistem proporsional seperti ini, sehingga tidak terjadi cela fiskal yang semakin besar diantara jemaat-jemaat. Perkembangan Keuangan GKI selama 5 tahun terakhir yang bersumber dari pendermaan disajikan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.5 Penerimaan dan Persentase Secara Proporsional pada tiap aras gereja**

Penerima	Persentase	Nilai (Rp)
Sinode	40%	Rp 92.674.860.648,64
Klasis	20%	Rp 37.069.944.259,46
Jemaat	40%	Rp 92.674.860.648,64

Selain persembahan, GKI juga memperoleh sumber penerimaan dari dana persepuluhan yang disetor 100% ke Sinode untuk jaminan hidup hamba Tuhan.

Tabel 2.6 Distribusi Persembahan Berdasarkan Wilayah dan Klasis

Wilayah	Klasis	Jumlah Jemaat	Jumlah yang disetor (RP)	Tingkat Kepatuhan (%)
I	11	304	20.581.089.862,20	90,50
II	5	109	2.527.556.182,00	52,27
III	8	196	9.572.974.882,00	39,52
IV	7	190	5.070.975.561,00	68,65
V	3	87	5.573.772.792,00	55,08
VI	5	134	8.247.951.759,00	79,63
VII	9	335	16.000.734.701,00	59,31
VIII	4	104	8.450.885.482,00	95,91
IX	4	35	1.985.946.052,00	82,16
X	4	166	4.509.760.999,00	76,08
XI	4	132	4.331.520.148,00	39,51
XII	6	142	5.642.811.571,00	54,90

Total setoran persembahan pada tahun 2025 sebesar 92,50 milyar rupiah dengan tingkat kepatuhan penyetoran tertinggi (95,91%) pada jemaat di wilayah VIII, dan terendah pada jemaat-jemaat di wilayah XI (39,51%). Rata-rata kepatuhan 66,13% artinya tingkat kepatuhan penyetoran bagi jemaat-jemaat GKI baru mencapai dua pertiga dari tingkat yang diharapkan. Kondisi ini tidak disebabkan alasan ekonomi saja, tetapi pada konsistensi sistem penghimpunan dan penyetoran antar jemaat/wilayah. Wilayah VIII adalah yang paling menonjol, karena hanya memiliki 104 jemaat dan 4 Klasis, tetapi mencapai kepatuhan 95,91%. Sementara Wilayah I sangat kuat dari sisi skala dan kepatuhan sekaligus karena memiliki 304 jemaat, 11 Klasis, setoran tertinggi Rp20,58 miliar, dengan kepatuhan 90,50%. Praktek pengelolaan keuangan di wilayah ini sangat baik sehingga dapat menjadi wilayah percontohan.

Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Wilayah III yang memiliki 196 jemaat dan 8 Klasis, tetapi tingkat kepatuhannya hanya 39,52%. Wilayah XI yang memiliki 132 jemaat dan 4 Klasis, tetapi kepatuhannya hampir sama rendahnya dengan Wilayah III. Kemudian wilayah II (kepatuhan 52,27%) yang memiliki 109 jemaat dan 5 Klasis, dengan setoran hanya Rp2,53 miliar.

Kondisi lain yang terlihat dari data diatas, bahwa jumlah jemaat tidak secara otomatis menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Misalnya wilayah VII mempunyai 335 jemaat, paling banyak, tetapi kepatuhannya hanya 59,31%. Sedangkan wilayah VIII memiliki 104 jemaat, tetapi kepatuhannya 95,91%. Hal ini menunjukkan bahwa skala pelayanan bukanlah faktor tunggal yang menentukan melainkan ada berbagai faktor lain seperti sistem administrasi keuangan, kapasitas bendahara, kepemimpinan klasis dan jemaat, disiplin pelaporan, pemahaman jemaat mengenai





kewajiban penyeteroran, mekanisme monitoring, kondisi geografis dan akses, kapasitas ekonomi warga jemaat. Selain persembahan, terdapat juga persembahan persepuluhan yang disetor oleh jemaat-jemaat 100% kepada Sinode. Distribusi perpuluhan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Distribusi Perpuluhan Berdasarkan Wilayah dan Klasis

Wilayah	Jumlah Perpuluhan (Rp)	Perpuluhan/Jemaat (Rp/Jemaat)
I	18.626.306.445	61.270.744,88
II	1.321.240.600	12.121.473,39
III	3.783.608.808	19.304.126,57
IV	3.481.267.940	18.322.462,84
V	3.070.152.856	35.289.113,28
VI	6.567.459.868	49.010.894,53
VII	9.489.278.582	28.326.204,72
VIII	8.104.897.273	77.931.704,54
IX	1.631.737.300	46.621.065,71
X	3.430.991.500	20.668.623,49
XI	1.711.389.200	12.965.069,69
XII	3.097.664.200	21.814.536,61

Wilayah I merupakan mesin utama kontribusi finansial GKI secara nominal, dengan Rp18,63 miliar. Wilayah VIII merupakan wilayah paling produktif berdasarkan peran jemaat, mencapai Rp77,93 juta/jemaat. Dalam kondisi ini masih terdapat kesenjangan produktivitas yang sangat besar, sekitar 6,4 kali antara Wilayah VIII dan Wilayah II. Untuk pengembangan ke depan maka keuangan GKI tidak cukup hanya meningkatkan jumlah penerimaan, tetapi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, kepatuhan, dan kapasitas ekonomi jemaat, khususnya di wilayah dengan perpuluhan/jemaat rendah.

2.5 Jangkauan Pelayanan Sinode GKI Di Tanah Papua

Dengan 70 klasis, 13 bakal klasis, 2.058 jemaat, 255 jemaat persiapan/pos PI, dan 833.428 warga jemaat yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua, GKI memiliki jangkauan pelayanan yang sangat luas dan beragam. Jangkauan tersebut menjadikan GKI sebagai salah satu institusi keagamaan yang memiliki modal spiritual, sosial, dan kelembagaan yang besar untuk mendukung pembangunan manusia Papua, memperkuat persatuan, serta menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui pelayanan yang misioner, inklusif, dan kontekstual.

2.5.1 Jangkauan Geografis

Secara geografis, cakupan pelayanan GKI di Tanah Papua memiliki karakteristik yang sangat luas dan heterogen. GKI saat ini hadir di enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, dengan struktur pelayanan yang mencakup 12 wilayah pelayanan Sinode dan 70 Klasis. Data kelembagaan GKI menunjukkan bahwa jaringan pelayanan tersebut tersebar pada berbagai karakteristik bentang wilayah, mulai dari



kawasan pesisir dan kepulauan, tepian sungai, hulu-hilir dan danau, hingga kawasan pegunungan, lembah, pedalaman, serta wilayah perkotaan dan permukiman yang relatif terpencil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cakupan geografis GKI tidak hanya luas secara spasial, tetapi juga memiliki tingkat heterogenitas dan kompleksitas akses pelayanan yang tinggi.

Keragaman geografis tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan gereja, terutama dalam aspek rentang kendali organisasi, mobilitas pelayan, distribusi sumber daya, penyediaan sarana dan prasarana, komunikasi, serta kesinambungan pembinaan jemaat. Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian wilayah Tanah Papua masih menghadapi persoalan keterisolasian dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Dokumen perencanaan pembangunan nasional, misalnya, masih mengidentifikasi sejumlah kabupaten di keenam provinsi Tanah Papua sebagai daerah tertinggal, yang menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kapasitas pelayanan antarwilayah. Dalam konteks ini, kehadiran GKI di berbagai wilayah tersebut memiliki arti strategis, bukan hanya dalam menjalankan fungsi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, tetapi juga dalam membangun modal sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta berkontribusi terhadap pengembangan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelayanan keagamaan, pendidikan, sosial, pemberdayaan, dan pendampingan masyarakat.

Dengan cakupan pelayanan yang melintasi enam provinsi dan mencakup 12 wilayah pelayanan Sinode, GKI di Tanah Papua merupakan salah satu institusi keagamaan dengan jejaring kelembagaan yang luas di kawasan Tanah Papua. Luasnya cakupan tersebut sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan strategis.



Gambar 2.3. Peta Pelayanan GKI di Tanah Papua



2.5.2 Jangkauan Pelayanan kepada Seluruh Warga Jemaat

GKI melayani keluarga, anak, pemuda, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan. Pelayanan GKI bersifat inklusif dan menghadirkan kasih Allah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, status sosial, maupun kondisi ekonomi.

Secara demografis struktur GKI sangat kuat pada anak-anak muda, dan ini merupakan satu kekuatan. PAR merupakan kelompok terbesar, mencapai hampir 40% dari seluruh warga yang terdata. Sedangkan PAM hanya 18,16%. Hal ini menunjukkan bahwa GKI memiliki basis anak yang sangat besar, tetapi terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah anak (PAR) dan pemuda (PAM). Diantara 2,20 anak PAR untuk setiap 1 orang PAM yang menunjukkan adanya tantangan transisi generasi PAR menuju PAM.

Tabel 2.8. Demografi GKI Berdasarkan Sebaran Unsur

Kelompok	Jumlah	Proporsi
PAR	333.543	39,92%
PW	175.685	21,03%
PKB	174.562	20,89%
PAM	151.734	18,16%
TOTAL	835.524	100%

Sumber : Server Sinar GKI

Jika PAR dan PAM digabungkan sebagai generasi muda: $333.543 + 151.734 = 485.277$ orang muda. Sedangkan PKB + PW: $174.562 + 175.685 = 350.247$ orang dewasa.

Tabel 2.9. Demografi GKI Berdasarkan Generasi Muda Versus Dewasa

Kelompok	Jumlah	Proporsi
Generasi muda (PAR+PAM)	485.277	58,08%
Dewasa (PKB+PW)	350.247	41,92%
Total	835.524	100%

Namun data ini jika dilihat secara keseluruhan berdasarkan wilayah pelayanan makan wilayah I, III, dan VII merupakan pusat demografi atau basis jemaat GKI di Tanah Papua.

Tabel 2.10. Demografi GKI Berdasarkan Generasi Muda Versus Dewasa

Peringkat	Wilayah	Jumlah	Proporsi GKI
1	I	153.770	18,40%
2	VII	138.180	16,54%
3	III	125.555	15,03%
4	IV	79.937	9,57%
5	VI	64.074	7,67%
6	VIII	57.032	6,83%
7	XII	52.582	6,29%
8	X	48.696	5,83%
9	XI	45.901	5,49%
10	V	34.707	4,15%
11	II	27.356	3,27%
12	IX	7.734	0,93%



Wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap perbandingan unsur PAR dan PAM sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11. Rasio PAR dan PAM di Wilayah Pelayanan GKI

Wilayah	PAR	PAM	Rasio PAR:PAM
II	11.418	4.148	2,75
XII	22.833	8.509	2,68
XI	19.394	7.454	2,60
IV	34.166	13.391	2,55
VI	26.747	11.064	2,42
V	13.964	5.876	2,38
X	18.376	7.892	2,33
III	51.383	23.417	2,19
VIII	21.790	10.539	2,07
VII	53.477	27.548	1,94
I	57.235	30.397	1,88
IX	2.760	1.499	1,84

Sumber : Sinar GKI dan Tim Renstra

Secara relatif, Wilayah II, XII, XI dan IV memiliki gap PAR-PAM paling besar. Sementara Wilayah IX, I dan VII relatif lebih dekat antara PAR dan PAM. Namun, Wilayah IX tidak boleh dianggap paling baik, karena jumlah absolutnya sangat kecil hanya 7.734 warga.

Data demografi 835.524 warga GKI menunjukkan bahwa struktur warga GKI memiliki basis generasi muda yang sangat kuat. Kelompok PAR mencapai 333.543 orang (39,92%) dan PAM 151.734 orang (18,16%), sehingga secara keseluruhan generasi muda mencapai 485.277 orang atau 58,08% dari total warga yang terdata. Kondisi ini merupakan modal demografis strategis bagi keberlanjutan GKI. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah PAR dan PAM dengan rasio 2,20:1. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat kesinambungan pembinaan dan integrasi generasi dari PAR menuju PAM. Dengan demikian, tantangan GKI bukan semata-mata menyediakan pelayanan bagi anak dan pemuda, tetapi membangun sistem regenerasi yang mampu mengubah besarnya basis generasi muda menjadi kader, pelayan dan pemimpin gereja di masa depan.

2.5.3 Jangkauan Pelayanan yang Holistik

GKI dipanggil untuk menghadirkan Injil yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan keutuhan ciptaan. Pelayanan GKI tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup: penginjilan, pendidikan, kesehatan, diakonia, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, perdamaian dan rekonsiliasi, transformasi digital.

2.5.4 Jangkauan Pelayanan dalam Keberagaman Budaya Papua

GKI bertumbuh dan melayani di tengah keberagaman budaya Papua serta dipanggil untuk terus mengembangkan pelayanan yang kontekstual dan menghargai kearifan lokal.





Pelayanan GKI menjangkau ratusan suku, ratusan bahasa daerah, sistem nilai dan adat yang beragam di Tanah Papua.

2.6. Yayasan-Yayasan

2.6.1. Yayasan Pendidikan Kristen (YPK)

Secara khusus untuk pendidikan dasar dan menengah YPK memiliki potensi yang sangat luar biasa sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah pada YPK

Indikator	Jumlah
Provinsi	6
PSW/Kabupaten/Kota	25
Sekolah	792
Guru	6.251
Murid	91.932
Rata-rata murid/sekolah	116
Rata-rata murid/guru	14,7
Rata-rata guru/sekolah	7,9

Sumber : Laporan YPK, 2026 dan analisis TIM Renstra

Secara agregat, angka 14,7 murid per guru terlihat cukup baik. Tetapi angka rata-rata ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antar provinsi dan antar jenjang pendidikan. Keberadaan YPK sangat terkonsentrasi pada beberapa wilayah Provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Tabel 2.13. Kondisi Konsentrasi Pendidikan Dasar dan Menengah pada YPK di Seluruh Tanah Papua

Provinsi	Sekolah	% dari total	Guru	Murid
Papua	317	40,0%	2.540	37.035
Papua Barat Daya	192	24,2%	1.429	18.401
Papua Barat	154	19,4%	1.344	19.215
Papua Selatan	48	6,1%	387	5.715
Papua Tengah	53	6,7%	278	3.905
Papua Pegunungan	28	3,5%	273	7.662
Total	792	100%	6.251	91.932

Sumber : Laporan YPK, 2026 dan analisis TIM Renstra

Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat menampung 663 sekolah atau sekitar 83,7% seluruh sekolah YPK dan juga sekitar 85% guru serta sekitar 81% murid. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan YPK sangat terkonsentrasi di wilayah Papua dan Papua Barat Sebaliknya, tiga provinsi lainnya yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hanya memiliki sekitar 16,3% sekolah. Kondisi merupakan evidence penting untuk kebijakan ekspansi YPK.

Jenjang pendidikan yang paling dominan di YPK adalah sekolah dasar (SD). Dari jumlah sekolah dasar dan menengah sebanyak 792, terdapat 70,8% (561 unit) adalah sekolah dasar.



**Tabel 2.14. Distribusi Jenjang Pendidikan Berdasarkan Sekolah, Guru dan Murid**

Jenjang	Sekolah	% sekolah	Guru	Murid
PAUD	33	4,2%	253	643
TK	95	12,0%	408	4.100
SD	561	70,8%	3.860	65.620
SMP	64	8,1%	954	11.051
SMA	25	3,2%	475	5.122
SMK	14	1,8%	301	2.696
Total	792	100%	6.251	91.932

Sumber : Laporan YPK, 2026 dan analisis TIM Renstra

Berdasarkan tabel terlihat bahwa 7 dari setiap 10 sekolah YPK adalah SD. Dan SD menampung sekitar 71,4% seluruh murid YPK. Hal ini berarti struktur YPK saat ini sangat kuat pada pendidikan dasar, tetapi relatif lemah pada pendidikan menengah dan vokasi. Terlihat adanya gap pendidikan menengah dimana 1 sekolah SMA terdapat 22 sekolah dasar (SD) dan 1 SMK terdapat 40 SD, sehingga berpotensi memutuskan kesinambungan pendidikan. Artinya YPK memiliki basis yang sangat besar pada pendidikan dasar, tetapi kapasitas untuk membawa lulusan SD menuju pendidikan menengah masih jauh lebih kecil.

2.6.2. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) I.S. Kijne

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) I.S. Kijne merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi tertua dan strategis di Tanah Papua. Sejarahnya berakar pada kebutuhan Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua untuk membangun sumber daya manusia yang mampu melayani gereja dan masyarakat melalui pendidikan teologi. Embrio pendidikan teologi tersebut berkembang dari pendidikan Guru Jemaat (RAZ) dan pendidikan guru (ODO) yang dikelola Badan Zending di Serui.

Pada 21 September 1954, didirikan Sekolah Teologi (ST), yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Theologia pada 1966 dan Sekolah Tinggi Theologia (STT) pada **17 Februari 1971**. Perubahan tersebut menunjukkan proses peningkatan standar pendidikan, dari pendidikan calon pendeta pada tingkat lulusan SMP menuju pendidikan tinggi bagi lulusan SMU, SPG dan SMK. Pada **1 Desember 1993**, melalui pengesahan Statuta, lembaga tersebut berubah nama menjadi **Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili “Izaak Samuel Kijne” Jayapura**.

Secara historis, pendirian STFT tidak dapat dipisahkan dari pembentukan GKI. Sekolah Teologi didirikan untuk mempersiapkan pendeta bagi GKI yang kemudian berdiri pada **26 Oktober 1956**. Dengan demikian, sejak awal STFT memiliki mandat yang lebih luas daripada sekadar penyelenggara pendidikan tinggi. STFT merupakan bagian dari infrastruktur pengembangan sumber daya manusia gereja dan masyarakat Papua. Dengan sejarah lebih dari **70 tahun sejak pendiriannya pada 1954**, STFT I.S. Kijne memiliki modal historis, kelembagaan dan sosial yang kuat untuk memasuki tahap transformasi kelembagaan berikutnya.

Saat ini STFT I.S. Kijne menyelenggarakan **4 program studi**, terdiri atas dua program studi strata satu dan dua program studi pascasarjana, yaitu:

1. Program Studi Teologi (S1);
2. Program Studi Pendidikan Agama Kristen/PAK (S1);
3. Program Studi Misiologi (S2);





4. Program Studi Pendidikan Agama Kristen/PAK (S2).

Dengan demikian, STFT telah memiliki struktur pendidikan yang mencakup jenjang **sarjana dan magister**. Hal ini merupakan modal awal penting untuk pengembangan kelembagaan menuju institut atau universitas. Dari sisi sumber daya manusia akademik, STFT memiliki **23 tenaga dosen**, yang terdiri atas **10 orang bergelar doktor (S3)**, **11 orang bergelar magister (S2)**, dan **2 orang dosen asing** yang diperbantukan melalui kerja sama STFT I.S. Kijne dengan United Evangelical Mission (UEM) Jerman. Dokumen mencatat bahwa **2 dari 10 dosen bergelar S3 berstatus pensiun**, sehingga aspek regenerasi dan ketersediaan dosen aktif perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan.

Selain tenaga akademik, tersedia **7 tenaga kependidikan tetap dan 11 tenaga honorer**. Dengan demikian, terdapat **18 tenaga pendukung administrasi**, yang menjadi modal operasional bagi pengembangan tata kelola perguruan tinggi.

Dari sisi penerimaan mahasiswa, STFT menerima sekitar **200–280 mahasiswa baru setiap tahun**. Angka tersebut menunjukkan adanya permintaan pendidikan yang relatif kuat dan merupakan salah satu indikator bahwa STFT memiliki basis pasar pendidikan yang dapat dikembangkan.

2.6.3. Universitas Ottow Geisler Papua

Pada **26 Oktober 1981**, Yayasan Ottow Giessler (YOG) memperoleh izin resmi dari Sinode GKI di Irian Jaya untuk mendirikan Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) dengan satu program studi, yaitu Manajemen Perusahaan. Pada tahap awal, proses pembelajaran berlangsung dengan memanfaatkan ruang kelas SD dan SMP YPK Paulus di Dok V Jayapura pada periode 1981–1986.

Perkembangan kelembagaan kemudian ditandai dengan perubahan bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & Geissler Jayapura. Dengan dukungan pendanaan dari ICCO Belanda dan EZE Jerman, kampus di Kotaraja mulai dibangun pada 1985 dan mulai digunakan pada 1986. Selanjutnya, pada **2011** lembaga tersebut berkembang menjadi **Universitas Ottow Geissler (UOG) Jayapura**, yang kemudian berkembang menjadi UOGP.

Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa UOGP memiliki pengalaman kelembagaan lebih dari empat dekade dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perkembangannya juga memperlihatkan perubahan dari institusi yang awalnya berfokus pada ekonomi dan manajemen menjadi universitas dengan rumpun ilmu yang lebih beragam.

Saat ini UOGP memiliki **3 fakultas**, yaitu Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Pertanian, Kehutanan & Kelautan, serta Fakultas Sains & Teknologi. Ketiga fakultas tersebut mencakup bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, pertanian, kehutanan, kelautan, sistem informasi, teknik geologi dan biologi. Struktur ini memberikan dasar bagi UOGP untuk mengembangkan pendidikan tinggi yang menggabungkan ilmu ekonomi, sumber daya alam dan teknologi.

Pada tahun 2026 UOGP memiliki **69 dosen tetap dan 47 tenaga kependidikan**. Dari 69 dosen tetap tersebut, **60 orang atau 87% berpendidikan magister (S2)** dan **9 orang atau 13% berpendidikan doktor (S3)**. Selain itu, **34 dosen atau 49% telah memiliki sertifikat pendidik**, sementara **6 dosen memiliki sertifikasi profesi**.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa UOGP telah memiliki basis SDM akademik yang cukup besar, tetapi terdapat kebutuhan strategis untuk meningkatkan proporsi dosen bergelar doktor dan memperluas kepemilikan sertifikasi pendidik maupun profesi.





Upaya pengembangan SDM telah dilakukan. Dalam tiga tahun terakhir, UOGP memfasilitasi **10 dosen untuk mengikuti pendidikan doktor**, baik di dalam maupun luar negeri, melalui dukungan LPDP, gereja dan universitas. Hal ini merupakan investasi penting untuk memperkuat kapasitas akademik dan mendukung pengembangan program studi baru.

Pada tenaga kependidikan, tersedia **47 orang** yang mencakup staf administrasi, laboran, satuan keamanan, sopir dan pekaya. Sebanyak **2 tenaga kependidikan telah menyelesaikan pendidikan magister**, sementara **12 orang telah mengikuti studi banding dan pelatihan** di dalam dan luar negeri.

Dari sisi kepuasan internal, pada tahun 2024 sebanyak **73% dosen menyatakan puas** terhadap pengelolaan SDM dan **78% tenaga kependidikan menyatakan puas**. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah memperoleh respons positif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan kepuasan sekitar 22–27%.

Pada tahun 2026, **11 program studi UOG telah terakreditasi dengan peringkat Baik dan Baik Sekali**, sementara akreditasi institusi meningkat dari **Baik menjadi Baik Sekali**. Peningkatan akreditasi institusi merupakan indikator penting adanya perbaikan sistem tata kelola dan mutu perguruan tinggi.

Dokumen menunjukkan bahwa mahasiswa UOGP pada periode **2019–2023 didominasi oleh mahasiswa asli Papua**. Hal ini memperlihatkan peran UOGP sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat asli Papua. Namun, jumlah mahasiswa terdaftar aktif pada periode **2023–2025 mengalami penurunan**, yang menurut dokumen terutama disebabkan oleh sebagian mahasiswa yang mengambil cuti kuliah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian manajemen karena keberlanjutan jumlah mahasiswa akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas akademik dan keberlanjutan pembiayaan universitas.

Dari sisi kualitas akademik, lulusan UOG hingga tahun akademik 2023/2024 tercatat memiliki **rata-rata IPK di atas standar nasional**. Selain itu, prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa pada 2024–2025 menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa UOG tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memiliki capaian positif dalam kualitas lulusan dan prestasi mahasiswa.

UOGP telah memiliki aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tercermin dari jumlah jurnal ilmiah, buku, kegiatan PKM dan Hak Kekayaan Intelektual pada periode 2023–2026. Data tersebut menunjukkan adanya aktivitas tridarma yang terus dikembangkan.

Namun, dari perspektif pembiayaan, terdapat persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian. Dalam tiga tahun terakhir, total realisasi penerimaan UOGP tercatat sebesar **Rp31.752.147.205**. Dari jumlah tersebut, dokumen mencatat alokasi **Rp51.465.000 untuk penelitian** dan **Rp28.000.000 untuk pengabdian kepada masyarakat**. Jika dibandingkan dengan total penerimaan, alokasi penelitian hanya sekitar **0,16%**, sedangkan pengabdian kepada masyarakat sekitar **0,09%**. Secara gabungan, penelitian dan pengabdian hanya sekitar **0,25%** dari total penerimaan yang tercatat. Sebaliknya, sekitar **99,75%** dana digunakan untuk gaji, pengembangan SDM, biaya operasional serta pengembangan sarana dan prasarana. Angka ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan UOGP masih sangat dominan untuk kebutuhan rutin dan operasional.

Dari sisi sarana dan prasarana, UOGP memiliki infrastruktur yang relatif beragam, antara lain perpustakaan pusat dan fakultas, laboratorium komputer, akuntansi, statistik, bahasa, GIS, kimia, fisika, biologi, geologi ekonomi, laboratorium aquaculture dan bioflok, green house, hutan pendidikan Pasir Dua, ruang konseling, asrama mahasiswa, kendaraan operasional, lapangan sepak bola dan gedung serba guna.





Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi modal penting untuk pengembangan pendidikan berbasis praktik dan penelitian, khususnya bidang pertanian, kehutanan, kelautan, sains dan teknologi.

Secara kelembagaan, UOGP telah memiliki fondasi yang cukup kuat. **69 dosen tetap, 47 tenaga kependidikan, 11 program studi terakreditasi, dan status akreditasi institusi Baik Sekali** merupakan modal penting untuk memasuki tahap pengembangan berikutnya.

Namun, data juga memperlihatkan bahwa tantangan UOGP bukan lagi terutama membangun struktur dasar universitas, melainkan **meningkatkan kualitas, produktivitas dan relevansi**. Prioritas utama perlu diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas dosen doktor, peningkatan retensi mahasiswa, penguatan penelitian dan PKM, optimalisasi sarana-prasarana, diversifikasi program studi yang berbasis kebutuhan Papua, serta pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan.

2.7. Evaluasi Renstra 2022-2027

Renstra 2022–2027 memiliki fondasi metodologis yang cukup kuat. Renstra menyatakan secara eksplisit bahwa penyusunannya menggunakan 3.000 responden, wawancara pimpinan Sinode dan FGD, kemudian dianalisis menggunakan TOWS, ESFAS dan ISFAS. Kajian tersebut menggunakan 8 faktor, antara lain fokus kepada jemaat, kepemimpinan, good governance, manajemen sumber daya, perubahan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan.

Namun terdapat temuan yang sangat penting: 583 kekuatan, 697 kelemahan, 501 peluang dan data ancaman dalam analisis TOWS. Jumlah kelemahan yang lebih besar daripada kekuatan menunjukkan bahwa pada saat Renstra disusun, GKI mengidentifikasi persoalan internal yang cukup serius. Renstra 2022–2027 sebenarnya adalah dokumen transformasi, bukan sekadar dokumen program tahunan dan strategi utama dirumuskan adalah mendorong inovasi. Renstra ini sudah membaca tantangan zaman dimana ada muncul tantangan : spiritualitas di era industri 4.0 dan wilayah 3T, kapasitas digital warga, ekologi dan SDA, kelompok tertinggal, disabilitas dan korban bencana, pemberdayaan dan pengutusan warga jemaat di luar gedung gereja. Renstra menetapkan 8 sasaran strategis dan 11 pokok program.

Tabel 2.15. Sasaran Strategis dan Pokok Program

Bidang	Sasaran
Persekutuan	Spiritualitas warga era industri 4.0
Persekutuan	Spiritualitas warga 3T
Pelayanan	Ekologi dan SDA
Pelayanan	Kelompok tertinggal, disabilitas dan korban bencana
Kesaksian	Pemberdayaan dan pengutusan warga
Kesaksian	Oikumene dan dialog antaragama
Penatalayanan	Kapasitas digital
Penatalayanan	Profesionalisme manajemen dan kepemimpinan

Terdapat 8 sasaran strategis, sementara programnya mencapai 11 bidang, mulai dari spiritualitas, kelembagaan, SDM, ekonomi, sarana-prasarana, lingkungan, kesehatan, keuangan, personalia, advokasi sampai kajian ilmiah. Terdapat ketidakseimbangan antara sasaran strategis dan program. Satu sasaran bisa mempunyai banyak program, tetapi tidak selalu jelas program mana yang paling menentukan pencapaian sasaran strategis. Akibatnya Renstra menjadi banyak program, banyak kegiatan, banyak laporan tetapi sulit mengetahui dampak strategisnya.





Banyak target Renstra menggunakan indikator seperti :

- 100% mendapat informasi
- 100% mengetahui program
- 100% tersedianya dokumen
- 100% fasilitas tersedia

Secara administrasi indikator tersebut bagus, tetapi secara strategi belum menjawab apa yang berubah setelah program dilaksanakan. Sebagai contoh 100% warga mengetahui program tetapi pertanyaan berikutnya :

- Apakah spiritualitas meningkat?
- Apakah partisipasi meningkat?
- Apakah retensi pemuda meningkat?
- Apakah kehidupan keluarga membaik?
- Apakah kepatuhan persepuluhan meningkat?
- Apakah pelayanan kepada kelompok rentan meningkat?

Jadi ada pergeseran yang diperlukan: Renstra 2022–2027 berbasis Kegiatan dan output menjadi Renstra 2027–2032 Intervensi menjadi output menjadi outcome menjadi impact.

Analisis keuangan memyajikan data yang menarik karena Renstra sendiri sudah sangat sadar mengenai persoalan kemandirian dana. Dokumen menyatakan bahwa kemandirian gereja mencakup: menggali sumber dana, melipatgandakan sumber daya, menggunakan dana secara tepat guna, keterbukaan, akuntabilitas, kewirausahaan, dan budaya saling berbagi. Sumber pendapatan GKI juga sudah diidentifikasi: persembahan, perpuluhan, ADK ditambah mitra pemerintah, mitra luar negeri dan usaha gereja. Meskipun demikian Renstra lalu belum bisa menjawab seberapa kuat kapasitas ekonomi setiap wilayah pelayanan, apalagi saat ini GKI telah memiliki data yang jauh lebih akurat tentang keuangan.

Tabel 2.16. Hasil Temuan Evaluasi terhadap Renstra 2022-2027

Dimensi	Kondisi Renstra 2022–2027	Persoalan
Visi	Sangat kuat	Sudah relevan
Analisis konteks	Cukup kuat	Perlu data terbaru
Partisipasi	3.000 responden + FGD	Perlu diperkuat dengan database
Strategi	Mendorong inovasi	Perlu bukti inovasi yang berhasil
Sasaran	8 sasaran strategis	Masih cukup luas
Program	11 program utama	Cenderung banyak
Indikator	Banyak target 100%	Dominan output
Keuangan	Sudah dibahas	Perlu analisis kepatuhan & produktivitas
Aset	Masalah sudah diidentifikasi	Belum selesai dikonsolidasikan
Yayasan	Sudah masuk Renstra	Perlu integrasi sebagai ekosistem
SDM	Ada program beasiswa/pelatihan	Perlu talent management
Digital	Sudah menjadi sasaran	Perlu transformasi digital menyeluruh
Pelayanan sosial	Ada	Perlu pendekatan inklusif dan outcome
Monitoring	Ada bab M&E	Perlu dashboard indikator berbasis data

Sumber : Tim Renstras 2026





- **Baseline Data**

Data kelembagaan menunjukkan bahwa GKI di Tanah Papua memiliki 70 Klasis, 13 Bakal Klasis, 2.058 Jemaat, 255 Jemaat Persiapan, dan 833.428 warga jemaat. Rata-rata terdapat sekitar 405 warga per jemaat dan 29 jemaat per Klasis. Angka tersebut menunjukkan bahwa GKI bukan lagi organisasi dengan skala pelayanan lokal, tetapi sebuah sistem pelayanan yang sangat besar, tersebar dan kompleks. Karena itu, persoalan strategis GKI ke depan tidak cukup dijawab dengan pendekatan programatik biasa, tetapi memerlukan transformasi pelayanan, tata kelola, SDM, pembiayaan dan pemanfaatan teknologi.





Visi, Misi, Azas, dan Nilai

3.1 Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan Visi, Misi, Asas, dan Nilai dari Sinode GKI DI Tanah Papua. Untuk itu, bagian ini dapat menjadi rambu-rambu dalam dokumen Renstra agar tetap berfokus pada gereja yang menjadi pembawa keadilan dan kesejahteraan yang dapat dicapai melalui pemberitaan Injil, pelayanan kasih, persekutuan oikumenis, serta nilai dasar iman Kristiani.

3.2 Visi

3.2.1 Visi Teologi

Visi merupakan pilar utama yang dapat memberikan gambaran tentang pandangan masa depan (cita-cita atau tujuan akhir) jangka panjang yang ideal arah organisasi ingin dicapai. Atas dasar itu, maka visi teologi dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah:

"Kerajaan Allah"
(Menghadirkan Tanda-Tanda Kerajaan Allah di Tengah Dunia)

Visi teologi teologi di atas mengandung makna: (1) melandasi, (2) mengarahkan, dan (3) mengukur pencapaian pelayanan GKI di Tanah Papua.

3.2.2 Visi Rencana Strategis

Visi rencana strategis (Renstra) Sinode GKI di Tanah Papua adalah:

"Menjadi Gereja Pembawa Keadilan, Kedamaian dan Kesejahteraan".

3.3 Misi

Misi merupakan sebuah Tindakan atau Langkah operasional yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk merealisasikan visi. Untuk itu, misi dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah:

**"Mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah
dalam Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan Kasih, dan Keadilan"**





Dalam menjalankan misi di atas, Sinode GKI di Tanah Papua dipanggil dan diutus untuk membangun hubungan oikumenis dan kemitraan; mengembangkan sumber daya manusia, kebudayaan, penelitian, dan pelayanan holistik (menjangkau seluruh aspek kehidupan bermasyarakat).

3.4 Azas

Azas merupakan sebuah landasan atau prinsip dasar (hukum atau keyakinan mutlak) yang digunakan sebagai pedoman utama yang menjadi pijakan organisasi dalam beroperasi dan mengambil keputusan. Untuk itu, azas dalam Sinode GKI di Tanah Papua terdiri atas: (1) Kristokrasi sebagai azas pemerintahan; (2) Alkitab sebagai azas pengajaran, pemberitaan, dan pelayanan; (3) Persekutuan sebagai azas bergereja; dan (4) *Presbiterial Sinodal* sebagai azas kepemimpinan.

3.5 Nilai

Nilai merupakan sebuah prinsip moral yang mengandung etika atau norma budaya dan mengatur tentang keyakinan dasar dan standar perilaku yang wajib dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan berinteraksi. Untuk itu, dalam dokumen ini nilai-nilai (values) yang dimaksudkan adalah prinsip dasar, keyakinan bersama, dan karakter utama yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam berpikir, mengambil keputusan, melaksanakan pelayanan, serta membangun relasi dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi identitas kelembagaan gereja, tetapi juga menjadi roh pelayanan yang menghidupkan seluruh gerak pelayanan GKI di Tanah Papua dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks, dinamis, dan digital.

Dalam dokumen Renstra 2022-2027 telah ditetapkan nilai-nilai dasar yang dihayati dan diimplementasikan oleh seluruh aras pelayanan (Sinode, Klasis, dan Jemaat) yakni: (1) **Kesehatan:** mengandung makna kesatuan hati, pikiran, dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan dan keputusan gereja secara bersama-sama; (2) **Ketekunan:** mengandung makna sikap setia bekerja, tidak mudah menyerah, dan terus berjuang dalam menjalankan panggilan pelayanan; (3) **Kesetiaan:** mengandung makna komitmen yang kuat kepada Tuhan, gereja, dan tugas pelayanan di tengah berbagai tantangan zaman; dan (4) **Ketaatan Iman:** mengandung makna kehidupan yang tunduk kepada Firman Tuhan serta menjadikan Kristus sebagai pusat pelayanan.

Selain itu, mengacu pada perjalanan pelayanan GKI di Tanah Papua menuju tahun 2036 berdasarkan Ketetapan Sidang Sinode XVI di Sentani Nomor: VI/TAP/SS-XVI/GKI/2011 tentang Visi, Misi dan Rencana Strategis GKI di Tanah Papua menuju tahun 2036, maka nilai-nilai pelayanan periode 2027–2032 dipandang perlu untuk tetap melanjutkan nilai utama yang telah diwariskan pada periode sebelumnya, yakni (1) Kesehatan, (2) ketekunan, (3) kesetiaan, dan (4) ketaatan iman. Namun, dalam menghadapi era transformasi global, digitalisasi, krisis ekologis, perubahan sosial, dan tantangan pelayanan kontekstual Papua untuk tahun pelayanan 2027-2032, maka nilai-nilai tersebut perlu diperkuat dengan nilai-nilai baru yang bersifat strategis dan transformatif, yakni: (1) **Integritas:** mengandung makna tinggi kejujuran, transparansi dan tanggung jawab dalam seluruh pelayanan gereja; (2) **Profesionalisme:** mengandung makna kualitas pelayanan yang tertib, efektif, kompeten dan berorientasi pada hasil pelayanan yang berdampak; (3) **Kolaborasi:** mengandung makna budaya





kerja sama antara jemaat, klasis, sinode, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat adat dan mitra oikumene; dan (4) **Kepedulian Ekologis**: mengandung makna tanggung jawab gereja dalam menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian tanah Papua; dan (5) **Pelayanan Inklusif**: mengandung makna menghadirkan gereja yang menerima, melayani dan memberdayakan seluruh warga tanpa diskriminasi.





Masalah, Isu Strategis, dan Analisis SWOT

4.1 Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan Masalah, Isu Strategis, dan Analisis SWOT tentang Situasi dan Kondisi Sinode GKI DI Tanah Papua mulai dari struktur fungsional, struktur organisasi, struktur garis dan staf, hingga struktur jaringan yang paling sesuai untuk tujuan, ukuran, dan jangkauan lingkungan pelayanan. Untuk itu, bagian ini akan dimulai dengan tahapan yang meliputi identifikasi masalah, menyeleksi seleksi isu, dan program dan analisis SWOT.

4.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Sinode GKI di Tanah Papua sangat berkaitan dengan organisasi sinode itu sendiri dan kinerja aktual dengan standar pelayanan yang menimbulkan gejala atau fenomena dari akar masalah sehingga menghasilkan iklim kinerja yang terus-menerus mengiringi perjalanan Sinode GKI di Tanah Papua dapat diidentifikasi menjadi 7 (Tujuh) masalah pokok, yakni (1) Sejarah, (2) Tugas dan Panggilan, (3) Sumber Daya, (4) Jangkauan Pelayanan, (5) Visi dan Misi, (6) Renstra 2022-2027, dan (7) Situasi Terkini (*Real Time*). Ketujuh masalah tersebut dapat dirinci ke dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Masalah dan Sub Masalah

NO.	MASALAH	SUB MASALAH
1.	Sejarah	1.1 Trauma Politik dan Sejarah Integrasi: Transisi wilayah pelayanan dari zendeling Belanda, pelayanan jemaat di tengah konflik, kekerasan HAM, trauma sosial yang belum tuntas diselesaikan
		1.2 Inkulturasi Budaya dan Identitas Teologis: Mengelola keberagaman budaya dan etnis, perjumpaan Injil dan adat, tradisi lokal, padangan hidup OPA, pelayanan kontekstual dan Inklusif
		1.3 Marginalisasi Orang Papua dan Disparitas Sosial: Kegagalan pembangunan, marginalisasi rasial bagi jemaat, melawan keadilan tanpa kehilangan esensi pelayanan
		1.4 Dinamika Kelembagaan, Otonomi Khusus, dan Pemekaran: Organisasi sinode mengalami perubahan, afirmasi Papua yang





			parsial, dan pemekaran wilayah yang memunculkan primordialisme kesukuan atau kewilayahan
2.	Tugas Dan Panggilan	2.1	<i>Koinonia</i> 'persekutuan': Keterlibatan warga jemaat dalam pelayanan sepenuhnya pada pendeta, inkulturasi budaya dalam persekutuan, dan keberagaman etnik dalam persekutuan.
		2.2	<i>Diakonia</i> 'pelayanan kasih': Minimnya infrastruktur pelayanan di wilayah yang sulit terjangkau, beban moral yang tinggi dalam menjawab kemiskinan ekstrim, kesejahteraan, dan rendahnya derajat pendidikan warga gereja dari OAP di pelosok Tanah Papua
		2.3	<i>Marturia</i> 'kesaksian': Krisis sosial dan budaya, degradasi moral, kecanduan Miras dan Narkoba, marginalisasi hak-hak dasar, kemandirian bersaksi secara tegas, benar dan bermartabat, dan transformasi firman Tuhan sesuai perubahan global dan zaman
		2.4	<i>Profetis</i> 'keadilan dan perdamaian': Fungsi profetis gereja berbenturan dengan konflik sosial, kekekrasan dan eksploitasi sumber daya alam, dan tantangan menyuarkan keadilan
		2.5	Kelembagaan dan Sumber Daya: Kemandirian gereja dalam bidang teologi, daya, dan dana masih menjadi momok, dan keterbatasan pegawai organik gereja/POG yang terampil dalam mengelola program-program strategis gereja
3.	Sumber Daya	3.1	Manajemen dan Penempatan: Proses perencanaan, rekrutmen, dan penempatan POG yang tidak sejalan dengan pedoman pelayanan.
		3.2	Mutasi: Proses Mutasi POG yang sarat kepentingan
		3.3	Kapasitas dan Kapabilitas: Peningkatan kapasitas manajerial dan tata Kelola gereja sesuai pedoman pelayanan
		3.4	Ketidakseimbangan Rasio Pelayan: Jumlah Pendeta, Guru Jemaat, dan Guru Injil tidak sebanding dengan jumlah jemaat, serta sebaran yang tidak merata
		3.5	Sentralisasi Tenaga Pelayan: Kecenderungan pelayan terpusat di wilayah pelayanan kotawi dan wilayah terisolir kurang mendapat perhatian
		3.6	Kesejahteraan dan Beban Pelayanan: Ketidakmerataan fasilitas, tantangan geografis berdampak pada beban pelayanan, dan kesejahteraan para pelayan jemaat
4.	Jangkauan Pelayanan	4.1	Aksesibilitas Wilayah: 12 Sinode Wilayah, 70 Klasis dan 13 Klasis Persiapan, 2043 Jemaat, yang tersebar di pulau-pulau kecil, pesisir, hingga pegunungan tinggi yang terisolasi
		4.2	Biaya operasional pelayanan pastoral yang cukup tinggi
		4.3	Jarak geografis (tidak semua medan pelayanan terjangkau dengan transportasi umum
		4.4	Peninjauan lokasi pelayanan yang tidak rutin
5.	Visi dan Misi	5.1	Dinamika Spiritual dan Integritas Gereja: Penjematan mandat Imamat Am, standar moral teologis, dedikasi, spiritualitas pelayanan yang dinamis dan majemuk, pendalaman pemahaman jemaat terhadap firman dan tata nilai gereja)
		5.2	Dinamika Oikumene dan Tata Kelembagaan: Struktur dan manajemen pelayanan yang gemuk, manajemen resiko yang rendah, distribusi pelayan dan menjaga keesaan gereja, serta menjaga harga diri pionir Papua Tanah Damai
		5.3	Tantangan Budaya dan Multikulturalisme: Sifat GKI itu oikumenis, praktik pelayanan bertentangan dengan egosentrisme, etnosentrisme, primordialisme, representasi wilayah, multidenominasi, perbedaaan teologi dan misi antar-sinode, dan konflik antar-umat beragama)
		5.4	Dinamika Jemaat: Minimnya peran teologis kaum awam,





			keseimbangan tata gereja dan teologi budaya setempat, inkulturasi Injil yang tidak tepat dan benar
6.	Renstra 2022-2027	6.1	Teknis Administrasi dan Finansial: Ketidaksesuaian program, gejala dan lonjakan keuangan, dan pelaporan yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran
		6.2	Persekutuan dan Partisipasi: Keterlibatan kaum awam yang minim, visi pelayanan yang menyimpang/bergeser, dan program tidak merujuk pada renstra
		6.3	Sosial dan Kontekstual: Bahasa dokumen yang sangat tinggi, sulit dimengerti, kurangnya respons terhadap isu lokal, resistensi terhadap pembaharuan, dan mempertahankan status konvensional
7.	Situasi Terkini (Real Time)	7.1	Masalah Keamanan dan Hak Asasi Manusia Orang Papua: Konflik bersenjata yang tak kunjung reda, krisis kemanusiaan, pengungsian, dan perlindungan hukum bagi Pelayan Organik Gereja (POG)
		7.2	Masalah Politik dan Demokrasi Lokal: Kecurangan pemilu, netralitas penyelenggaraan pemilu, dan pastoral politik
		7.3	Kerusakan Lingkungan dan Agraris: Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN), kerusakan lingkungan, dan tantangan edukasi ekoteologis bagi warga GKI
		7.4	Marjinalisasi Sosial-Ekonomi: Pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang layak, dan penguatan ekonomi kerakyatan

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

4.3 Isu Strategis

Isu adalah suatu kondisi atau peristiwa baik internal atau eksternal dalam Sinode GKI di Tanah Papua yang jika berlanjut akan memiliki dampak signifikan pada fungsi atau aktivitas pelayanan gereja pada kepentingan masa depan. Isu juga kadang berpotensi menjadi perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan karena sangat berkaitan dengan sebuah perkataan dan perbuatan tertentu. Isu strategis dalam Sinode GKI di Tanah Papua dapat ditemukan pada bidang: (1) Teologia, (2) Daya, (3) Dana, dan (4) Umum yang dapat diidentifikasi ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Isu dan Sub Isu

NO.	ISU	SUB ISU
1.	Teologia	1.1 Teologi Kontekstual Papua: Tidak optimalnya pengembangan dan implementasi yang mampu menjembatani iman Kristen dengan realitas sosial budaya (Relasi Injil dan Budaya)
		1.2 Spiritualitas, Keteladanan, dan Integritas: Menurunnya kualitas pelayan dan warga gereja dalam menghadapi masalah sosial-digital
		1.3 Teologi Profetis: Pengembangan yang belum optimal dalam mendorong gereja menghadirkan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi di Tanah Papua
		1.4 Ekoteologi: Kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan warga gereja
2.	Daya	2.1 Partisipasi Warga Jemaat: Menurunnya keterlibatan kaum awam dalam pelayanan
		2.2 Kemampuan Sumber Daya: Kompetensi yang dimiliki Pegawai Organik Gereja (POG) masih terbatas dalam menghadapi arus globalisasi
		2.3 Tata Kelola Organisasi: Kaderisasi pemimpin gereja yang masih





		belum optimal dan menggantung pada figur melaikan bukan pada sistem regenerasi
	2.4	Keteladanan: Pengembangan Talenta dan Karunia dalam pelayanan berbasis kontekstual mbelum maksimal
3.	Dana	3.1 Tata Kelola Keuangan: Singkronisasi antara program, kegiatan dan pendapatan/penerimaan
	3.2	Transformasi Struktur Kelembagaan: Terjadi penumpukan belanja modal pada aras struktur yang tidak efektif
	3.3	Ketidaktaatan Azas: Kesadaran dalam kewajiban penyetoran pendermaan secara berjenjang berdasarkan prosentase
	3.4	Potensi Gereja: Belum optimalnya potensi konvensional sebagai sumber daya gereja
	3.5	Tata Kelola Pengawasan: Belum efektifnya sistem pengawasan secara berjenjang dari aras Sinode hingga Jemaat
	3.6	Layanan Keuangan: Belum tertib dan merata penggunaan layanan digitalisasi keuangan gereja
	3.7	Kemandirian Ekonomi Warga Jemaat: Keterdesakan dan Keterhimpitan pelaku ekonomi karena sistem Syariah yang eksis
4.	Umum	4.1 Papua dalam Bingkai Merdeka: Gereja berkomitmen agar ideologi <i>Papua Merdeka</i> dan <i>NKRI</i> tidak mengorbankan jiwa umat, melainkan fokus utama pada pewartaan Injil dan kesejahteraan warga jemaat. Gerja fokus memperkuat kapasitas advokasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)
	4.2	Papua dalam Bingkai Otsus: Gereja merupakan mitra strategis pemerintah berhak menerima alokasi dana Otsus untuk pelayanan umat serta sebagai Lembaga pionir perintis Pendidikan
	4.3	Papua dalam Bingkai Pemekaran: Gereja menyoroti dampak negatif pemekaran daerah, potensi ketimpangan sosial, serta konflik yang sering muncul di wilayah pemekaran baru
	4.4	Papua dalam Pusaran HAM: Pelanggaran, Kejahatan, Modus Operasi Militer, Rasisme Terstruktur-Sistematis, dan relokasi warga gereja tanpa tujuan jelas
	4.5	Papua dalam Pusaran Eksplorasi dan Eksploitasi: Deforestasi lingkungan, pencaplokan hak ulayat, hak pengelolaan, hak atas royalty sumber daya alam, relokasi ruang hidup, dan keterancaman warga gereja
	4.6	Papua dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional (PSN): Pembukaan Lahan Baru, Cetak Sawah, Transmigrasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketersediaan Lapangan Pekerjaan yang diisi oleh Non OAP, 4 Satuan Brigade TNI Pembangunan Teritorial untuk Papua, 25 Satuan Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Papua
	4.7	Papua dalam Pusaran Demokrasi: Pembungkaman ruang demokrasi

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

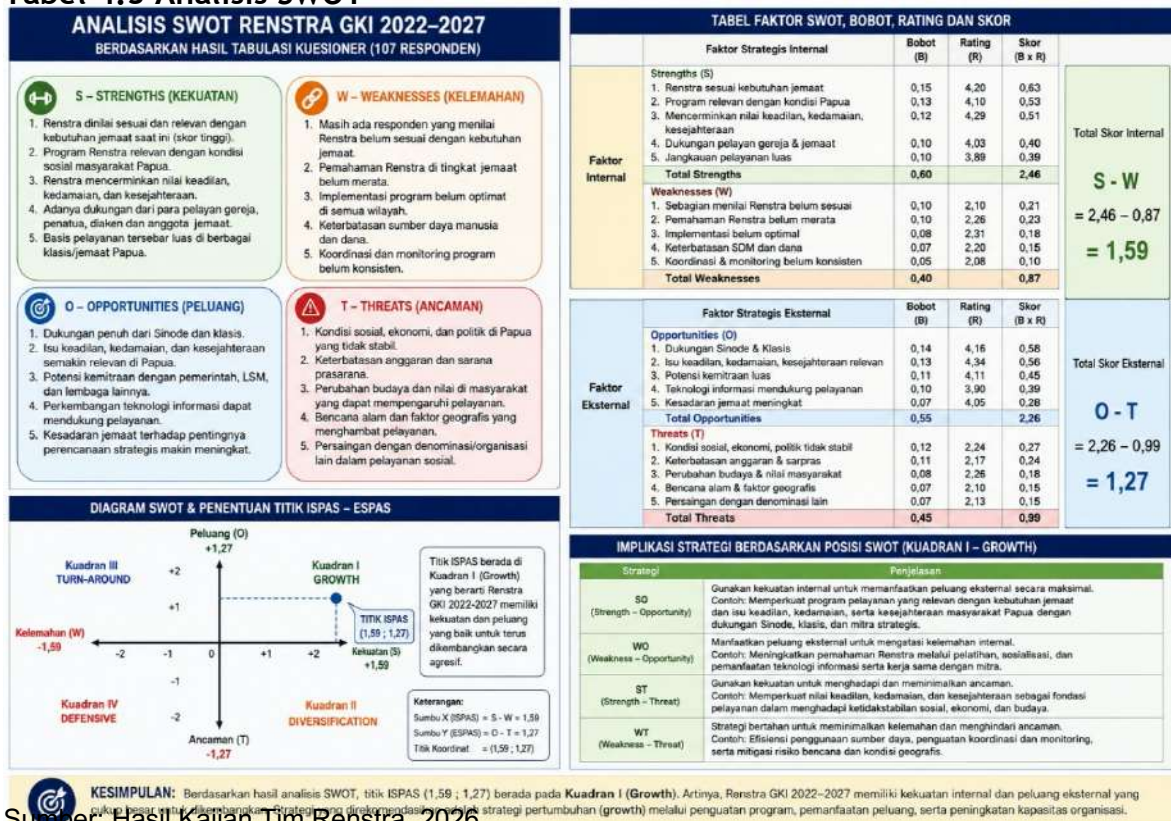
4.4 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. SWOT merupakan singkatan dari **Strengths (Kekuatan)**, **Weaknesses (Kelemahan)**, **Opportunities (Peluang)**, dan **Threats (Ancaman)**. Melalui analisis ini, organisasi dapat memahami kondisi yang dihadapi saat ini serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyusunan **Rencana Strategis (RENSTRA) Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua**, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kondisi pelayanan gereja secara menyeluruh, baik yang berasal dari lingkungan internal gereja maupun dari lingkungan eksternal masyarakat. Hasil analisis SWOT menjadi dasar



dalam menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, program pelayanan, serta langkah-langkah pengembangan gereja di masa mendatang yang dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4.3 Analisis SWOT





wilayah pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta belum konsistennya koordinasi dan monitoring program pelayanan.

Secara kuantitatif, total skor kekuatan (Strengths) sebesar **2,46**, sedangkan total skor kelemahan (Weaknesses) sebesar **0,87**. Selisih kedua skor tersebut menghasilkan nilai **$S - W = 1,59$** , yang menunjukkan bahwa kekuatan internal GKI jauh lebih besar dibandingkan kelemahannya.

4.4.2 Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman

Dari aspek eksternal, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh GKI untuk memperkuat pelayanannya. Peluang terbesar berasal dari dukungan Sinode dan Klasis, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, potensi kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya, serta perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung pelayanan gereja secara lebih efektif dan luas.

Namun demikian, gereja juga menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Ancaman tersebut meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang belum stabil di beberapa wilayah Papua, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, perubahan nilai dan budaya masyarakat akibat globalisasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta meningkatnya persaingan pelayanan dari denominasi atau organisasi lain.

Hasil penghitungan menunjukkan total skor peluang (*Opportunities*) sebesar **2,26**, sedangkan total skor ancaman (*Threats*) sebesar **0,99**. Selisih kedua skor tersebut menghasilkan nilai **$O - T = 1,27$** , yang menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki gereja masih lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi.

4.4.3 Posisi Strategis RENSTRA GKI

Berdasarkan hasil perhitungan SWOT, diperoleh koordinat posisi strategis sebesar:

- **$S - W = 1,59$**
- **$O - T = 1,27$**

Koordinat tersebut menempatkan RENSTRA GKI pada **Kuadran I (Growth Strategy)** atau strategi pertumbuhan. Posisi ini menunjukkan bahwa GKI di Tanah Papua berada dalam kondisi yang sangat baik karena memiliki kekuatan internal yang besar dan peluang eksternal yang tinggi.

Posisi *Growth* mengindikasikan bahwa gereja tidak berada dalam situasi bertahan (*survival*), melainkan dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan ekspansi pelayanan, pengembangan program, peningkatan kapasitas organisasi, serta inovasi pelayanan yang lebih luas dan berdampak.

4.4.4 Implikasi Strategis bagi RENSTRA GKI

Berdasarkan posisi tersebut, strategi yang direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan (*Growth Strategy*), yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang tersedia. Strategi ini dapat diwujudkan melalui:

1. Penguatan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat Papua.
2. Optimalisasi dukungan Sinode, Klasis, dan Jemaat seluruh perangkat pelayanan gereja.





3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia gereja melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi gereja.
5. Peningkatan kemitraan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi RENSTRA berjalan efektif.
7. Pemberdayaan jemaat sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program pelayanan.

Hasil Analisis SWOT menunjukkan bahwa **RENSTRA GKI di Tanah Papua Tahun 2022–2027 berada pada posisi yang kuat dan prospektif untuk berkembang.** Dengan skor internal sebesar **1,59** dan skor eksternal sebesar **1,27**, posisi RENSTRA berada pada **Kuadran I (Growth)** yang menandakan bahwa gereja memiliki kekuatan dan peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas dampak pelayanan, serta mewujudkan visi dan misinya di tengah masyarakat Papua. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat adalah strategi pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi, inovasi pelayanan, dan pemanfaatan peluang secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan masyarakat Papua.





Arah Kebijakan, Strategi, Program Prioritas, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

5.1 Pengantar

Bagian ini akan mendeskripsikan tentang Arah Kebijakan, Strategi, Program Prioritas, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032. Bagian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

5.2 Arah Kebijakan GKI

Arah kebijakan Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032 merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pelayanan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran Sinode GKI Di Tanah Papua pada tahun 2027-2032 yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032 dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032

NO.	Arah kebijakan		Deskripsi Kebijakan
AK.1.	Peningkatan Kualitas Pengajaran Teologi Kontekstual Papua	1.1	Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran yang berfokus pada kemampuan berpikir kritis di semua jejang Lembaga Pendidikan Kristen
		1.2	Peningkatan kompetensi, dan profesionalisme Pelayan Organik Gereja
		1.3	Integrasi <i>softskills</i> (keterampilan non-teknis) dalam medan pelayanan GKI di Tanah Papua
AK.2.	Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Kemitraan Antar Gereja	2.1	Penguatan peran dan kerjasama mitra gereja





	2.2	Penyelarasan dan pengembangan Kerjasama unggulan
	2.3	Pemantapan komitmen dan kapasitas antar Lembaga mitra
	2.4	Pemanfaatan bantuan/hibah Lembaga mitra
AK.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Gereja	3.1	Pembekalan pelayan gereja dengan keterampilan konseling dan pendampingan yang berempati
	3.2	Penerapan sistem pelayanan <i>Service Excellent: responsiveness</i> (tanggap), reliabilitas, dan keramahan untuk memastikan jemaat merasa didengar, dihargai, dan terlayani dengan baik
	3.3	Penggunaan sistem manajemen digital untuk memudahkan administrasi, pendaftaran ibadah, dan penyampaian informasi
	3.5	Perluasan Pelayanan Sosial dan Diakonia ke masyarakat sekitar (pembinaan karakter, bimbingan belajar, dan bantuan sosial)
	3.6	Persiapkan pemimpin dan pelayan muda secara terencana agar pelayanan terus relevan dengan perkembangan zaman
AK.4. Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Gereja, dan Strategi Pendanaan Yang Efektif	4.1	Peningkatan kualitas perencanaan keuangan gereja
	4.2	Efektivitas pemanfaatan anggaran
	4.3	Sinkronisasi perencanaan dan penyediaan biaya pelayanan
	4.4	Pengembangan Lembaga Ekonomi Gereja (LEG)
AK.5. Peningkatan Kualitas Akses Pendidikan	5.1	Pengendalian izin penyelenggaraan Pendidikan sesuai kebutuhan gereja
	5.2	Penguatan tata kelola pendidikan
	5.3	Penguatan Kapasitas dan akselerasi mutu Pendidikan
	5.4	Penguatan Budaya Mutu dan standar pelayanan
AK.6. Peningkatan Pendidikan Tinggi Kristen (PTK) yang berkualitas	6.1	Penguatan kompetensi dosen melalui publikasi ilmiah, penelitian, dan pemenuhan sertifikasi seperti Beban Kerja Dosen (BKD)
	6.2	Penggabungan penguasaan ilmu pengetahuan modern dengan fondasi nilai moral dan karakter Kristiani (integritas, disiplin, dan tanggung jawab).
	6.3	Perkuat kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah dan pihak strategis lainnya
AK.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pelayan Organik Gereja	7.1	Pembekalan teologis secara berkala yang diselaraskan dengan keterampilan manajerial modern (kepemimpinan dan komunikasi pastoral)
	7.2	Penguatan kapasitas literasi digital melalui Pelatihan penggunaan sistem informasi manajemen gereja (data jemaat digital, dan administrasi keuangan)
	7.3	Penguatan Kapasitas Pelayan berbasis kontekstual (pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan sosial-ekonomi jemaat setempat guna mendorong transformasi nyata)
	7.4	Penilaian kinerja berbasis target untuk





		memastikan pelayanan berjalan efektif dan tepat sasaran
	7.5	Penempatan pelayan organik berdasarkan bakat (Talent-Placement): (bidang diakonia, musik gerejawi, atau pendidikan Kristiani) untuk efektivitas maksimal
	7.6	Penetapan standar yang jelas terkait beban kerja, hak cuti, dan jaminan kebutuhan hidup bagi para pelayan organik
	7.7	Penguatan pastoral pelayan organik (pendampingan spiritual) serta ruang untuk beristirahat (retret berkala) agar terhindar dari kejenuhan (<i>burnout</i>)
AK.8.	Peningkatan Kualitas Spiritual, Ekologi, dan nilai universal	8.1 Pengembangan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat spiritual dan toleransi
	8.2	Pemanfaatan ruang ekologi sebagai sarana lintas budaya, lintas etnis, dan lintas agama
	8.3	Perlindungan warga gereja sebagai penguat harmoni dan penjaminan hak-hak sipil beragama
AK.9.	Peningkatan Kualitas karakter Warga Gereja	9.1 Pembinaan generasi muda (Gen Z) dengan pendekatan yang relevan dan kreatif agar dapat menerapkan etika moral Kristen
	9.2	Pembekalan orang tua dengan pemahaman teologis dan psikologis agar dapat menjadi teladan dan pembimbing kerohanian yang baik bagi anak-anak
	9.3	Penguatan lingkungan gereja yang inklusif, saling mendukung, dan penuh kasih.
	9.4	Pengembangan program aksi sosial yang melatih jemaat untuk peka terhadap penderitaan dan kebutuhan sesama
	9.5	Pemuridan yang konsisten, berfokus pada aplikasi praktis ajaran Alkitab
	9.6	Penguatan setiap perkataan dan perbuatan jemaat selaras dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar
	9.7	Penguatan kepribadian diri untuk beribadah secara teratur dan hidup dalam kesucian
	9.8	Penguatan sinergitas pembentukan karakter yang utuh antara gereja, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan
AK.10.	Peningkatan Kualitas dan kapabilitas Tata Kelola organisasi gereja yang efektif, transparan, dan akuntabel	10.1 Penerapan Standar Baku Akuntansi (Standarisasi pelaporan Keuangan) mencakup laporan posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
	10.2	Penerapan Publikasi Berkala untuk laporan keuangan secara rutin (bulanan/tahunan) kepada jemaat untuk menjamin transparansi horizontal
	10.3	Penguatan tugas dan wewenang pengelola keuangan dan auditor keuangan gereja
	10.4	Penerapan digitalisasi administrasi dan keuangan (Perangkat lunak dan transparansi digital)
	10.5	Penguatan Auditor dan Pengawasan Internal (Auditor Internal dan Evaluator Program)





AK.11. Peningkatan Kualitas Penelitian Pengembangan dan Kebijakan Gereja	11.1	Pembaruan Dokumen Gereja yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) GKI di Tanah Papua yang secara berkelanjutan dievaluasi guna merespons dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual jemaat
	11.2	Pelatihan Analisis Sosial (Bimtek) Metode Analisis Sosial bagi pelayan dan jemaat guna memetakan kondisi ril di berbagai medan pelayanan
	11.3	Penguatan Kapasitas Advokasi: Integrasi hasil riset dengan program pelatihan untuk memperkuat kepekaan dan kapasitas pelayan Gereja
	11.4	Restrukturisasi & Pemekaran: Kebijakan strategis berbasis data untuk pemekaran jemaat dan penggabungan yayasan demi memaksimalkan pelayanan operasional
AK.12. Peningkatan Kualitas Pengajaran Liturgi dan Musik Gereja	12.1	Pembaruan Tata Ibadah melalui penyelarasan Tata Gereja dan buku panduan liturgi untuk menyatukan standar pelayanan di seluruh jemaat
	12.2	Penguatan Liturgi Kontekstual melalui pelaksanaan ibadah bernuansa budaya lokal (misalnya pada ibadah minggu ke-IV), serta integrasi unsur musik tradisional Papua seperti tifa ke dalam peribadahan
	12.3	Peningkatan Kapasitas Musik & Liturgi melalui penyelenggaraan pelatihan vokal, dirigen, dan alat musik bagi pemuda gereja, serta pembekalan khusus untuk pelayan ibadah agar lebih memahami teologi dan sejarah musik gerejawi
	12.4	Pendekatan Akademis Teologi: Pengkajian dan pembaruan kurikulum liturgi di institusi teologi (STFT GKI "I.S. Kijne") agar pengajaran semakin berakar pada konteks sosial budaya Papua

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

5.3 Strategi

Strategi merupakan sebuah rencana menyeluruh dan jangka panjang tentang cara atau arah yang dipilih untuk mencapai tujuan utama dan bersifat terus menerus, mengalami peningkatan, serta dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diinginkan oleh Sinode GKI di tanah Papua di masa depan. Sementara itu, program strategis merupakan tindakan nyata atau inisiatif spesifik berskala tertentu yang dirancang untuk memandu, mewujudkan strategi, menjembatani target, dan mencapai sejumlah target baik jangka pendek, menengah, dan panjang dengan operasional sehari-hari dari Sinode GKI di Tanah Papua.

Dalam rangka menjalankan kedua belas arah kebijakan di atas, maka Sinode GKI di Tanah Papua memiliki strategi melalui 12 Program Strategis sebagai berikut.

Tabel 5.2 Program Strategis Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032

NO.	Nama Program Strategis
PS.1.	Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja
PS.2.	Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja





PS.3.	Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja
PS.4.	Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau
PS.5.	Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja
PS.6.	Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi keuangan gereja berbasis digital
PS.7.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
PS.8.	Penguatan layanan diakonia, advokasi, dan supermasi hukum
PS.9.	Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja
PS.10.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gereja
PS.11.	Pembinaan Generasi muda, dan pendidikan kader
PS.12.	Penguatan Peran Gereja dalam Pelestarian Ciptaan, Keadilan Ekologis, dan Pembangunan Berkelanjutan.

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

5.4 Program Prioritas

Program prioritas dalam dokumen ini merupakan kebijakan atau serangkaian kegiatan yang bersifat strategis, berskala pendek, menengah, dan besar, yang memiliki urgensi tinggi untuk mencapai target pelayanan dalam Sinode GKI di Tanah Papua Tahun 2027-2032. Program Prioritas ini dirancang agar menyentuh langsung kepentingan Sinode GKI di Tanah Papua dan memberikan dampak luas kepada warga gereja. Program prioritas ini memiliki tujuan dan karakteristik yang mencakup: (1) Signifikan dan Strategis (berfungsi sebagai katalis utama untuk mencapai sasaran pelayanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang; (2) Fokus pada Dampak (berorientasi langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar warga gereja, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan pelayanan kesehatan warga gereja); dan (3) Lintas Departemen/Komisi/Urusan (membutuhkan kolaborasi dari berbagai departemen/komisi/urusan dan mitra secara terintegrasi). Berdasarkan pandangan dan 10 (kesepuluh) program strategis Sinode GKI di Tanah Papua di atas, maka lahirlah 8 (delapan) program prioritas Sinode GKI di Tanah Papua sebagai berikut:

Tabel 5.3 Program Prioritas Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032

NO.	Nama Program Prioritas
PP.1.	Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja
PP.2.	Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja
PP.3.	Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja
PP.4.	Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja
PP.5.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
PP.6.	Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja
PP.7.	Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi dan keuangan gereja berbasis digital.
PP.8.	Penguatan peran gereja dalam pelestarian ciptaan, keadilan ekologis, dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

5.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dalam dokumen ini merupakan seperangkat instrument atau aturan hukum dalam Sinode GKI di Tanah Papua yang berlaku dan mendukung kelancaran program dan/atau kegiatan yang tertuang dalam dokumen arah dan kebijakan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032. Kerangka regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi tata Kelola organisasi dalam Sinode GKI di





Tanah Papua serta bersifat antisipatif. Untuk itu, regulasi yang dimaksud harus baik secara kualitas dan ditentukan oleh muatan dan prosedur pembentukan yang baik pula. Dalam mendapatkan materi muatan regulasi yang baik, perlu dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. *Pertama, Perencanaan.* Pada tahap ini semua unit organisasi di bawah Sinode GKI di Tanah Papua baik selaku pemrakarsa maupun penyelenggara program dan kegiatan wajib mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan. *Kedua, Penyusunan.* Pada tahap ini, pemrakarsa dan penyelenggara melakukan penyusunan usulan kegiatan dan anggaran dengan melibatkan pihak lain yang sangat memahami kondisi medan pelayann. *Ketiga, Pembahasan.* Pada tahap ini, dilakukan pembuatan konsep dan harmonisasi yang dilakukan bersama dengan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua untuk memastikan materi muatan dalam program/kegiatan yang selaras dan tidak bertentangan dengan arah dan kebijakan Sinode GKI di Tanah Papua. *Keempat, Pengesahan atau penetapan.* Pada tahap ini dilakukan pengesahan atau penetapan terhadap rancangan regulasi, program dan kegiatan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. *Kelima, Implementasi.* Pada tahap ini, materi rancangan regulasi, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat dijalankan karena telah mendapatkan kekuatan hukum dan mengikat.

Tabel 5.4 Rancangan Produk Regulasi Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032

NO.	Nama Produk Regulasi
1.	Peraturan tentang Struktur Organisasi Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032
2.	Peraturan tentang Kepegawaian (Pegawai Organik Gereja)
3.	Peraturan tentang Perbendaharaan dan Pengawasan GKI
4.	Peraturan tentang Yayasan, Lembaga, dan Badan Usaha GKI
5.	Peraturan tentang Pengelolaan 10 % Dana Pendidikan GKI
6.	Peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gereja (APBG)
7.	Peraturan tentang Standar Biaya Minimum Gereja (SBMG)
8.	Peraturan tentang Kerjasama Gereja
9.	Peraturan tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
10.	Peraturan tentang Perjalanan Dinas Gereja

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026



5.6 Kerangka Kelembagaan (*Struktur Organisasi*)

Dalam rangka mencapai visi teologi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program strategis Sinode GKI di Tanah Papua perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses tata Kelola/tata laksana, dan sumber daya pegawai organik gereja yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik pada level sinode, sinode resort dan jemaat. Untuk itu, kegiatan penataan dan penguatan kelembagaan, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang terjangkau. Struktur organisasi sebagai refleksi kelembagaan merupakan fakta yang kondisinya dapat berubah menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun internal. Organisasi gereja yang tepat fungsi, tepat prooses, dan tepat ukuran (*rightsizing*) adalah organisasi yang sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Tata Gereja Sinode GKI di Tanah Papua sesuai dengan proses hubungan dan analisis beban kerja organisasi. Dengan demikian upaya transformasi kelembagaan didasarkan pada empat pertimbangan *pragmatis-teologis*, yakni (1) mandatoris sidang sinode dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, (2) arah pengembangan, lingkungan strategis, dan prioritas pelayanan, (3) Tata Gereja dan kebijakan fungsi kelembagaan, dan (4) partisipasi warga gereja, dunia usaha, dan koordinasi antar lembaga mitra dalam dan luar negeri.

Struktur organisasi yang diproyeksikan akan berubah dalam sidang Sinode Wondama sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 5.1 Kondisi Sumber Daya GKI



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua

Struktur ini mengarahkan Renstra untuk membangun rencana, sasaran strategi, program dan kegiatan mengikuti struktur yang telah didesain ini secara hirarki. Pada aras jemaat struktur yang dibangun struktur pelayanan sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 5.2. Struktur Pelayanan Berbasis Jemaat



Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

6.1 Pengantar

Bagian ini akan mendeskripsikan tentang Target Kinerja, Indikator Kinerja, dan Kerangka Pendanaan Sinode GKI Di Tanah Papua 2027-2032. Bagian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

6.2 Target Kinerja

Dalam mewujudkan visi teologi, dan misi Sinode GKI di Tanah Papua serta mendukung tercapainya kebijakan pada aras sinode dan jemaat, maka Sinode GKI di Tanah Papua menetapkan 10 Program Strategis dan 6 Program Prioritas Utama dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama atau tambahan sebagai berikut:

T.1 Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.2 Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan





--	--	--	--	--	--	--

T.3 Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.4 Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.5 Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.6 Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi keuangan gereja berbasis digital dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan





T.7 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.8 Penguatan layanan diakonia, advokasi, dan supermasi hukum dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.9 Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan

T.10 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gereja dapat diproyeksi dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2027)	Target Kinerja (2032)	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program/kegiatan





6.3 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis program dan kegiatan Sinode GKI di Tanah Papua, maka telah ditetapkan berbagai dukungan sumber daya terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan bersumber dari warga gereja, bantuan atau hibah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun mitra kerja sama gereja. Kerangka pendanaan dalam dokumen arah kebijakan dan rencana strategis Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang telah dimandatkan dalam Sidang Sinode XIX Tahun 2027 berdasarkan prosedur tata kelola keuangan yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan gereja.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rupiah)					Total
	2027	2028	2029	2030	2031	
Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja						
Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja						
Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja						
Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau						
Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja						
Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi keuangan gereja						
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan						
Penguatan layanan diakonia, advokasi, dan supermasi hukum						
Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja						
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gereja						

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026



**Tabel 6.2 Proyeksi Penerimaan Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032**

Kode MA	Jenis Penerimaan	Proyeksi Penerimaan (Rupiah)				
		2027	2028	2029	2030	2031
A.	Pendapatan Rutin					
401	Pendapatan SWJ40%					
402	Pendapatan Persepuluhan					
403	Pendapatan Aksi Dana Kemandirian(ADK2					
404	Pendapatan Dana Pensiun					
405	Pendapatan Dana Kesehatan					
406	Pendapatan Asset GKI					
407	Pendapatan Usaha Sinode					
408	Pendapatan Dana Abadi					
409	Pendapatan Aksi Seratus Ribu					
B.	Pendapatan					
410	Pendapatan Mitra Luar Negeri					
411	Pendapatan Bantuan Pemerintah Pusat					
412	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua					
413	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua Barat					
4.14	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua Barat Daya					
4.15	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua Barat Selatan					
4.16	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua Tengah					
4.17	Pendapatan Bantuan Pemda Provinsi Papua Pegunungan					
418	Pendapatan Bantuan Pemda Kabupaten/Kota					
C.	Pendapatan Lain-Lain					
419	Pendapatan Bunga Bank					
4.20	Pendapatan Lain-Lain					
	Jumlah A+B+C					

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026





Tahun Gereja dan Tema Tahun Pelayanan

7.1 Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan tentang Tahun Gereja dan Tema Tahun Pelayanan Gereja sebagai sebuah kesatuan sistem dalam menetapkan proses perencanaan, program dan kegiatan dalam Sinode GKI di Tanah Papua. Kedua bagian tentang tahun gereja dan tema tahun pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut.

7.2 Tahun Gereja

Tahun gereja merupakan tahun yang menandai peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah meliputi siklus perayaan tahunan untuk mengenang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus serta peristiwa gereja lainnya di lingkungan Sinode GKI Di Tanah Papua. Tahun gereja juga dapat diimplementasikan dalam bentuk warna liturgi (tata ibadah).

Tabel 7.1 Tahun Gereja dalam Sinode GKI di Tanah Papua

No.	Waktu	Kegiatan
1.	1 Januari	Ibadah Pembukaan Awal Tahun Baru Masehi (Warna Gerejawi Putih) Hari Pembaptisan Orang Papua
2.	5 Februari	Ibadah Perayaan HUT PI di Tanah Papua ke-..... (Warna Gerejawi Merah)
3.	1 Maret	Perayaan Hari Doa Sedunia
4.	8 Maret	Perayaan HUT YPK di Tanah Papua
5.		Ibadah Jumat Agung (Warna gerejawi hitam/Ungu)
6.		Ibadah Perayaan Paskah I (Warna gerejawi Putih)
7.		Ibadah Perayaan Paskah II (Warna gerejawi Putih)
8.		Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus
9.		Ibadah Minggu/Pentakosta I
10.		Ibadah Pentakosta II
11.	5 Juni	Ibadah Perayaan HUT Persekutuan Ibu-Ibu Sara ke-...
12.	2 Juli	Perayaan Hari Doa Syukur Sekolah Minggu GKI
13.	26 Juli	Perayaan Hari Doa Syukur PW GKI
14.	21 September	Perayaan HUT STT GKI IS Kijne-...
15.	Oktober	Hari Perjamuan Kudus se-Dunia





16.	26 Oktober	Ibadah Perayaan HUT GKI di Tanah Papua ke-...
17.	31 Oktober	Perayaan Hari Lahirnya Reformasi Gereja Protestan di Dunia ke-...
18.	9 November	Perayaan Hari Doa Syukur PKB GKI
19.	15 November	Perayaan Hari Doa Wanita se-Asia
20.	7 Desember	Perayaan hari Lingkungan Hidup GKI di Tanah Papua
21.	18 Desember	Perayaan Hari Doa Syukur PAM GKI
22.	24 Desember	Ibadah Perayaan Malam Kudus (Warna Gerejawi Putih)
23.	25 Desember	Ibadah Perayaan Natal I (Warna Gerejawi Putih)
24.	26 Desember	Ibadah Perayaan Natal I (Warna Gerejawi Putih)
25.	31 Desember	Ibadah Akhir Akhir Tahun Pelayanan (Warna Gerejawi Putih)

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026

7.3 Tema Tahun Pelayanan

Tema merupakan salah satu fokus utama atau gagasan pokok yang mengandung ide sentral dan menjadi motor penggerak atau ciri khas program organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sinode GKI di Tanah Papua senantiasa mengusung tema-tema sentral terkait Amanat Agung dan pembebasan yang holistik. Dalam setiap renstra (Rencana Strategis) lima tahunannya, tema utamanya berakar pada **Missio Dei 'misi Allah'** untuk memberitakan peradaban baru yang membawa keselamatan, pembebasan dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di Tanah Papua.

Tema Tahun Pelayanan merupakan landasan pelayanan yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagai panduan arah pelayanan, program, dan pengajaran selama satu tahun pelayanan. Tema Tahun Pelayanan berfungsi sebagai: (1) media dalam menyelaraskan visi teologis dengan kegiatan pelayanan yang nyata; (2) arah program: menjadi pedoman dasar dalam merancang seluruh kegiatan gereja, mulai dari ibadah, aksi sosial (diakonia), hingga pendidikan; (3) Fokus Pengajaran: mengarahkan materi khotbah, pendalaman Alkitab, dan pembinaan jemaat agar relevan dengan kebutuhan rohani terkini; dan (3) kesatuan jemaat: menyatukan visi dan langkah seluruh pelayan, departemen, komisi, urusan dan anggota jemaat dalam kurun waktu satu tahun. Komponen umum dalam menentukan Tema Tahun Pelayanan biasanya terdiri atas: (1) landasan alkitabiah sebagai dasar teologis, (2) slogan atau frasa singkat yang mudah diingat, dan (3) teks dan konteks yang mengungkap sebuah tema diusung, tantangan yang ingin dijawab, dan tujuan praktis yang ingin dicapai. Tema Tahun Pelayanan dalam Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.2 Tema Tahun Pelayanan dalam Sinode GKI di Tanah Papua

Tahun	Tema Tahun Pelayanan	Makna Tema
2027-2028	Transformasi	Perubahan sistem pelayanan, administrasi dan tata kelola gereja menuju pelayanan yang efektif, digital dan kontekstual
2028-2029	Kolaborasi	Penguatan kemitraan antara gereja, pemerintah, masyarakat adat, pendidikan dan lembaga oikumene
2029-2030	Kemandirian	penguatan ekonomi jemaat, optimalisasi aset gereja dan pemberdayaan sumber daya lokal
2030-2031	Keutuhan Ciptaan	Pelayanan ekologis, perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial gereja terhadap tanah Papua
2031-2032	Pengutusan	Penguatan misi gereja, kaderisasi pelayan dan pengutusan warga jemaat menjadi saksi Kristus di berbagai bidang kehidupan

Sumber: Hasil Kajian Tim Renstra, 2026





Struktur Program dan Anggaran

8.1. Pengantar

Bagian ini menjelaskan tentang struktur program dan anggaran berbasis pada sasaran strategis, program prioritas, kegiatan utama, indikator, out put, out come dan anggaran.

Tabel 8.1. Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran					
								2027	2028	2029	2030	2031	2032



**Tabel 8.2. Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja**

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran					
								2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.3. Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.4. Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.5. Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032



**Tabel 8.6. Pengembangan inovasi penatalayanan administrasi keuangan gereja berbasis digital**

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.7. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.8. Penguatan layanan diakonia, advokasi, dan supermasi hukum

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032

Tabel 8.9. Penguatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan gereja

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032





Tabel 8.10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gereja

Sasaran Strategis	Program Prioritas	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2026	Target 2032	Output	Outcome	Anggaran 2027	2028	2029	2030	2031	2032





Proyeksi Rencana Pembangunan Sinode GKI di Tanah Papua

9.1 Pengantar

Bagian ini akan menjelaskan tentang Rencana Pembangunan Lima tahun, Dua Puluh Tahun, dan Seratus Tahun dalam Sinode GKI DI Tanah Papua.

9.2 Proyeksi Pembangunan Lima Tahun

Adapun rencana pembangunan pelayanan dalam Sinode GKI di Tanah Papua 2027-2032 yang dapat digambarkan secara sederhana dan informatif dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.1 Program Strategis 1

PS.1	Peningkatan dan Pemberdayaan Spiritualitas Warga Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						



**Tabel 9.2 Program Strategis 2**

PS.2	Dukungan Manajemen dan Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Tabel 9.3 Program Strategis 3

PS.3	Penguatan Sistem dan Sumber Daya Organik Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Tabel 9.4 Program Strategis 4

PS.4	Pemerataan Akses Pelayanan yang berkualitas dan terjangkau					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						





6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Tabel 9.5 Program Strategis 5

PS.5	Peningkatan, Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Tabel 9.6 Program Strategis 6

PS.6	Pengembangan inovasi penatalayanan adminsitasi keuangan gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Tabel 9.7 Program Strategis 7

PS.7	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						





Rincian Kegiatan	
No.	Uraian Kegiatan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Tabel 9.8 Program Strategis 8

PS.8	Penguatan Layanan Diaconia, Advokasi, dan Supermasi Hukum					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Tabel 9.9 Program Strategis 9

PS.9	Penguatan Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						



**Tabel 9.10 Program Strategis 10**

PS.10	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Gereja					
TARGET KINERJA						
No.	Indikator	2027	2028	2029	2030	2031
1.						
2.						
3.						
	Rincian Kegiatan					
No.	Uraian Kegiatan					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

9.3 Proyeksi Pembangunan Dua Puluh Tahun

Dalam rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun, yakni 2027-2045 atau biasanya disebut pembangunan jangka menengah dalam Sinode GKI di Tanah Papua, maka ada 6 (enam) bidang strategis yang perlu diprediksi dan diantisipasi perkembangannya sebagai referensi untuk menyusun strategi yang tepat bagi perjalanan pelayanan GKI di Tanah Papua. Ada terdapat enam bidang tersebut terdiri atas: (1) Ekonomi, (2) Politik, (3) Teknologi, (4) Sosial Budaya, (5) Lingkungan Hidup, dan (6) Perilaku Beragama. Keenam bidang tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

9.3.1 Bidang Ekonomi

Pada periode 2027–2045, Gereja di Indonesia dihadapkan pada paradoks: Indonesia yang semakin makmur secara ekonomi, namun semakin kompleks secara psikologis, teknologi, dan demografis. Lembaga Kristen tidak boleh bersikap reaktif. Peta jalan (*roadmap*) menuju 2045 harus disusun dengan menyeimbangkan antara pemeliharaan iman yang ortodoks (tetap setia pada Alkitab) dan metode pelayanan yang sangat relevan secara konteks zaman (*highly contextual*).

Menyongsong periode 2027–2045, lanskap ekonomi global dan nasional akan mengalami pergeseran struktural yang sangat masif. Periode ini mencakup fase kritis penutupan bonus demografi Indonesia (2030-an) hingga target pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Bagi lembaga Kristen dan Gereja di Indonesia, perubahan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan perubahan medan pelayanan (*field of ministry*). Struktur jemaat, kapasitas finansial sinode/gereja lokal, hingga bentuk-bentuk masalah sosial-pastoral yang dihadapi akan berubah total. Analisis prediksi ekonomi global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.



**Tabel 9.11 Analisis Prediksi Ekonomi Global dan Nasional**

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Ekonomi Global & Nasional (2027–2045)		
1.1	Otomatisasi Masif & Pergeseran Pasar Tenaga Kerja (<i>The AI & Automation Era</i>)	Integrasi Kecerdasan Buatan (AI), robotik, dan bioteknologi akan mencapai puncaknya. Lapangan kerja administratif, manufaktur konvensional, dan posisi middle-management berkurang drastis. Pasar kerja bergeser ke arah	Indonesia membutuhkan jutaan talenta digital. Generasi muda yang tidak memiliki keterampilan adaptif atau <i>lifelong learning culture</i> akan terjebak dalam pengangguran struktural, meskipun Indonesia berada di akhir masa bonus demografi.
1.2	Transisi Demografi: Urbanisasi <i>Mega-Urban & Aging Population</i>	Pada tahun 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, membentuk kawasan mega-urban (peri-urban). Di sisi lain, setelah tahun 2035, struktur masyarakat Indonesia mulai memasuki fase	Terjadinya kepadatan luar biasa di perkotaan yang memicu masalah kesehatan mental, kesepian (<i>loneliness epidemic</i>), dan tekanan biaya hidup (perumahan). Sementara itu, daerah pedesaan akan mengalami kekosongan usia produktif.
1.3	Lompatan Indonesia ke Negara Berpendapatan Tinggi (<i>High-Income Country</i>)	Bappenas memproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD 23.000–30.300 pada 2045, menempatkan Indonesia di 5 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh kelas menengah yang mendominasi hingga 70-80% populasi (<i>consuming class</i>).	Munculnya budaya konsumen yang sangat kuat, sekularisme yang dipicu oleh kemakmuran material, dan tuntutan standar hidup yang lebih tinggi. Namun, risiko ketimpangan (meski indeks Gini ditekan) tetap ada pada kelompok yang gagal naik kelas
1.4	Ancaman Krisis Iklim dan Finansial Hijau (<i>Green Economy</i>)	Regulasi global terkait emisi karbon akan sangat ketat menuju Net Zero Emission 2050. Sektor ekonomi tradisional yang merusak lingkungan akan dipinalti secara finansial. Sektor agraris dan pesisir Indonesia akan sangat rentan terhadap perubahan iklim.	

No.	Komponen Analisis	Antisipasi	Strategi
2.	Implikasi & Antisipasi Strategis untuk Lembaga Kristen dan Gereja		
	Gereja harus bertransformasi dari sekadar institusi ritual-kolektif menjadi institusi yang tangguh secara ekonomi, relevan secara sosial, dan adaptif secara teknologi		
2.1	Transformasi Model Keuangan Gereja (Resiliensi Finansial). Model pendapatan gereja yang 100% bergantung pada persembahan konvensional (kantong kolekte mingguan) berisiko tidak stabil akibat perubahan struktur kerja jemaat (pekerja lepas/gig economy, digitalisasi).	Diversifikasi Aset Produktif: Lembaga Kristen dan sinode perlu mengalihkan sebagian aset non-produktif (tanah/bangunan kosong) menjadi aset produktif melalui investasi berbasis <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG) atau unit usaha sosial (<i>social enterprise</i>)	<i>Digital Endowment Fund</i> (Dana Abadi): Membangun dana abadi yang dikelola secara profesional untuk membiayai operasional misi dan penggajian hamba Tuhan di daerah tertinggal, sehingga pelayanan tidak terganggu guncangan ekonomi jangka pendek
2.2	Redesain Pelayanan Pastoral untuk Kelas	Pastoral Kesehatan Mental & Komunitas Intim: Gereja di kota	Pelayanan untuk Senior (<i>Golden Age Ministry</i>): Membangun



	Menengah Urban & Lansia. Struktur jemaat 2027–2045 akan didominasi oleh kelas menengah urban yang sibuk/stres tinggi, serta kelompok lansia yang membutuhkan perawatan khusus	besar harus memperkuat pelayanan konseling profesional, manajemen stres, dan teologi kerja (theology of work) untuk membantu jemaat menghadapi tekanan korporat/AI. Komunitas sel kecil (sel grup) akan lebih efektif daripada ibadah massal besar	infrastruktur pelayanan lansia yang holistik, termasuk penyediaan <i>daycare</i> lansia Kristen, komunitas aktif, dan konseling persiapan masa pensiun agar lansia tetap produktif secara spiritual dan sosial
2.3	Reorientasi Pendidikan dan Beasiswa. Fokus pada Keahlian Masa Depan Tantangan: Lembaga pendidikan Kristen sekolah/universitas) terancam gulung tikar jika tetap mempertahankan kurikulum konvensional yang tidak menjawab kebutuhan pasar kerja 2030-2045	Beasiswa Transformatif: Mengalihkan fokus beasiswa gereja dari sekadar "bantuan SPP" menjadi beasiswa strategis di bidang data science, AI, green technology, dan kewirausahaan sosial.	Pusat Pelatihan Kerja Digital (Vocational Centers): Gereja lokal dapat memanfaatkan ruang-ruang kelas kosong di hari kerja untuk menjadi tempat pelatihan upskilling dan reskilling bagi pemuda kelas ekonomi bawah agar mereka tidak tergilas oleh otomatisasi
2.4	Pergeseran Misi Sosial: Dari Karitatif ke Pemberdayaan Ekonomi. Model pelayanan diakonia karitatif (memberi sembako/bantuan instan) tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan struktural baru di era modern	Gereja sebagai Inkubator UMKM: Mengingat 70% masyarakat akan menjadi consuming class, gereja dapat berperan sebagai ekosistem pendukung UMKM jemaat melalui pelatihan literasi keuangan, digital marketing, dan akses ke modal mikro internal (misal melalui koperasi gereja yang dikelola modern).	Misi Ekologis (<i>Eco-Mission</i>): Mengintegrasikan kesadaran lingkungan ke dalam kotbah dan aksi nyata (gereja ramah lingkungan, pengurangan plastik, pengelolaan sampah mandiri). Ini penting karena isu lingkungan adalah titik temu krusial bagi generasi muda (Gen Z dan Alpha).

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.3.2 Bidang Politik

Menuju 2045, politik tidak akan menjadi semakin sederhana, melainkan semakin berjejaring dan berbasis digital. Gereja di Indonesia dipanggil untuk tidak menjadi penonton yang cemas, melainkan menjadi mitra dialog yang kritis, objektif, dan konstruktif bagi pemerintah. Dengan mempersiapkan pemilih muda yang cerdas politik, menjaga independensi mimbar, dan mempererat solidaritas lintas iman, Gereja akan mampu menjaga perannya sebagai jangkar kedamaian dan keadilan di bumi Nusantara. Analisis prediksi politik global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.12 Analisis Prediksi Politik Global dan Nasional

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Politik Global (2027–2045)		
1.1	Lanskap Multi-Polar & "Perang Dingin Baru" di Asia Pasifik	Dominasi tunggal Amerika Serikat akan sepenuhnya bergeser menjadi tatanan dunia multi-polar. Fokus utama ketegangan politik dunia	Indonesia akan berada di bawah tekanan konstan untuk memilih sekutu. Keamanan maritim di sekitar Laut Natuna Utara akan tetap



		berada di kawasan Asia-Pasifik, ditandai oleh rivalitas ketat antara AS dan Tiongkok (serta poros sekutunya masing-masing) untuk memperebutkan pengaruh ekonomi dan militer di Asia Tenggara	menjadi titik panas regional yang menguras energi politik domestik
1.2	Tekno-Nasionalisme & Pengawasan Digital (<i>Digital Surveillance</i>)	Pemerintah di seluruh dunia akan semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan mahadata (big data) dalam sistem pemerintahan. Kontrol politik tidak lagi hanya lewat militer fisik, melainkan melalui algoritma media sosial, pelacakan data personal, dan pengawasan digital atas nama stabilitas nasional	Privasi warga negara berpotensi menyempit. Narasi publik di ruang digital akan semakin mudah dimanipulasi oleh otoritas atau kelompok kepentingan politik tertentu melalui cyber-troops dan algoritma
2. Tren Politik Nasional (2027–2045)			
2.1	Pergeseran Demografi Pemilih (Dominasi Gen Z & Gen Alpha)	Memasuki tahun 2030 hingga 2045, panggung politik praktis Indonesia akan sepenuhnya dikendalikan oleh generasi digital (digital natives), yakni Gen Z dan Gen Alpha. Karakteristik pemilih masa depan ini cenderung kurang terikat pada sentimen partai politik tradisional, lebih peduli pada isu-isu riil (keadilan sosial, hak asasi manusia, perubahan iklim, lapangan kerja), namun sangat rentan terhadap polarisasi instan di media sosial	
2.2	Desentralisasi Politik Baru pasca-IKN (Ibu Kota Nusantara)	Pemindahan pusat pemerintahan ke IKN (Kalimantan) akan selesai secara bertahap dan melahirkan episentrum politik baru di luar Jawa. Pengambilan keputusan strategis nasional berpindah ke Kalimantan, sementara Jakarta bertransaksi murni sebagai pusat bisnis. Hal ini akan mengubah arah lobi politik dan peta pengaruh kelompok keagamaan di tingkat nasional.	
2.3	Normalisasi Populisme Keagamaan dan Konservatisme Modern	Sentimen agama akan tetap menjadi komoditas politik yang murah dan efektif dalam pemilu-pemilu mendatang (Pilpres & Pilkada). Bedanya, kemasan populisme ini akan bertransformasi menjadi lebih modern, canggih secara digital, dan berbasis gerakan komunitas urban, bukan lagi sekadar mobilisasi massa tradisional di lapangan terbuka.	
3.	Antisipasi Strategis yang Perlu Dipersiapkan Lembaga Gereja. Menghadapi realitas di atas, Gereja di Indonesia harus menanggalkan paradigma politik yang pasif ("asal aman") atau sebaliknya, terlalu larut dalam politik praktis transaksional. Gereja perlu membangun ketahanan politik yang matang (<i>political resilience</i>).		
3.1	Pendidikan Politik Kenabian (<i>Prophetic Politics</i>) untuk Pemuda	Gereja harus aktif menyelenggarakan pendidikan politik yang sehat, bukan untuk mengarahkan jemaat memilih figur atau partai tertentu, melainkan mengajarkan etika publik berbasis Alkitab. Pemuda gereja harus didorong untuk masuk ke ruang-ruang publik (birokrasi, partai politik, LSM) sebagai perwujudan tugas "garam dan terang", guna memastikan kebijakan negara tetap berkeadilan sosial.	
3.2	Redesain Kemitraan Hubungan Gereja-Negara (Institusional). Dengan bergesernya pusat politik ke IKN, konstelasi pengambilan kebijakan nasional akan berubah. Kedekatan geografis lembaga gereja tingkat pusat (seperti sinode atau persekutuan gereja) dengan pusat kekuasaan baru menjadi faktor penting		
		Strategi Gereja: Lembaga aras nasional (seperti PGI, KWI, PGLII, PGPI, PBI, Advent Hari Ketuuuh, Bala Keselamatan, Gereja Ortodoks Indonesia) perlu memperkuat representasi strategis mereka di wilayah IKN dan luar Jawa. Selain itu, gereja harus membangun pola advokasi kebebasan beragama yang	





	berbasis pada konstitusi dan hukum formal, bukan lagi sekadar bersandar pada jaminan "hubungan baik" dengan oknum pejabat tertentu secara personal yang bisa berganti setiap lima tahun
3.3	Penguatan Transformasi Digital Melawan Polarisasi. Tantangan: Konflik horizontal yang dipicu oleh isu SARA di media sosial diperkirakan akan tetap tajam menuju 2030-an akibat algoritma internet yang menciptakan <i>echo chamber</i> (ruang gema yang memperkuat bias). Strategi Gereja: Gereja perlu membentuk unit <i>Digital Ministry</i> yang tidak hanya bertugas menyiarkan ibadah, tetapi juga memproduksi konten-konten perdamaian, edukasi literasi digital, dan pencegahan hoaks politik. Mimbar gereja harus disterilkan dari kampanye politik terselubung dan narasi ketakutan (<i>fear-mongering</i>) yang memecah belah bangsa.
3.4	Relevansi Gerakan Keagamaan dalam Isu Keadilan Sosial dan Iklim. Tantangan: Di masa depan, legitimasi politik sebuah lembaga agama di mata generasi muda tidak lagi dinilai dari seberapa besar gedungnya, melainkan seberapa peduli lembaga tersebut pada krisis kemanusiaan riil. Strategi Gereja: Lembaga gereja perlu proaktif menjalin aliansi lintas iman (<i>interfaith coalition</i>) dengan ormas keagamaan lain (seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga keagamaan lainnya) untuk mengawal isu-isu bersama yang krusial, seperti keadilan ekologis (krisis iklim), pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak kaum marjinal. Kolaborasi kebangsaan sejati ini merupakan benteng paling kokoh melawan radikalisme politik

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.3.3 Bidang Teknologi

Memasuki kurun waktu 2027–2045, dunia akan melewati gerbang Revolusi Industri 5.0 dan menuju era konvergensi teknologi mutakhir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi tidak lagi sekadar menjadi "alat bantu" (*tools*), melainkan lingkungan hidup (*ecosystem*) di mana manusia beraktivitas, berpikir, dan membangun spiritualitasnya.

Bagi lembaga Gereja di Indonesia, periode menuju Indonesia Emas 2045 ini akan menjadi ujian sejauh mana teologi dan praktik ekslesiologi (cara bergereja) dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensi iman. Analisis prediksi teknologi global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.13 Analisis Prediksi Teknologi Global dan Nasional

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Teknologi Global (2027–2045)		
1.1	Era Kedaulatan AI Terdesentralisasi & <i>Artificial General Intelligence</i> (AGI)	Antara 2027-2035, teknologi AI diprediksi berevolusi dari AI spesifik (<i>Narrow AI</i>) menjadi AGI, di mana mesin memiliki kemampuan kognitif yang setara atau melampaui kecerdasan manusia dalam berbagai bidang. Pada 2045, AI akan terintegrasi secara organik dalam kehidupan sehari-hari lewat asisten otonom, robotika domestik, dan pengambilan keputusan medis/hukum	Konteks Nasional: Indonesia akan mengalami penetapan infrastruktur AI nasional yang masif. Layanan publik, pendidikan, dan sektor keagamaan akan bersinggungan langsung dengan sistem manajemen berbasis AI
1.2	Komputasi Kuantum	Komputasi kuantum akan	Perlindungan data pribadi



	(Quantum Computing) & Keamanan Siber Baru	menjadi standar baru di tingkat global, mematahkan sistem kriptografi tradisional. Ini akan memicu perombakan total pada sistem keamanan siber (<i>cybersecurity</i>).	(UU PDP) di Indonesia akan menghadapi tantangan serangan siber gelombang baru. Keamanan data lembaga, termasuk data jemaat, akan menjadi komoditas yang sangat rawan diretas jika tidak diperbarui ke sistem tahan-kuantum (<i>quantum-resistant</i>).
1.3	Imersif Total: <i>Spatial Computing</i> , XR, dan <i>Metaverse</i> Matang	Perangkat <i>Extended Reality</i> (XR) dan <i>Spatial Computing</i> (seperti evolusi kacamata pintar/ <i>smart glasses</i>) akan menggantikan ponsel pintar (<i>smartphone</i>). Interaksi digital tidak lagi menatap layar datar, melainkan menyatu dengan ruang fisik (3D imersif).	Generasi Alpha (yang mulai memasuki usia dewasa pada 2035) dan Generasi Beta setelahnya akan menganggap interaksi fisik dan digital (<i>phygital</i>) sebagai satu kesatuan realitas yang sama normalnya.
1.4	Bioteknologi & Transhumanisme	Teknologi pengeditan gen (seperti CRISPR - <i>Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats</i> - teknologi penyuntingan DNA). Yang semakin matang), implan antarmuka otak-komputer (<i>Brain-Computer Interface</i> seperti <i>Neuralink</i>), dan terapi perpanjangan usia (<i>longevity</i>) akan melompat dari fase eksperimen ke fase komersial skala luas. Manusia akan mulai merekayasa keterbatasan biologisnya sendiri.	
2.	Implikasi & Antisipasi Strategis untuk Lembaga Gereja. Perkembangan teknologi ini memicu pertanyaan eksistensial bagi Gereja: Apakah kehadiran fisik masih mutlak diperlukan? Bagaimana mendefinisikan "jiwa" dan "persekutuan" di era digital?		
2.1	Perumusan "Teologi Digital" dan Etika Teknologi (Bioethics & AI Ethics). Jemaat akan menghadapi dilema etis baru. Misalnya: Apakah etis menggunakan teknologi rekayasa genetika untuk memilih kecerdasan anak? Bagaimana pandangan iman Kristen terhadap algoritma AI yang mulai "menasihati" manusia dalam menentukan pilihan hidup?	Gereja (melalui teolog, sinode, dan STT) tidak boleh terlambat merumuskan panduan etis. Mimbar-mimbar gereja harus mulai mengkotbahkan teologi penciptaan dan batasan moral teknologi. Gereja harus menegaskan bahwa AI adalah alat buatan manusia, sementara roh dan kesadaran ilahi adalah anugerah unik penciptaan Allah yang tidak bisa ditiru oleh silikon.	
2.2	Rekonstruksi Ekslesiologi: Integrasi Pelayanan Phygital (<i>Physical-Digital</i>). Konsep ibadah lokal-fisik akan ditantang oleh kehadiran <i>Cyber-Church</i> berbasis <i>spatial computing</i> . Jemaat masa depan mungkin merasa kehadiran roh dalam persekutuan virtual di ruang 3D sama validnya dengan duduk di bangku gereja fisik.	Gereja harus berhenti memperdebatkan "online vs offline" dan mulai membangun ekosistem Phygital. Sakramen (Baptisan dan Perjamuan Kudus) tetap dipertahankan dalam ranah inkarnasional (fisik), namun penerangan, konseling awal, dan penjangkauan misi harus memanfaatkan ruang imersif secara maksimal	Gereja lokal perlu mengadopsi AI secara internal untuk otomatisasi pelayanan administratif, pelacakan kesehatan rohani jemaat (melalui data keterlibatan), hingga transkripsi dan penerjemahan kotbah multi-bahasa secara real-time untuk menjangkau suku-suku terpencil (misi digital).
2.3	Kedaulatan Data Jemaat dan Keamanan Siber Lembaga. Gereja memegang data jemaat yang sangat sensitif (catatan konseling, data keuangan/persembahan, alamat, riwayat keluarga). Di era komutasi kuantum, gereja yang abai terhadap aspek IT akan menjadi sasaran empuk <i>cyber-crime</i> atau eksploitasi data oleh korporasi.		





	Sinode dan gereja lokal berskala menengah-besar harus berinvestasi pada talenta IT internal dan arsitektur siber yang aman. Manajemen data jemaat wajib mematuhi standar enkripsi tertinggi dan regulasi perlindungan data nasional, serta mengedukasi jemaat agar tidak terjebak dalam penipuan berbasis deepfake keagamaan (misal: video/suara tiruan pendeta yang meminta sumbangan).
2.4	Pastoral "Kemanusiaan yang Otentik" di Tengah Krisis Eksistensial. Di dunia yang dijalankan oleh algoritma, manusia cenderung mengalami keterasingan ekstrem (<i>hyper-loneliness</i>), krisis identitas, dan adiksi teknologi digital. "Nilai jual" utama Gereja di masa depan bukanlah kecanggihan teknologinya—karena gereja tidak akan pernah bisa menandingi perusahaan teknologi besar—melainkan kehangatan komunitas fisik yang otentik (<i>genuine human touch</i>). Ketika dunia semakin artifisial, Gereja harus menjadi tempat perlindungan di mana manusia diterima apa adanya, mengalami sentuhan persaudaraan yang nyata, doa yang tulus, dan pemulihan psikologis-spiritual yang tidak bisa diberikan oleh <i>chatbot</i> AI manapun.

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.3.4 Bidang Sosial Budaya

Menuju tahun 2027–2045, dinamika sosial-budaya akan mengalami pergeseran paling radikal dalam sejarah modern Indonesia. Gelombang globalisasi digital, pergantian generasi yang masif, serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 akan melahirkan tatanan nilai, norma, dan gaya hidup yang sepenuhnya baru.

Bagi lembaga Gereja di Indonesia, perubahan sosial-budaya ini adalah tantangan eksistensial. Gereja tidak lagi hanya berhadapan dengan perbedaan teologis, melainkan dengan perubahan mendasar pada cara manusia masa depan mendefinisikan identitas, komunitas, dan spiritualitas mereka. Analisis prediksi perkembangan sosial budaya global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.14 Analisis Prediksi Sosial Budaya Global dan Nasional

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Sosial Budaya Global (2027–2045)		
1.1	Dominasi Penuh Gen Z, Alpha, dan Lahirnya Gen Beta	Pada tahun 2045, posisi kepemimpinan strategis di masyarakat, korporasi, dan pemerintahan akan dipegang oleh Gen Z dan Gen Alpha. Sementara itu, Gen Beta (lahir pertengahan 2020-an hingga 2030-an) akan menjadi penggerak budaya baru.	: Generasi ini memiliki literasi digital mutlak, sangat mengutamakan inklusivitas, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Mereka tidak lagi menerima otoritas kelembagaan secara absolut dan cenderung mempertanyakan tradisi yang dianggap tidak logis atau tidak berdampak nyata.
1.2	Arus Sekularisme Ekspresif dan "Spiritual but Not Religious" (SBNR)	Seiring meningkatnya kesejahteraan ekonomi (Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi) dan akses informasi,	Muncul fenomena <i>Spiritual but Not Religious</i> (SBNR), di mana orang-orang (terutama anak muda) tetap percaya pada Tuhan atau kekuatan



		arus sekularisme global akan merembes kuat ke kelas menengah-atas Indonesia	spiritual, tetapi menolak berafiliasi dengan institusi agama resmi (gereja, masjid, kuil) karena menganggap organisasi agama terlalu dogmatis, kaku, atau terlibat konflik politik
1.3	Epidemi Kesepian Global (<i>The Loneliness Epidemic</i>) & Polarisasi Sosial	Kehidupan yang semakin termediasi oleh layar (AI, Metaverse, media sosial) justru akan menurunkan kualitas hubungan interpersonal yang mendalam. Kepadatan mega-urban (70% penduduk di perkotaan pada 2045) akan memicu isolasi sosial, gangguan kesehatan mental (depresi, kecemasan), dan krisis identitas	Di sisi lain, algoritma digital akan terus membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang terpolarisasi secara ekstrem (budaya tribalism baru), baik dalam isu politik, sosial, maupun moral.
1.4	Rekonstruksi Definisi Keluarga dan Relasi Sosial	Struktur keluarga konvensional akan mengalami tekanan. Tingkat pernikahan (<i>marriage rate</i>) di Indonesia diprediksi menurun atau tertunda ke usia yang lebih matang karena alasan ekonomi dan karier. Angka kelahiran (<i>fertility rate</i>) menyusut, sementara model keluarga inti kecil (<i>nuclear family</i>) atau hidup melajang (<i>singlehood</i>) akan menjadi pilihan gaya hidup yang semakin dinormalisasi di perkotaan	
2.	Implikasi & Antisipasi Strategis untuk Lembaga Gereja. Gereja harus bertransformasi dari sebuah "institusi menara gading" menjadi sebuah "komunitas penyembuhan dan pemuridan" yang organik agar tetap relevan bagi masyarakat tahun 2045		
2.1	Dekonstruksi Model Otoritas: Dari Monolog ke Dialog. Model kotbah atau pengajaran satu arah (<i>top-down</i>) yang kaku tidak akan lagi memikat Gen Alpha dan Beta. Mereka akan meninggalkan gereja jika pertanyaan-pertanyaan kritis mereka tentang sains, iman, seksualitas, dan keadilan sosial dijawab dengan penghakiman atau dogmatisme buta.	Kepemimpinan gereja harus bergeser dari model hierarkis-patronal menjadi fasilitator dialog.	Gereja perlu menyediakan ruang-ruang diskusi yang aman (<i>safe spaces</i>) bagi pemuda untuk meragukan, mempertanyakan, dan menggumuli iman mereka tanpa takut dicap "berdosa". Teologi yang diajarkan harus bersifat aplikatif dan berdampak pada keadilan sosial
2.2	Menjawab Fenomena SBNR dengan "Otensitas" bukan "Ritualisme". Jemaat masa depan tidak tertarik pada kemegahan gedung gereja atau birokrasi sinode yang rumit. Mereka mencari otensitas (keaslian hidup) dan dampak nyata.		
		Gereja harus mengalihkan energinya dari mempertahankan formalitas organisasi ke arah pemuridan yang radikal dan organik. Jika gereja gagal menunjukkan kasih yang nyata (misalnya abai terhadap isu kemiskinan di sekitar gedung gereja atau merusak lingkungan), generasi muda akan menganggap gereja hipokrit dan memilih menjadi SBNR. Kesaksian hidup (<i>marturia</i>) lewat aksi nyata jauh lebih penting daripada retorika mimbar	
2.3	Gereja sebagai Oasis Kesehatan Mental dan Pusat Komunitas (<i>Community Hub</i>). Di era 2030-2045, komoditas paling langka dan paling dicari manusia adalah komunitas yang tulus dan kedamaian batin di tengah tekanan dunia digital yang serba cepat		
		Gereja lokal harus mentransformasi fungsinya menjadi	





	tempat perlindungan psikologis-spiritual. Pelayanan konseling pastoral harus diintegrasikan dengan ilmu psikologi profesional secara serius. Struktur ibadah hari Minggu yang besar harus didukung oleh penguatan jaringan komunitas sel kecil (sel grup) yang intim di tingkat lingkungan/komunitas digital. Di sinilah tempat jemaat saling mengenal, mendukung, dan menyembuhkan kesepian mereka.
2.4	Redesain Pastoral Keluarga Modern. Penurunan angka pernikahan, peningkatan perceraian, tantangan membesarkan anak di era AI, serta meningkatnya populasi lansia sebatangkara (aging population) memerlukan penanganan pastoral yang berbeda
	Gereja tidak bisa lagi memakai asumsi bahwa semua jemaatnya berada dalam struktur keluarga ideal (Ayah-Ibu-Dua Anak). Pelayanan pastoral harus diperluas untuk merangkul orangtua tunggal (single parents), jemaat yang memilih tidak menikah, serta membangun ekosistem pendukung (support system) bagi pasangan muda yang bekerja. Pelayanan pranikah harus diperbarui dengan fokus pada literasi keuangan, kesehatan mental, dan pembagian peran domestik yang setara

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.3.5 Bidang Lingkungan Hidup

Menuju tahun 2027–2045, krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim tidak lagi menjadi sekadar prediksi ilmiah di atas kertas, melainkan realitas harian yang akan mendikte stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pada periode ini—yang bertepatan dengan tenggat waktu global pencapaian *Net Zero Emission* (2050) dan puncak Visi Indonesia Emas 2045—bumi akan mengalami tekanan ekologis terbesar dalam sejarah peradaban modern.

Bagi lembaga Gereja di Indonesia, krisis lingkungan hidup adalah panggilan iman dan teologis yang mendesak. Isu ekologi bukan lagi sekadar program sampingan Pecinta Alam, melainkan indikator utama dari keadilan sosial, ketahanan pangan jemaat, dan kelangsungan hidup manusia. Analisis prediksi perkembangan lingkungan hidup global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.15 Analisis Prediksi Lingkungan Hidup Global dan Nasional

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Lingkungan Hidup Global (2027–2045)		
1.1	Pemanasan Global Melewati Ambang Batas & Cuaca Ekstrem	Konsensus ilmiah memproyeksikan bahwa bumi kemungkinan besar akan melewati atau menetap di ambang batas (1.5 C) kenaikan suhu di atas masa pra-industri dalam rentang waktu ini. Akibatnya adalah siklus cuaca yang tidak lagi dapat diprediksi: kemarau ekstrem yang memicu kebakaran hutan hebat, diikuti oleh musim hujan pendek dengan intensitas air yang sangat destruktif	Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Anomali cuaca akan merusak kalender pertanian nasional, memicu gagal panen massal, dan mengancam ketahanan pangan
1.2	Kenaikan Permukaan Air Laut & Ancaman Pengungsian Iklim (<i>Climate Refugees</i>)	Mencairnya es kutub mempercepat kenaikan permukaan air laut. Banyak pulau kecil dan kawasan pesisir	Kota-kota pesisir pantai di Indonesia (termasuk Jakarta Utara, Semarang, Demak, hingga pulau-pulau kecil di





		dataran rendah di seluruh dunia akan tenggelam atau menjadi tidak layak huni akibat abrasi dan intrusi air laut.	wilayah Indonesia Timur) akan menghadapi banjir rob permanen. Jutaan warga pesisir berpotensi kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian (nelayan), memicu gelombang besar pengungsi iklim domestik ke area pedalaman atau perkotaan tinggi
1.3	Krisis Air Bersih & Degradasi Biodiversitas	Polusi, deforestasi, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akan memicu kelangkaan air bersih akut (<i>water scarcity</i>) di berbagai belahan dunia, termasuk wilayah padat penduduk.	Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diproyeksikan mengalami defisit air bersih yang parah pada dekade 2030-an. Selain itu, hilangnya hutan tropis akibat alih fungsi lahan akan mempercepat kepunahan flora-fauna endemik dan meningkatkan konflik ruang antara manusia dan satwa
2.	Implikasi & Antisipasi Strategis untuk Lembaga Gereja. Krisis lingkungan adalah krisis kemanusiaan. Gereja dipanggil untuk melahirkan Teologi Ekologi (Eko-Teologi) yang radikal, mengubah perilaku institusi, dan menjadi benteng perlindungan bagi korban ketidakadilan lingkungan		
2.1	Rekonstruksi Pengajaran: Dari Teologi Dominasi ke Teologi Perawatan. Selama berabad-abad, sebagian pemahaman teologis Kristen terjebak pada salah tafsir Kejadian 1:28 ("taklukanlah bumi"), yang dianggap sebagai mandat untuk mengeksploitasi alam demi kenyamanan manusia		
		Gereja (Sinode dan STT) harus mengarusutamakan Eko-Teologi. Manusia bukan penguasa mutlak, melainkan <i>steward</i> (penatalayan/ pengurus) yang dititipkan Allah untuk merawat ciptaan-Nya (Kejadian 2:15).	Kotbah-kotbah bertema kelestarian alam, pertobatan ekologis (<i>ecological conversion</i>), dan gaya hidup ugahari (sederhana/tidak serakah) harus menjadi bagian reguler dari pembinaan iman jemaat, bukan hanya setahun sekali pada Hari Lingkungan Hidup
2.2	Kesiapan Pastoral Menghadapi Pengungsi Iklim & Krisis Pangan. Jemaat-jemaat di wilayah pesisir pantai dan daerah agraris (terutama di NTT, Maluku, Papua, dan pesisir Jawa) akan menjadi kelompok pertama yang kehilangan gereja, rumah, dan ladang mereka akibat perubahan iklim		
		Gereja Komunitas Tangguh Bencana: Gereja-gereja lokal di daerah aman harus melatih diri menjadi shelter (posko kemanusiaan) yang mandiri. Arsitektur gedung gereja baru harus dirancang tahan bencana dan ramah lingkungan (dilengkapi penampungan air hujan, ruang evakuasi, dan panel surya)	Lumbung Pangan Jemaat: Menghadapi ancaman gagal panen makro, gereja perlu memelopori gerakan pertanian komunitarian (urban farming, permakultur) menggunakan aset-aset tanah milik gereja/sinode demi menjamin ketersediaan pangan mandiri bagi jemaat miskin
2.3	Gerakan "Green Church" (Gereja Hijau) Institusional. Institusi keagamaan sering kali menyumbang jejak karbon yang besar melalui penggunaan listrik konvensional yang boros (AC, lampu besar), penggunaan plastik sekali pakai dalam acara gereja, dan abai pada pengelolaan limbah		
		Gereja harus memimpin lewat Audit	Lingkungan:





	teladan (<i>leading by example</i>): Transisi Energi: Sinode perlu membuat kebijakan agar gedung-gedung gereja secara bertahap beralih menggunakan energi terbarukan (seperti panel surya) untuk mengurangi ketergantungan pada listrik batu bara. <i>Zero-Waste Ministry</i>: Melarang total penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan sakramen, rapat, atau konsumsi gereja. Menerapkan sistem pemilahan sampah dan pembuatan kompos di area gereja.	Menjadikan kelayakan ekologis sebagai syarat dalam pembangunan fisik gedung gereja (memiliki ruang terbuka hijau dan resapan air yang memadai).
2.4	Advokasi Keadilan Ekologis (<i>Ecological Justice</i>). Kerusakan lingkungan sering kali berjalan beriringan dengan ketimpangan sosial. Korporasi raksasa yang merusak hutan atau mencemari sungai sering kali mengorbankan masyarakat adat dan warga miskin, yang di antaranya adalah jemaat gereja itu sendiri Gereja tidak boleh diam ketika hak-hak hidup jemaatnya dirampas oleh perusakan lingkungan. Melalui lembaga hukum dan kemitraan lintas iman (bersama ormas-ormas keagamaan lain), Gereja harus berani bersuara secara kritis dan melakukan advokasi kebijakan publik untuk menentang deforestasi ilegal, pencemaran industri, serta mendorong penegakan hukum lingkungan yang adil di Indonesia	

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.3.6 Bidang Perilaku Beragama

Menyongsong periode 2027–2045, ekspresi spritualitas dan perilaku beragama manusia akan mengalami evolusi paling radikal dalam sejarah modern. Didorong oleh konvergensi kecerdasan buatan (AI), pergeseran generasi (Gen Alpha dan Gen Beta), serta tantangan eksistensial global (krisis iklim dan isolasi sosial), cara orang beriman tidak akan lagi sama.

Bagi lembaga Gereja di Indonesia, era menuju Indonesia Emas 2045 ini akan membongkar kemapanan institusional. Gereja tidak lagi sekadar bersaing dengan "agama lain", melainkan dengan bentuk-bentuk spritualitas alternatif, sekularisme gaya baru, dan tuntutan dekonstruksi iman dari generasi muda. Analisis prediksi perkembangan perilaku beragama global dan nasional (2027–2045) beserta implikasi strategis yang perlu diantisipasi oleh lembaga Gereja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9.16 Analisis Prediksi Perilaku Beragama Global dan Nasional

No.	Komponen Analisis	Prediksi	Dampak Nasional
1.	Tren Perilaku Beragama Global (2027–2045)		
1.1	Komodifikasi Agama & Lahirnya <i>Spiritual Marketplaces</i>	Agama akan semakin dipandang melalui lensa individualisme ekstrem. Orang tidak lagi menerima "paket lengkap" dogma dari satu institusi, melainkan memilih dan memilah elemen-elemen spritualitas yang mereka sukai dari berbagai tradisi (<i>syncretism-on-demand</i>).	Ruang digital akan menjadi pasar bebas spritualitas. Jemaat bisa beribadah di gereja lokal secara formal, tetapi kotbah harian mereka disuplai oleh AI pastor global, meditasi berbasis budaya Timur, atau konten-konten filsafat stoikisme. Loyalitas denominasional (pada sinode tertentu) akan runtuh secara



			masif.
1.2	Polarisasi Ekstrem: Antara "Sekularisme Ekspresif" dan "Hiper-Konservatisme"	Perilaku keagamaan akan terbelah menjadi dua kutub ekstrem yang saling menjauh: Kutub A (Sekularisme Ekspresif & SBNR): Kelompok kelas menengah urban yang menyatakan diri Spiritual but Not Religious (SBNR) atau agnostik fungsional (percaya Tuhan tapi hidup seolah Tuhan tidak ada). Mereka menolak institusi agama karena dianggap munafik, korup, atau diskriminatif	Kutub B (Hiper-Konservatisme & Radikalisme): Kelompok yang merespons ketidakpastian dunia (AI, krisis ekonomi) dengan berlandung pada fundamentalisme agama yang rigid dan menutup diri dari dunia luar (tribalism).
1.3	Personalisasi Iman Berbasis Kecerdasan Buatan (AI-Driven Faith)	Pada dekade 2030-an, penggunaan asisten spritual berbasis AI (AI Chaplain) akan menjadi hal lumrah. AI akan merancang doa harian, menafsirkan ayat Alkitab berdasarkan kondisi psikologis pengguna secara real-time, bahkan memberikan konseling moral instan. Hubungan transendental manusia dengan Tuhan akan termediasi secara mendalam oleh algoritma	
1.4	Pergeseran "Pusat Gravitasi" Kekristenan Global ke <i>Global South</i>	Kekristenan di Eropa dan Amerika Utara akan terus menyusut menjadi minoritas sosiologis. Pusat pertumbuhan, vitalitas, dan kepemimpinan Kristen dunia akan sepenuhnya bergeser ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia.	Gereja-gereja di Indonesia tidak bisa lagi sekadar menjadi "penerima" teologi Barat. Indonesia akan dituntut menjadi "pengekspor" misi, pemikiran teologis yang kontekstual, dan model kerukunan beragama bagi dunia
2.	Implikasi & Antisipasi Strategis untuk Lembaga Gereja. Menghadapi disrupsi perilaku beragama ini, Gereja di Indonesia harus bermutasi dari model pelayanan yang bersifat birokratis-teritorial menjadi organik-relasional		
2.1	Bergeser dari Pendekatan Doktrinal-Dogmatis ke Empati-Relasional. Generasi Alpha dan Beta (2030-an) tidak responsif terhadap ancaman doktrinal ("kalau tidak ke gereja berdosa/masuk neraka"). Jika gereja terlalu legalistik, mereka akan langsung menyeberang menjadi SBNR atau sekular		
		Gereja harus mempraktikkan gaya pemuridan Yesus yang berbasis relasi intim. Kotbah dan pengajaran harus berfokus pada mengapa (fungsi iman di dunia nyata) bukan sekadar apa (aturan). Gereja harus menjadi tempat penyembuhan luka batin, kegagalan karier, dan krisis identitas. Otentisitas hidup para pemimpin gereja jauh lebih dicari daripada kefasihan berkotbah	
2.2	Mengembangkan Apologetika Modern: Menjembatani Sains, Iman, dan AI. Isu-isu seperti kloning manusia, kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran, pencarian kehidupan di luar bumi (luar angkasa), hingga krisis iklim akan menguji iman jemaat masa depan. Jika kekristenan dianggap anti-sains, generasi terpelajar akan meninggalkan gereja		
		Kurikulum Sekolah Minggu, pemuda, dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) harus diperbarui. Gereja perlu melahirkan teolog-teolog yang menguasai sains dan teknologi. Alkitab harus diajarkan bukan sebagai buku sains, melainkan sebagai penuntun moral dan kebenaran spritual universal. Pemuda harus diajarkan cara menguji roh di era digital, termasuk bagaimana menempatkan AI sebagai alat, bukan tuhan baru.	
2.3	Dekonsentrasi Kekuasaan: Penguatan "Gereja Rumah" dan Komunitas Sel. Struktur sinode yang gemuk, birokratis, dan berfokus pada pemeliharaan gedung besar (megachurch) akan menjadi beban finansial dan sosiologis di era urbanisasi padat 2045. Jemaat mencari komunitas kecil yang saling mengenal intim demi melawan		





epidemi kesepian.		Tanpa harus membubarkan sinode, fokus energi dan anggaran harus dialihkan untuk memperkuat komunitas-komunitas kecil (<i>cell groups/house churches</i>). Gereja masa depan yang bertahan adalah gereja yang "kecil di dalam (intim), tetapi besar di luar (berdampak sosial)". Pemimpin awam (bukan hanya pendeta yang ditumpangkan tangan secara formal) harus diperdayakan untuk memimpin spiritualitas di lingkungannya masing-masing.
2.4	Menghadapi Polarisasi dengan Teologi "Jalan Ketiga" (<i>The Third Way</i>). Tarikan politik praktis dan benturan budaya global (liberalisme vs fundamentalisme) dapat memecah jemaat dari dalam	Gereja harus menolak menjadi perpanjangan tangan ideologi politik mana pun. Mimbar gereja harus menyuarakan teologi "Jalan Ketiga": teologi yang teguh pada kebenaran moral Alkitabiah (inklusif terhadap manusia, tegas terhadap dosa), namun radikal dalam menyatakan kasih, pengampunan, dan perdamaian di ruang publik.

Sumber: Triyono, Sigit (2026). Analisis Kondisi Eksternal Global & Nasional Periode 2027-2045

9.4 Proyeksi Pembangunan Seratus Tahun

Dalam rencana proyeksi 100 (seratus) tahun, yakni 2025-2125 atau biasanya disebut pembangunan jangka panjang dalam Sinode GKI di Tanah Papua, maka ada 5 (lima) fase strategis yang perlu diprediksi dan diantisipasi perkembangannya sebagai referensi untuk menyusun strategi yang tepat bagi perjalanan pelayanan GKI di Tanah Papua. Ada terdapat lima fase tersebut terdiri atas: (1) Konsolidasi, (2) Transformasi, (3) Ekspansi, (4) Stabilitas, dan (5) Kemandirian. Kelima fase tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

9.4.1 Fase Konsolidasi (20 Tahun Pertama)

Fase konsolidasi adalah masa kritis di mana gereja berhenti sejenak dari ekspansi agresif untuk memperkuat struktur internal dan menyatukan visi pasca-pertumbuhan atau krisis. Berikut adalah fokus utama dalam perencanaan gereja pada fase konsolidasi dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 9.17 Fase Konsolidasi Proyeksi 20 Tahun Pertama

No.	Komponen Fase Konsolidasi		Deskripsi Sub Komponen
1.	Penataan Struktur Organisasi		a. Audit Internal: Meninjau kembali efektivitas kepengurusan dan sistem keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. (penguatan tata Kelola) b. Standarisasi Prosedur (SOP): Menyusun panduan baku untuk pelayanan, mulai dari tata cara ibadah hingga mekanisme bantuan sosial (diakonia) agar tidak bergantung pada figur individu tertentu.
2.	Penguatan Doktrin	Identitas dan	a. Rekontekstualisasi Visi: Menyelaraskan kembali pemahaman jemaat terhadap visi-misi gereja. Hal ini penting untuk memastikan setiap anggota bergerak ke arah yang sama; b. Pemuridan Intensif: Fokus pada kualitas daripada kuantitas. Program pembinaan jemaat yang mendalam diperlukan untuk membangun akar spiritual yang kuat sebelum gereja melangkah ke fase ekspansi berikutnya





3.	Rekonsiliasi dan Persatuan Jemaat	a. Manajemen Konflik: Mengidentifikasi faksi-faksi di dalam jemaat dan melakukan pendekatan pastoral untuk pemulihan hubungan; b. Komunikasi Terbuka: Membangun ruang dialog antara pimpinan dan jemaat untuk meminimalisir rumor dan ketidakpastian mengenai masa depan organisasi
4.	Evaluasi Sumber Daya	a. Penyaringan Pelayan: Memastikan orang-orang yang duduk di posisi strategis memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai (tepat sasaran); b. Efisiensi Anggaran: Mengalihkan dana dari kegiatan seremonial yang kurang berdampak ke program penguatan kapasitas internal atau investasi jangka panjang

9.4.2 Fase Transformasi (20 Tahun Kedua)

Fase transformasi adalah tahap di mana Sinode GKI di Tanah Papua melakukan perubahan radikal pada bentuk, fungsi, dan metodenya agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa mengubah esensi teologisnya. Berikut adalah elemen kunci dalam perencanaan gereja yang sedang bertransformasi dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 9.18 Fase Transformasi Proyeksi 20 Tahun Kedua

No.	Komponen Fase Transformasi	Deskripsi Sub Komponen
1.	Pergeseran Pola Pikir (Mindset Shift)	a. Dari Inward ke Outward: mengubah fokus dari kegiatan yang hanya memuaskan jemaat internal (eksklusif) menjadi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas (inklusif). b. Gereja sebagai Organisme, Bukan Organisasi: menekankan pada pertumbuhan kehidupan dan relasi antar jemaat, bukan sekadar menjalankan birokrasi gerejawi yang kaku. Anda bisa mempelajari konsep ini melalui literatur mengenai Transformasi Gereja Lokal yang berfokus pada perubahan substansial.
2.	Digitalisasi dan Adaptasi Teknologi	a. Ekosistem Digital: Membangun platform digital untuk manajemen jemaat, sistem donasi online, hingga penyediaan konten rohani harian yang dapat diakses melalui smartphone; b. Ibadah Metaverse/Hybrid: Menyiapkan infrastruktur agar gereja tetap hadir secara nyata baik di ruang fisik maupun ruang virtual, menjangkau generasi digital asli (Gen Z dan Alpha).
3.	Transformasi Kepemimpinan dan Budaya. Model kepemimpinan harus berubah agar lebih adaptif dan kolaboratif	a. Kepemimpinan Melayani (Servant Leadership) : mengganti model kepemimpinan otoriter dengan model yang memberdayakan potensi setiap jemaat sesuai talenta mereka; b. Budaya Inovasi: Menciptakan ruang bagi ide-ide baru dalam metode pengajaran atau pelayanan sosial tanpa rasa takut akan kegagalan. Hal ini sering dibahas dalam strategi pengembangan organisasi gereja yang menekankan pada kreativitas pelayanan
4.	Relevansi Sosial dan Ekonomi. Gereja bertransformasi menjadi	a. Pemberdayaan Ekonomi Jemaat: Mengintegrasikan program kemandirian ekonomi (seperti UMKM





pusat solusi bagi masalah di sekitarnya	binaan) ke dalam misi gereja agar jemaat berdaya secara finansial; b. Isu-isu Kontemporer: Aktif merespons isu kesehatan mental, lingkungan hidup, dan keadilan sosial, sehingga gereja dipandang sebagai institusi yang peduli pada realitas hidup sehari-hari
---	--

9.4.3 Fase Ekspansi (20 Tahun Ketiga)

Fase ekspansi adalah tahap pertumbuhan progresif di mana Sinode GKI di Tanah Papua memperluas jangkauan pelayanannya, baik secara kuantitas jemaat, infrastruktur, maupun wilayah geografis. Berikut adalah elemen kunci dalam perencanaan gereja yang sedang berekspansi dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 9.19 Fase Ekspansi Proyeksi 20 Tahun Ketiga

No.	Komponen Fase Ekspansi	Deskripsi Sub Komponen
1.	Multiplikasi dan Penanaman Gereja (Church Planting). Ekspansi tidak selalu berarti memperbesar satu gedung, tetapi memperbanyak titik kehadiran	a. Pembukaan Cabang/Pos Pelayanan: Membentuk komunitas baru di wilayah geografis yang belum terjangkau. Strategi ini memerlukan persiapan tim inti yang solid untuk dikirim ke lokasi baru; b. Model Satelit: Menggunakan teknologi untuk menghubungkan gereja pusat dengan cabang-cabang kecil, sehingga kualitas pengajaran tetap konsisten meskipun lokasi berjauhan. Anda bisa merujuk pada strategi pertumbuhan gereja lokal untuk detail manajemen skalabilitas.
2.	Mobilisasi Sumber Daya Manusia. Pertumbuhan yang cepat membutuhkan pasokan pemimpin dan pelayan yang lebih banyak	a. Sekolah Kepemimpinan Internal: Mempercepat kaderisasi melalui pelatihan intensif bagi jemaat awam agar siap menjadi pemimpin kelompok kecil atau koordinator pelayanan; b. Delegasi Otoritas: Pemimpin utama harus mulai melepaskan kontrol mikro dan memberikan kepercayaan kepada pemimpin level menengah untuk mengambil keputusan operasional.
3.	Pengembangan Infrastruktur dan Pendanaan. Ekspansi membutuhkan dukungan logistik yang kuat agar tidak terjadi "bottleneck":	a. Kampanye Modal (Capital Campaign): Menggalang dana khusus untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, atau pengadaan alat multimedia yang mendukung misi perluasan; b. Optimalisasi Aset: Mengelola aset yang ada agar menghasilkan nilai tambah guna membiayai operasional di tempat baru. Panduan mengenai manajemen keuangan gereja sangat relevan untuk menjaga akuntabilitas selama masa belanja besar
4.	Penetrasi Sosial dan Misi. Ekspansi yang sehat adalah yang memberi dampak bagi lingkungan sekitar	a. Program Diakonia Transformatif: Membuka akses pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi di wilayah baru sebagai bentuk kehadiran nyata gereja bagi masyarakat (pre-evangelism); b. Kolaborasi Lintas Organisasi: Bekerja sama dengan gereja lain atau lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial tanpa harus memulai semuanya dari nol





9.4.4 Fase Stabilitas (20 Tahun Keempat)

Fase stabilitas adalah tahap di mana Sinode GKI di Tanah Papua telah mencapai titik keseimbangan setelah masa pertumbuhan. Fokus utamanya bukan lagi perubahan radikal, melainkan menjaga konsistensi dan memastikan sistem berjalan secara otomatis (autopilot).

Berikut adalah elemen kunci dalam perencanaan gereja pada fase stabilitas dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 9.20 Fase Stabilitas Proyeksi 20 Tahun Keempat

No.	Komponen Fase Stabilitas	Deskripsi Sub Komponen
1.	Optimalisasi Sistem dan Standar Mutu. Saat kondisi stabil, gereja harus memastikan kualitas pelayanan tetap tinggi tanpa bergantung pada "mood" individu	a. Pemeliharaan Aset: Melakukan perawatan rutin terhadap infrastruktur fisik dan digital agar tidak terjadi penurunan fungsi yang mendadak; b. Audit Kinerja Pelayanan: Menggunakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi apakah program yang berjalan masih efektif atau sekadar rutinitas. Referensi mengenai efektivitas organisasi gereja dapat membantu menyusun indikator keberhasilan ini
2.	Kedalaman Spiritual (Quality over Quantity). Karena jumlah jemaat cenderung menetap, fokus dialihkan pada kedewasaan iman	a. Kurikulum Pemuridan Berkelanjutan: Menyusun materi pengajaran yang lebih sistematis dan mendalam bagi jemaat yang sudah lama bergabung; b. Penguatan Komunitas Kecil: Memastikan kelompok sel atau persekutuan wilayah menjadi wadah saling memperhatikan (pastoral care) yang mandiri
3.	Manajemen Risiko dan Dana Cadangan. Stabilitas adalah waktu terbaik untuk menabung bagi masa depan yang tidak pasti	a. Dana Abadi (Endowment Fund): Mengelola surplus keuangan ke dalam instrumen yang aman untuk menjamin keberlangsungan operasional jangka Panjang; b. Perencanaan Suksesi: Menyiapkan pelapis kepemimpinan secara perlahan agar saat terjadi transisi, stabilitas gereja tidak terguncang. Anda bisa melihat pola manajemen tata kelola untuk menjaga transparansi di masa stabil
4.	Menghindari Stagnasi (Penyakit Fase Stabil). Bahaya terbesar dari stabilitas adalah rasa puas diri (complacency)	a. Inovasi Skala Kecil: Tetap mencoba metode baru dalam pelayanan untuk menjaga antusiasme jemaat; b. Evaluasi Relevansi: Secara rutin mengecek apakah program gereja masih menjawab kebutuhan jemaat yang juga terus berkembang usianya

9.4.5 Fase Kemandirian (20 Tahun Kelima)

Fase kemandirian adalah "puncak" dari pendewasaan organisasi, di mana Sinode GKI di Tanah Papua tidak lagi bergantung pada dukungan dana, tenaga, maupun keputusan dari sinode pusat atau pihak luar. Gereja telah menjadi subjek yang mampu mengelola dirinya sendiri.

Berikut adalah pilar perencanaan dalam fase kemandirian dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 9.21 Fase Kemandirian Proyeksi 20 Tahun Kelima

No.	Komponen Fase Kemandirian	Deskripsi Sub Komponen
-----	---------------------------	------------------------





1.	Kemandirian Teologis dan Berpikir. Gereja mampu merumuskan arah pelayanannya sesuai dengan konteks lokal jemaat	a. Teologi Kontekstual: Mampu menjawab persoalan jemaat (seperti masalah kemiskinan atau budaya lokal) tanpa selalu menunggu arahan pusat; b. Otonomi Pengambilan Keputusan: Memiliki sistem tata gereja yang mapan untuk memutuskan masa depan organisasi secara mandiri dan demokratis
2.	Kemandirian Finansial (Self-Supporting). Gereja memiliki basis ekonomi yang kuat sehingga mampu membiayai seluruh operasionalnya	a. Diversifikasi Sumber Dana: Tidak hanya bergantung pada persembahan mingguan, tetapi juga mengelola unit usaha atau investasi sosial yang etis. Anda dapat merujuk pada strategi kemandirian ekonomi gereja melalui pemberdayaan jemaat; b. Transparansi Digital: Penggunaan teknologi untuk pelaporan keuangan yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan donatur internal (jemaat)
3.	Kemandirian Tenaga dan Kepemimpinan (Self-Governing). Gereja mampu menghasilkan pemimpin dari rahim sendiri	a. Kaderisasi Mandiri: Memiliki program pelatihan kepemimpinan yang sistematis sehingga posisi-posisi kunci selalu terisi oleh jemaat yang kompeten; b. Profesionalisme Pelayan: Mengelola staf dan relawan dengan standar manajemen modern, termasuk sistem remunerasi dan jaminan sosial yang layak bagi pekerja gereja
4.	Kemandirian Misi (Self-Propagating). Gereja yang mandiri bukan berarti berhenti memberi, justru ia mulai menjadi pemberi.	a. Gereja yang Mengutus: Dari sebelumnya menerima bantuan misi, kini menjadi gereja yang mampu mengirim tenaga misi atau dukungan dana ke tempat lain; b. Pusat Pelatihan: Menjadi model atau mentor bagi gereja-gereja lain yang masih berada di fase konsolidasi atau transisi. Literatur mengenai <u>pembangunan jemaat mandiri</u> sering menekankan peran gereja mandiri sebagai agen perubahan sosial





Monitoring dan Evaluasi

10.1 Pengantar

Bagian ini akan menyajikan secara komprehensif sistem Monitoring dan Evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032, yang meliputi: (a) Kerangka Monitoring — prinsip, mekanisme, instrumen, dan indikator pemantauan berkelanjutan; dan (b) Kerangka Evaluasi — jenis, metodologi, pelaksana, dan penggunaan hasil evaluasi. Sistem M&E ini dirancang untuk mendukung budaya pembelajaran organisasi (organizational learning) yang menjadi fondasi transformasi berkelanjutan GKI Di Tanah Papua.

10.2 Monitoring

Monitoring dan Evaluasi (M&E) merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah Rencana Strategis yang efektif. Tanpa sistem M&E yang kuat, Renstra hanya akan menjadi dokumen yang disimpan di rak — indah secara aspirasi tetapi tidak berdampak dalam kenyataan. Sistem M&E yang baik memastikan bahwa GKI di Tanah Papua dapat mengetahui secara akurat: apakah pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, apakah sasaran strategis sedang dalam jalur yang benar untuk dicapai, apa saja hambatan yang dihadapi, dan apa yang perlu disesuaikan agar tujuan dapat tercapai.

10.2.1 Landasan Konseptual

Sistem Monitoring dan Evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 dibangun di atas 3 (tiga) landasan konseptual yang saling melengkapi dapat disajikan sebagai berikut.





Tabel 10.1 Landasan Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renstra Sinode GKI di Tanah Papua

Landasan	Konsep	Penerapan dalam M&E GKI di Tanah Papua
Teologis	Stewardship (Penatalayanan): Pertanggungjawaban kepada Allah atas kepercayaan yang diberikan (Lukas 16:10–12; 1 Korintus 4:2)	M&E bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan adalah bentuk pertanggungjawaban iman kepada Allah dan kepada jemaat yang telah mempercayakan sumber dayanya kepada GKI di Tanah Papua
Manajerial	Results-Based Management (RBM): Manajemen berbasis hasil yang mengukur output, outcome, dan impact secara terstruktur (UNDP, 2009; ADB, 2016)	M&E GKI di Tanah Papua tidak hanya mengukur kegiatan yang dilaksanakan (output), tetapi juga perubahan yang terjadi pada jemaat dan masyarakat (outcome) dan dampak jangka panjang (impact)
Organisasional	Organizational Learning: Kapasitas organisasi untuk belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan kualitas (Senge, 1990; Argyris & Schön, 1978)	Hasil M&E digunakan sebagai bahan pembelajaran institusional GKI di Tanah Papua untuk terus meningkatkan kualitas, relevansi, dan dampak pelayanan

10.2.2 Prinsip Monitoring

Monitoring adalah proses pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program-program Renstra GKI Di Tanah Papua 2028–2032. Tujuan monitoring adalah untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat sasaran, dan menggunakan sumber daya secara efisien; serta untuk mengidentifikasi hambatan dan risiko secara dini sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian yang diperlukan (Kusek & Rist, 2004).

Tabel 10.2 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renstra Sinode GKI di Tanah Papua

No	Prinsip	Penjelasan	Implementasi dalam GKI di Tanah Papua
1	Sistematis	Monitoring dilakukan secara terencana, teratur, dan menggunakan instrumen yang terstandar sehingga hasilnya dapat diperbandingkan antar waktu dan antar unit	Jadwal monitoring yang ditetapkan di awal tahun; formulir pelaporan terstandar di SIMGKI
2	Partisipatif	Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses monitoring, bukan hanya pengawas dari atas	Forum monitoring klasis; laporan mandiri jemaat; survei kepuasan jemaat





3	Berbasis Data	Monitoring menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat diverifikasi, bukan asumsi atau kesan subjektif	Pengumpulan data melalui SIMGKI; survei berkala; observasi lapangan
4	Tepat Waktu	Informasi monitoring tersedia pada waktu yang tepat sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang responsif	Dashboard SIMGKI real-time; laporan bulanan otomatis
5	Transparan	Hasil monitoring dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang berkepentingan	Portal data publik GKI di Tanah Papua; laporan monitoring disebarluaskan ke semua Klasis
6	Berorientasi Pembelajaran	Monitoring tidak hanya mencari kesalahan, tetapi terutama mencari pembelajaran untuk perbaikan	Sesi refleksi learning dalam setiap Rakorprog; dokumentasi praktik terbaik
7	Proporsional	Beban monitoring tidak boleh lebih besar dari manfaatnya bagi pelaksana program di lapangan	Formulir pelaporan yang ringkas dan mudah diisi; pemanfaatan teknologi digital

Sistem monitoring Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 diorganisasikan dalam 4 (empat) tingkatan yang saling melengkapi sebagai berikut.

MONITORING BULANAN

Frekuensi: Setiap bulan | Pelaksana: Kepala Departemen/Bidang | Penerima Laporan: Sekretaris Sinode

Laporan kemajuan program (Progress Report) disampaikan oleh setiap Kepala Departemen/Bidang kepada Sekretaris Sinode melalui modul monitoring SIMGKI, paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Laporan mencakup: realisasi kegiatan vs rencana, realisasi anggaran vs rencana, hambatan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut.

MONITORING TRIWULANAN

Frekuensi: Setiap 3 bulan | Pelaksana: Litbang Sinode | Forum: Rapat Koordinasi Lintas Departemen

Rapat Koordinasi Program (Rakorprog) triwulanan diselenggarakan oleh Sekretaris Sinode yang melibatkan semua Kepala Departemen/Bidang, Direktur Lembaga/Yayasan, dan Litbang Sinode. Rakorprog membahas: analisis kemajuan lintas departemen, identifikasi isu dan hambatan bersama, penyesuaian program jika diperlukan, dan berbagi praktik terbaik antar departemen.

MONITORING SEMESTERAN

Frekuensi: Setiap 6 bulan | Pelaksana: Litbang Sinode + BPAM | Forum: Rapat Pimpinan (Rapim) Sinode

Rapat Pimpinan (Rapim) Sinode GKI Di Tanah Papua setiap semester membahas laporan kemajuan Renstra secara komprehensif, termasuk analisis capaian IKU, realisasi anggaran, analisis risiko, dan rekomendasi kebijakan. Rapim berwenang untuk menetapkan penyesuaian strategis terhadap program Renstra yang diperlukan berdasarkan temuan monitoring.

MONITORING TAHUNAN

Frekuensi: Setiap tahun | Pelaksana: Litbang Sinode + eksternal | Forum: Rapat Kerja Am (Raker Am) Sinode GKI di Tanah Papua

Raker Am Sinode GKI Di Tanah Papua yang diselenggarakan setiap tahun merupakan forum monitoring tahunan paling komprehensif. Seluruh Departemen, Bidang, Lembaga, dan Yayasan mempresentasikan laporan tahunan pelaksanaan program dan capaian IKU. Raker Am juga menetapkan Rencana Operasional (Renop) tahunan untuk tahun berikutnya berdasarkan hasil monitoring.





Sistem Informasi Manajemen GKI Di Tanah Papua (SIMGKI) adalah tulang punggung teknologi dari sistem monitoring Renstra. Modul monitoring SIMGKI dirancang untuk memungkinkan pemantauan real-time terhadap capaian program di semua lingkup (Sinode, Klasis, Lembaga/Yayasan).

Tabel 10.3 Sistem Informasi Manajemen Sinode GKI di Tanah Papua

Fitur SIMGKI	Fungsi Monitoring	Pengguna	Akses
Dashboard Eksekutif	Menampilkan ringkasan capaian IKU 8 Sasaran Strategis secara real-time dalam bentuk grafik dan indikator lalu-lintas (traffic light)	Pimpinan BPAM Sinode	Tablet/Laptop – Login khusus pimpinan
Modul Laporan Program	Pengisian laporan bulanan oleh Kepala Departemen/Bidang secara online; otomatis terekap di database Sinode	Kepala Departemen/Bidang	Web browser – Login departemen
Modul Keuangan	Monitoring realisasi anggaran vs rencana secara real-time; peringatan otomatis jika realisasi di bawah 60% atau di atas 110%	Bagian Keuangan Sinode	Web browser – Login keuangan
Portal Klasis	Klasik mengisi laporan kemajuan program Klasik setiap kuartal; data terintegrasi ke dashboard Sinode	Sekretaris Klasik	Web mobile – Login klasik
Sistem Peringatan Dini	Sistem otomatis mengirimkan notifikasi kepada Kepala Departemen dan Sekretaris Sinode jika ada program yang terlambat atau di bawah target	SIMGKI system	Otomatis (email/WhatsApp)
Repository Dokumen	Penyimpanan terstruktur semua laporan monitoring, evaluasi, dan dokumen Renstra yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Semua pengguna	Web browser – Login sesuai level

10.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2028–2032

IKU adalah ukuran-ukuran kunci yang digunakan untuk memantau kemajuan pencapaian setiap Sasaran Strategis. Setiap IKU dirumuskan menggunakan prinsip SMART: Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound (Berbatas Waktu) (Doran, 1981; Kaplan & Norton, 1996).

SS-1 • Persentase warga jemaat mengikuti pembinaan rohani terstruktur minimal 1x/tahun	
Baseline (2028): 45% (survei Litbang Sinode 2027) Target Akhir (2032): 75% pada akhir 2032	Sumber Verifikasi: Laporan tahunan PAR/PAM/PW/PKB; Survei Kepuasan Jemaat Litbang Sinode Frekuensi Pengukuran: Tahunan (Januari–Desember) Penanggung Jawab: Sekretariat PAR/PAM/PW/PKB; Litbang Sinode




SS-2 • Persentase ladang misi 3T yang menerima kunjungan pastoral terstruktur minimal 2x/tahun

Baseline (2028):
58% (data Departemen Misi 2027)

Target Akhir (2032):
90% pada akhir 2032

Sumber Verifikasi: Laporan misi tahunan Departemen Misi & PI; Laporan YAJASI/MAF/Helivida

Frekuensi Pengukuran: Semesteran

Penanggung Jawab: Departemen Misi & PI; Litbang Sinode

SS-3 • Jumlah Klasis yang mendeklarasikan diri sebagai Eco-Church aktif

Baseline (2028):
5 Klasis Eco-Church (2028)

Target Akhir (2032):
50 Klasis Eco-Church pada 2032

Sumber Verifikasi: Deklarasi resmi Eco-Church Klasis; Laporan Departemen KPKC

Frekuensi Pengukuran: Tahunan

Penanggung Jawab: Departemen KPKC; Litbang Sinode

SS-4 • Jumlah Klasis dengan program pelayanan inklusi disabilitas aktif

Baseline (2028):
8 Klasis (data Departemen Diakonia 2027)

Target Akhir (2032):
30 Klasis pada 2031

Sumber Verifikasi: Laporan program Departemen Diakonia; Observasi lapangan Litbang Sinode

Frekuensi Pengukuran: Tahunan

Penanggung Jawab: Departemen Diakonia; Litbang Sinode

SS-5 • Jumlah Perjanjian Baru bahasa daerah Papua baru yang diselesaikan penerjemahannya

Baseline (2028):
0 PB baru (baseline 2028)

Target Akhir (2032):
15 PB baru pada akhir 2032

Sumber Verifikasi: Laporan Departemen Misi/Penerjemahan; Konfirmasi LAI dan Bahteraku

Frekuensi Pengukuran: Tahunan

Penanggung Jawab: Departemen Misi & PI; Litbang Sinode

SS-6 • Jumlah proses rekonsiliasi besar yang difasilitasi GKI di Tanah Papua di Papua

Baseline (2028):
0 proses rekonsiliasi besar (baseline 2028)

Target Akhir (2032):
3 proses rekonsiliasi besar pada 2032

Sumber Verifikasi: Dokumen resmi rekonsiliasi; Berita pers; Laporan KPKC

Frekuensi Pengukuran: Tahunan

Penanggung Jawab: Departemen KPKC; Litbang Sinode

SS-7 • Indeks tata kelola organisasi GKI di Tanah Papua (berdasarkan standar good governance nirlaba)

Baseline (2028):
65/100 (penilaian mandiri 2027)

Target Akhir (2032):
85/100 pada akhir 2032

Sumber Verifikasi: Penilaian tata kelola oleh asesor eksternal independen; Laporan audit keuangan

Frekuensi Pengukuran: Dua tahunan (2030 dan 2032)

Penanggung Jawab: Sekretariat Umum; Asesor Eksternal Independen





Jumlah pemimpin gereja tersertifikasi program kaderisasi transformatif GKI di Tanah Papua

Baseline (2028):
0 (program baru, baseline 2028)

Target Akhir (2032):
300 pemimpin
tersertifikasi pada 2032

Sumber Verifikasi: Sertifikat kaderisasi; Laporan Departemen Personalia

Frekuensi Pengukuran: Tahunan

Penanggung Jawab: Departemen Personalia; Litbang Sinode

Catatan: Selain delapan IKU di atas, setiap Departemen/Bidang/Lembaga/Yayasan menyusun IKU Operasional yang lebih rinci sesuai dengan program masing-masing. IKU Operasional dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) Tahunan yang mengacu pada Renstra ini.

10.2.4 Sistem Pelaporan Monitoring

Sistem pelaporan monitoring dirancang untuk memastikan bahwa informasi tentang kemajuan Renstra mengalir secara tepat, akurat, dan efisien dari level jemaat ke Klasis ke Sinode. Berikut adalah arsitektur sistem pelaporan:

Tabel 10.4 Sistem Pelaporan Monitoring

Level	Laporan	Format	Frekuensi	Ditujukan kepada	Batas Waktu
Jemaat	Laporan Program P4G Jemaat Triwulanan	Formulir SIMGKI Jemaat (digital) atau formulir cetak	Triwulanan	Klasik	Tanggal 15 akhir triwulan
Klasik	Laporan Kemajuan Renstra Klasik Semesteran	SIMGKI Portal Klasik; Laporan naratif + data	Semesteran	Sinode (Litbang)	30 Juni & 31 Desember
Departemen/Bidang	Laporan Kemajuan Program Bulanan	Modul monitoring SIMGKI; max 2 halaman	Bulanan	Sekretaris Sinode	Tanggal 10 bulan berikutnya
Lembaga/Yayasan	Laporan Kuartal Lembaga	Format laporan lembaga terintegrasi SIMGKI	Kuartalan	Sekretaris Sinode	Tanggal 15 akhir kuartal
Litbang Sinode	Laporan Monitoring Komprehensif Tahunan	Laporan naratif + data + analisis; max 50 hal	Tahunan	BPAM Sinode	31 Januari tahun berikutnya
BPAM Sinode	Laporan Tahunan GKI di Tanah Papua (Annual Report)	Dokumen publik; cetak & digital	Tahunan	Seluruh pemangku kepentingan	30 Maret tahun berikutnya

10.2.5 Manajemen Risiko dalam Monitoring

Sistem monitoring Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 mengintegrasikan manajemen risiko sebagai komponen yang tidak terpisahkan. Setiap laporan monitoring menyertakan asesmen risiko terhadap pencapaian target IKU, berdasarkan sistem 'Traffic Light' berikut:



**Tabel 10.5 Manajemen Risiko dalam Monitoring**

Status	Kriteria Capaian	Interpretasi	Tindak Lanjut
• HIJAU	≥80% target tercapai sesuai jadwal	Program on track — berjalan sesuai rencana	Pertahankan; dokumentasikan praktik terbaik
• KUNING	60–79% target tercapai; ada keterlambatan	Program at risk — perlu perhatian	Identifikasi hambatan; penyesuaian program; laporan khusus ke Sekretaris Sinode
• MERAH	<60% target tercapai; atau program terhenti	Program off track — perlu tindakan segera	Eskalasi ke Rapim Sinode; revisi program; investigasi hambatan sistemik

10.3 Evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027-2032

Evaluasi adalah penilaian sistematis, berkala, dan mendalam terhadap relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program-program Renstra GKI Di Tanah Papua 2028–2032. Berbeda dengan monitoring yang bersifat pemantauan berkelanjutan, evaluasi dilakukan pada titik-titik waktu tertentu dan menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dengan melibatkan asesor eksternal (OECD/DAC, 2002; Patton, 2008).

10.3.1 Kriteria Evaluasi: Lima Kriteria OECD/DAC

GKI di Tanah Papua mengadopsi 5 (lima) kriteria evaluasi standar yang dikembangkan oleh OECD/DAC (Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee) sebagai kerangka penilaian yang komprehensif yang disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 10.6 Kriteria Evaluasi

Kriteria	Definisi	Pertanyaan Evaluasi Kunci	Metode Pengukuran
Relevansi (Relevance)	Sejauh mana program sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan konteks jemaat dan masyarakat Papua	Apakah program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga jemaat dan konteks Papua yang terus berubah?	Survei kebutuhan jemaat; FGD pemangku kepentingan; analisis konteks
Efektivitas (Effectiveness)	Sejauh mana program berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan	Apakah target IKU tercapai? Apakah sasaran strategis terwujud? Apa faktor kunci keberhasilan dan kegagalan?	Analisis capaian IKU; wawancara mendalam; studi kasus
Efisiensi (Efficiency)	Sejauh mana hasil program sebanding dengan sumber daya	Apakah GKI di Tanah Papua menggunakan sumber daya secara	Analisis biaya-manafaat;





Kriteria	Definisi	Pertanyaan Evaluasi Kunci	Metode Pengukuran
	(waktu, dana, tenaga) yang digunakan	optimal? Adakah cara yang lebih hemat untuk mencapai hasil yang sama?	benchmarking dengan organisasi sejenis
Dampak (Impact)	Perubahan jangka panjang positif atau negatif yang ditimbulkan oleh program, baik yang direncanakan maupun tidak	Apa perubahan nyata yang dialami warga jemaat dan masyarakat Papua sebagai hasil pelayanan GKI di Tanah Papua selama 5 tahun?	Survei dampak; kelompok kontrol; analisis perubahan indikator sosial
Keberlanjutan (Sustainability)	Sejauh mana manfaat program dapat berlanjut setelah program berakhir	Apakah program-program GKI di Tanah Papua dirancang untuk berkelanjutan? Apakah kapasitas lokal (klasis, jemaat) meningkat?	Analisis kapasitas kelembagaan; penilaian kemandirian finansial

10.3.2 Jenis-Jenis Evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032

Ada terdapat 3 (tiga) jenis evaluasi yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra 2027–2032 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 10.7 Jenis-Jenis Evaluasi

EVALUASI FORMATIF (Mid-Term Review / MTR)	
Waktu Pelaksanaan	Semester II Tahun 2030 (pertengahan periode Renstra)
Tujuan	Menilai kemajuan implementasi Renstra pada titik pertengahan; mengidentifikasi hambatan sistemik yang perlu diatasi; merumuskan rekomendasi penyesuaian strategis untuk semester II 2030 hingga 2032.
Pelaksana	Tim evaluasi gabungan: Litbang Sinode GKI di Tanah Papua (koordinator) + konsultan evaluasi eksternal independen + perwakilan Klasis (5 orang). Total anggota tim: 9–12 orang.
Metode	Analisis data SIMGKI; FGD dengan 10 Klasis representatif; survei online kepada 1.000 warga jemaat; wawancara mendalam pimpinan Sinode dan Klasis; analisis capaian IKU vs target.
Output Utama	Laporan MTR Renstra GKI di Tanah Papua 2027–2032 (max 80 halaman); Rekomendasi penyesuaian strategis; Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang ditetapkan oleh BPAM Sinode.
EVALUASI SUMATIF (End-of-Term Evaluation / ETE)	
Waktu Pelaksanaan	Semester I Tahun 2032 (menjelang akhir periode Renstra)
Tujuan	Menilai secara komprehensif keseluruhan capaian Renstra 2027–2032 berdasarkan 5 kriteria OECD/DAC; mendokumentasikan pembelajaran; merumuskan rekomendasi strategis sebagai masukan bagi penyusunan Renstra 2032–2037.
Pelaksana	Tim evaluasi eksternal yang sepenuhnya independen: terdiri dari 3–5 evaluator profesional yang berpengalaman dalam evaluasi





	gereja/organisasi nirlaba, dikombinasikan dengan perwakilan Litbang Sinode (sebagai narasumber, bukan evaluator).
Metode	Analisis komprehensif data SIMGKI 2027–2032; FGD dengan 20 Klasik representatif; survei kepuasan jemaat nasional (n=5.000); wawancara mendalam seluruh pimpinan Sinode dan Direktur Lembaga/Yayasan; kunjungan lapangan ke 10 klasik terpilih; analisis dokumen.
Output Utama	Laporan Evaluasi Akhir Renstra GKI di Tanah Papua 2027–2032 (max 120 halaman + lampiran); Buku Pembelajaran (Lessons Learned) GKI di Tanah Papua 2027–2032; Baseline Data untuk Renstra 2032–2037; Rekomendasi untuk Sidang Sinode XX.

EVALUASI DAMPAK (Impact Assessment)

Waktu Pelaksanaan	Semester II Tahun 2032 (setelah evaluasi sumatif)
Tujuan	Mengukur dampak jangka menengah program Renstra terhadap kehidupan warga jemaat (spiritual, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ekologi, perdamaian) dan kontribusi GKI di Tanah Papua terhadap pembangunan Papua secara lebih luas.
Fokus Dampak	Dampak spiritual (pertumbuhan iman jemaat); dampak ekonomi (peningkatan pendapatan); dampak pendidikan (peningkatan IPM Papua); dampak ekologi (luasan hutan terlindungi); dampak perdamaian (penurunan intensitas konflik).

10.3.3 Penggunaan Hasil Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 digunakan untuk 7 (tujuh) keperluan strategis sebagai berikut.

Tabel 10.8 Pengumuman Hasil Evaluasi

No	Penggunaan Hasil M&E	Mekanisme	Waktu
1	Penyesuaian program dan anggaran tahunan	Rapim Sinode setiap semester; Raker Am Sinode setiap tahun	Berkelanjutan (bulanan–tahunan)
2	Pembelajaran institusional GKI di Tanah Papua	Sesi lessons learned dalam Rakorprog; jurnal pembelajaran GKI di Tanah Papua	Triwulanan
3	Komunikasi kepada jemaat dan pemangku kepentingan	Annual Report GKI di Tanah Papua; portal website; majalah sinode	Tahunan (Maret)
4	Akuntabilitas kepada Sidang Sinode	Laporan LPJ Renstra 2027–2032 di Sidang Sinode XX	Sidang Sinode XX (2032)
5	Masukan bagi penyusunan Renstra 2032–2037	Laporan evaluasi sumatif sebagai baseline; Workshop Visioning 2032	Semester I–II 2032
6	Advokasi kebijakan kepada pemerintah	Laporan dampak GKI di Tanah Papua sebagai evidence-based advocacy	Tahunan
7	Penguatan akuntabilitas kemitraan	Laporan kemitraan kepada mitra gereja, NGO, dan pemerintah	Sesuai jadwal MoU mitra





10.3.4 Struktur Kelembagaan Monev

Pelaksanaan sistem M&E Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 didukung oleh struktur kelembagaan yang jelas sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 10.9 Struktur Kelembagaan Monev

Unit/Lembaga	Peran dalam M&E	Kewenangan	SDM yang Dibutuhkan
Litbang Sinode GKI di Tanah Papua	Koordinator sistem M&E; pengumpulan dan analisis data; penyusunan laporan monitoring dan evaluasi	Merekomendasikan penyesuaian program kepada BPAM Sinode berdasarkan temuan M&E	5 peneliti/analisis (S2/S3); 2 staf data entry; 1 IT/sistem SIMGKI
BPAM Sinode	Pengguna utama hasil M&E untuk pengambilan keputusan strategis; penetapan penyesuaian Renstra	Menetapkan penyesuaian program dan anggaran; merespons rekomendasi MTR dan ETE	Pimpinan BPAM + Sekretaris Sinode
Kepala Departemen/ Bidang	Penanggung jawab monitoring program di lingkup masing-masing; pengisian laporan bulanan	Menetapkan penyesuaian operasional di tingkat departemen	Setiap Kepala Departemen/Bidang
Evaluator Eksternal	Pelaksana evaluasi MTR (2030) dan ETE (2032) yang independen dan objektif	Memberikan penilaian independen; tidak dapat diarahkan oleh Sinode	3–5 evaluator independen (MTR); 3–5 evaluator (ETE); rekrutmen terbuka
Perwakilan Klasis	Memberikan umpan balik dari perspektif lapangan dalam forum M&E (FGD, survey)	Menyuarakan pengalaman implementasi di lapangan; mengusulkan penyesuaian	Perwakilan Klasis dalam FGD evaluasi

10.3.5 Anggaran dan Jadwal Monev

Pelaksanaan sistem M&E Renstra memerlukan alokasi anggaran yang memadai. Berikut adalah rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan M&E utama sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10.10 Anggaran dan Waktu Monev

No	Kegiatan M&E	Waktu Pelaksanaan	Estimasi Anggaran	Sumber Dana
1	Pengembangan sistem SIMGKI modul monitoring	2027–2029	Rp 500.000.000	Anggaran Sinode + Dana Mitra
2	Pelatihan Tim M&E Litbang Sinode	2027	Rp 150.000.000	Anggaran Sinode





No	Kegiatan M&E	Waktu Pelaksanaan	Estimasi Anggaran	Sumber Dana
3	Rakorprog triwulanan (4x/tahun × 5 tahun)	2027–2032	Rp 50.000.000/tahun	Anggaran Operasional Sinode
4	Raker Am Sinode tahunan (1x/tahun × 5 tahun)	2029–2032	Rp 300.000.000/tahun	Anggaran Sinode
5	Survei Kepuasan Jemaat tahunan (1x/tahun)	2029–2032	Rp 200.000.000/tahun	Anggaran Litbang Sinode
6	Mid-Term Review (MTR) 2030	Semester II 2030	Rp 750.000.000	Anggaran Sinode + Dana Mitra
7	End-of-Term Evaluation (ETE) 2032	Semester I 2032	Rp 1.500.000.000	Anggaran Sinode + Dana Mitra
8	Impact Assessment 2032	Semester II 2032	Rp 500.000.000	Anggaran Sinode + Dana Mitra
9	Penerbitan Annual Report GKI di Tanah Papua (1x/tahun)	2029–2032	Rp 100.000.000/tahun	Anggaran Komunikasi
10	Kunjungan lapangan monitoring ke klasis (2x/tahun)	2027–2032	Rp 200.000.000/tahun	Anggaran Litbang Sinode

Catatan: Seluruh estimasi anggaran M&E di atas bersifat indikatif dan akan ditetapkan lebih rinci dalam Rencana Operasional (Renop) Tahunan GKI Di Tanah Papua sesuai dengan kondisi keuangan aktual.

10.3.6 Kalender Monitoring dan Evaluasi 2027–2032

Berikut adalah kalender M&E 5 (lima) tahunan GKI Di Tanah Papua yang memberikan gambaran ritme sistem M&E sepanjang periode Renstra yang disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 10.11 Jadwal Monev

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Milestone M&E
2028	Penetapan baseline IKU; pelatihan Tim M&E; peluncuran SIMGKI	Rakorprog I; laporan bulanan aktif	Rakorprog II; penyesuaian program awal	Rapim semester II; Raker Am Sinode I	Baseline IKU ditetapkan; SIMGKI aktif
2029	Rakorprog I; Survei Jemaat baseline	Rakorprog II; Rapim semester I	Rakorprog III	Rapim semester II; Raker Am Sinode II	Annual Report 2027 diterbitkan
2030	Rakorprog I; Survei Jemaat I	Rakorprog II; Rapim semester I	MTR: FGD 10 Klasis; Survei 1.000 jemaat	Rapim semester II; Laporan MTR ditetapkan	Mid-Term Review diselesaikan; RTL ditetapkan BPAM
2031	Rakorprog I; implementasi RTL MTR	Rakorprog II; Rapim semester I	Rakorprog III; Survei Jemaat II	Rapim semester II; Raker Am Sinode IV	Annual Report 2030; pemantapan menuju akhir periode





Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Milestone M&E
2032	Rakorprog I; ETE: FGD 20 Klasis; Survei 5.000 jemaat	Laporan ETE ditetapkan; Impact Assessment	Rakorprog III; Baseline Renstra 2032–2037	Sidang Sinode XX; Laporan LPJ Renstra	ETE diselesaikan; Impact Assessment; Baseline Renstra 2032–2037

Penutup



11.1 Pengantar

Bagian ini akan menyajikan secara komprehensif sebuah simpulan yang bersumber dari hasil sintesa dan rekomendasi tentang Dokumen Renstra GKI Di Tanah Papua 2027–2032 yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh kepemimpinan Sinode di masa mendatang.

11.2 Simpulan

Berdasarkan kajian dan analisis-analisis terhadap isu, masalah, dan fenomena yang berkembang di medan pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua Tahun 2022-2027, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, sebagai peta jalan pelayanan, Renstra Sinode GKI di Tanah Papua dapat dijadikan: **(1) Mata Panah Terfokus** dalam membantu gereja menerjemahkan panggilan agung *Ekklesia* (persekutuan orang percaya) menjadi langkah-langkah praktis dan terukur; dan **(2) Keberlanjutan Program**: Memastikan pelayanan seperti pembinaan iman (diakonia), kesaksian (marturia), dan persekutuan (koinonia) tetap berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepengurusan. *Kedua*, sebagai *tools* respons yang kontekstual antara jemaat dan lingkungan untuk menjawab: **(1) kebutuhan riil** warga jemaat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan demografi yang berbeda-beda. Dan dapat memastikan





bahwa gereja tidak hanya berfokus ke dalam (internal jemaat), tetapi juga hadir membawa dampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya; dan **(2) keselarasan oikoumenis** antara sinode GKI di Tanah Papua dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI. *Ketiga*, sebagai media evaluasi dan pertanggungjawaban dalam mengungkap: **(1) hasil pelayanan** (*Outcome-Base*) yang dapat menetapkan tolok ukur atau indikator keberhasilan pelayanan; dan **(2) transparansi** yang dapat mengungkap hasil evaluasi secara berkala apakah program yang dijalankan telah mencapai target strategis yang diharapkan atau belum. *Keempat*, sebagai organ gereja: Sinode GKI di Tanah Papua diharapkan dapat menjalankan empat pilar utama pemangku kepentingan organisasi, yakni **(1) Komitmen**: tekad Bersama dalam mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2027-2032 secara komprehensif; **(2) Konsisten**: semangat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra 2027-2032; **(3) Kolaborasi**: Kerjasama yang siregis dengan semangat kesehatan dengan berbagai mitra strategis untuk mendukung program dan kegiatan dalam Dokumen Renstra 2027-2032; dan **(4) Kompak**: tekad kolektif kolegal sebagai satu kesatuan organ yang dapat menjalankan dan mengawal seluruh program dan kegiatan dalam Dokumen Renstra 2027-2032.

11.3 Rekomendasi

Merujuk pada kajian, analisis, dan simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Sinode GKI di Tanah Papua sebagai berikut. *Pertama*, dapat memastikan dan menetapkan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sinode GKI di Tanah Papua yang dapat dijadikan bahan proyeksi perencanaan program dan kegiatan tahun 2027-2032. *Kedua*, menetapkan nilai dan tema tahun pelayanan yang dapat dijabarkan dalam program strategis dan program prioritas pelayanan tahun 2027-2032. *Ketiga*, meninjau Kembali skema pendanaan untuk penerimaan yang bersumber dari setoran wajib jemaat (SWJ) yang **semula** 40 % Sinode, 20 % Klasis, dan 40 % Jemaat **menjadi** 50 % Sinode, 10 % Dana Pendidikan, dan 40 % Jemaat. *Keempat*, penetapan pemberlakuan 10 % dana Pendidikan untuk dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) untuk memproyeksi program dan kegiatan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. *Kelima*, menetapkan unit-unit bisnis di lingkungan Sinode GKI di Tanah Papua agar dapat diproyeksi kerangka pendanaan dalam jangka waktu lima tahun berjalan.





DAFTAR REFERENSI

- Alkitab Terjemahan Baru. (1974/2009). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Asian Development Bank (ADB). (2016). *Results-Based Monitoring and Evaluation: A Primer for ADB Project Staff*. Manila: ADB.
- Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua. (2011). *Ketetapan Sidang Sinode XVI Nomor: VI/TAP/SS-XVI/GKI/2011*. Sentani: Sinode GKI Di Tanah Papua.
- Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua. (2022). *Rencana Strategis (RENSTRA) GKI Di Tanah Papua 2022–2027*. Jayapura: Sinode GKI Di Tanah Papua.
- Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua. (2027). *Ketetapan Sidang Sinode XIX tentang Rencana Strategis GKI Di Tanah Papua 2028–2032*. Jayapura: Sinode GKI Di Tanah Papua.
- Bamberger, M., Rugh, J., & Mabry, L. (2012). *RealWorld Evaluation: Working Under Budget, Time, Data, and Political Constraints (2nd ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Banks, R., & Ledbetter, B. M. (2004). *Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Borrong, Robert P. (2021). *Merawat Semesta: Teologi Lingkungan Hidup dan Keadilan Ekologis*. Jakarta. BPK Gunung Mulia
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (4th ed.)*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Chang, Anthony Y. (2022). *Teologi Digital: Menjadi Gereja di Era Disrupsi*. Jakarta. Literatur Perkantas
- Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies*. New York: HarperBusiness.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston: Harvard Business School Press.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach (16th ed.)*. Upper Saddle River: Pearson.





- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Drucker, P. F. (2008). *Managing the Nonprofit Organization: Principles and Practices*. New York: HarperCollins.
- Faisal, Muhammad. (2023). *Generasi Kembali ke Akar: Memahami Lanskap Religiusitas Gen Z dan Alpha di Indonesia*. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Funnell, S. C., & Rogers, P. J. (2011). *Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. New York: Paulist Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Harari, Yuval Noah. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. London. Jonathan Cape.
- Hertz, Noreena. (2020). *The Lonely Century: How to Restore Human Connection in a World That's Pulling Apart*. London. Sceptre.
- Hunter, J. D. (2010). *To Change the World: The Irony, Tragedy, and Possibility of Christianity in the Late Modern World*. New York: Oxford University Press.
- Jenkins, Philip. (2011). *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (Edisi Ketiga)*. Oxford. Oxford University Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*. Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kinnaman, David & Matlock, Mark. (2019). *Faith for Exiles: 5 Ways for a New Generation to Follow Jesus in Digital Babylon*. Grand Rapids. Baker Books.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington, DC: The World Bank.
- Litbang Sinode GKI Di Tanah Papua. (2027). *Laporan Evaluasi Komprehensif Renstra GKI Di Tanah Papua 2022–2027*. Jayapura: Sinode GKI Di Tanah Papua.
- National Intelligence Council (NIC). (2021). *Global Trends 2040: A More Contested World*. Washington D.C. National Intelligence Council.
- OECD/DAC. (2002). *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management*. Paris: OECD Publications.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Rogers, P. J. (2008). Using Programme Theory to Evaluate Complicated and Complex Aspects of Interventions. *Evaluation*, 14(1), 29–48.
- Sairin, Weinata. (2019). *Gereja, Agama-Agama, dan Negara di Indonesia: Menuju Keberagamaan yang Inklusif dan Dialogis*. Jakarta. BPK Gunung Mulia
- Samirin, Wijayanto. dkk. (2021). *Indonesia Emas 2045: Impian, Tantangan, dan Strategi Mewujudkan Negara Maju*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Schwab, Klaus. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. London. Portfolio Penguin.
- Schwab, Klaus. (2018). *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution*. London. Portfolio Penguin.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2009). *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. New York: UNDP.
- United Nations Evaluation Group (UNEG). (2016). *Norms and Standards for Evaluation*. New York: UNEG.





- Volf, M. (1998). *After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity*. Grand Rapids: Eerdmans.
- W. K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic Model Development Guide*. Battle Creek: W. K. Kellogg Foundation.
- Wallace-Wells, David. (2019). *The Uninhabitable Earth: Life After Warming*. New York. Tim Duggan Books.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Wright, C. J. H. (2006). *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove: InterVarsity Press.

